

**KEBIJAKAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DI KOTAMADYA SURABAYA 1969-1979**

SKRIPSI

FS Sej 17/36

lit
k



OLEH :

BAWONO ARIO PUTRO

NIM : 120110229

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2006



**KEBIJAKAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DI KOTAMADYA SURABAYA 1969-1979**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Sastra Universitas Airlangga**

OLEH :

BAWONO ARIO PUTRO

NIM : 120110229

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2006

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surabaya, 20 April 2006

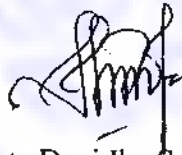
Penulis,



Bawono Ario Putro
NIM.120110229

Setuju untuk diujikan
Surabaya, 28 April 2006

Dosen Pembimbing



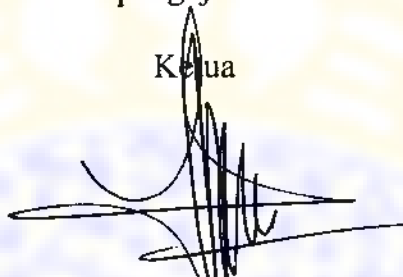
Shinta Devi Ika Santhi R, S.S.
NIP. 132 306 165

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan panitia penguji pada tanggal, 28 April 2006.

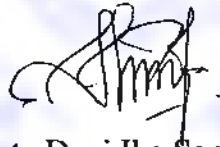
Panitia penguji terdiri dari

Ketua



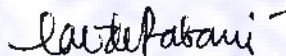
Drs. Sukaryanto, M.Si.
NIP. 132 230 681

Sekretaris

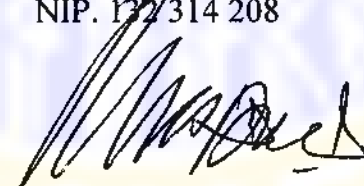


Shinta Devi Ika Santhi R, S.S.
NIP. 132 306 165

Anggota



La Ode Rabani, S.S., M.Hum.
NIP. 132 314 208



Moordiati, S.S., M.Hum.
NIP. 132 311 472



MOTTO

*BARANG SIAPA YANG MENGERJAKAN AMAL YANG SALEH MAKA ITU
ADALAH UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN BARANG SIAPA MENGERJAKAN
KEJAHATAN, MAKA ITU AKAN MENIMPA DIRINYA SENDIRI, KEMUDIAN
KEPADA TUHANMULAH KAMU DIKEMBALIKAN*

(AL JAATSIYAH: 15)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN DENGAN TULUS KEPADA:

PELITA DAN PENYEJUK HATI SERTA PELIPUR LARA DALAM
PERJUANGAN SETIAP LANGKAH. YANG TERCINTA, TERKASIH DAN
TERHORMAT IBUNDA

"ISTRIKU" YANG AKAN SELALU MENDAMPINGI DALAM
MENGARUNGI KEHIDUPAN NYATA DUNIA INI.

"SANG TUNAS" SEBAGAI TUMPUAN HARAPAN KU DALAM
PERJUANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA AGAMA, NUSA DAN
BANGSA.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, tuhan pemelihara seluruh alam. Berkat rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas tauladan umat, Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini membutuhkan tekad dan semangat yang tinggi. Bantuan dan dukungan dari berbagai pihak berperan besar selama proses penulisan. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Sastra Bapak Drs. Heru Supriyadi yang telah membawa Fakultas Sastra menjadi lebih maju dan baik selama ke depannya.
2. Dosen Pembimbing Ibu Shinta Devi Ika Santhi R, S.S., yang senantiasa memberikan ide-ide segar sehingga penulis banyak terbantu dalam proses penulisan.
3. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Bapak Purnawan Basundoro, M.Hum., yang selalu berjuang untuk membawa Ilmu Sejarah menjadi jurusan yang diharapkan lebih maju.
4. Dosen-dosen Ilmu Sejarah Bapak Drs. Sukaryanto, M.Si., Bapak Sarkawi, M.Hum., Bapak Samidi, S.S., Bapak Laode, M.Hum., Bapak Drs. Muryadi, Bapak Edy Budi Santoso, Ibu Eni Sugiarti, dan Ibu Moordianti, M.Hum., yang telah memberikan ilmunya pada penulis tanpa kenal lelah sehingga penulis bisa paham akan sesuatu yang bersejarah.
5. Teman-teman angkatan 2001 Anggola, Fitri, Takun, Sekti, Dewa, Aryo, Kurnia, Rika, Deka, Pras, Rangga, Gugun, Eva, Budi, Ulil, Dian, Bagus, Nenok, Husein, Zuhri, Agung, Ikhsan, Iney, Arie, Masykur, Yuana dan Hendy. You're the best
6. Kakak dan Adik kelas Ilmu Sejarah serta semua mahasiswa yang pernah kuliah di Fakultas Sastra. Terima kasih atas dukungannya secara langsung atau tidak langsung.

7. Bapak Legowo dan Bapak Nurdiyanto sebagai bapaknya Beswan Djarum. Terimakasih atas perhatiannya dan bimbingannya selama saya ada di sana.
8. Teman-teman Beswan Djarum yang selalu mendukungku dalam setiap even baik itu internal atau eksternal. Kalian memang pantas disebut sebagai *Best One*.
9. Seluruh keluargaku yang selalu menyemangatiku agar aku tidak mengatakan “aku lelah”. Mas Boni, Mbak Irma, Mas Huda, Si Imoet Nafa, Om Bambang, Tante Meri, Dik Arum, dan semua yang menyayangiku.
10. Bapak dan Ibu dari Dinas Pemantapan Pangan dan Pusat Informasi Pertanian yang selalu membantu memberikan referensi sumber.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa bermanfaat pada perkembangan Ilmu Sejarah untuk masa yang akan datang.

Surabaya, 28 April 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pernyataan	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Istilah	xvii
ABSTRAKSI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
E. Tinjauan Pustaka dan Sumber	8
F. Metode Penulisan	11
G. Kerangka Konseptual	12
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KOTAMADYA SURABAYA	15
A. Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Kotamadya Surabaya	15
B. Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Surabaya Sebelum 1969	19
1. Ketidakstabilan perencanaan pertanian	19
2. Kerangka Modernisasi Pertanian	26

BAB III KENDALA-KENDALA PEMBANGUNAN PERTANIAN	
TANAMAN PANGAN DI KOTAMADYA SURABAYA 1969-1979.	33
A. Kendala Kondisi Alam	34
B. Kendala Pembuangan Limbah Industri	43
C. Kendala Lingkungan Fisik dan Sosial	45
BAB IV KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	
TANAMAN PANGAN DI KOTAMADYA SURABAYA 1969-1979 ..	50
A. Kebijakan Intensifikasi Usaha Tani	54
1. Kebijakan Bidang Pembenihan	54
2. Kebijakan Bidang Sarana Pupuk dan Pestisida	57
3. Kebijakan Bidang Pengairan/Irigasi	66
4. Kebijakan Bidang Penyuluhan	70
5. Kebijakan Bidang Perkreditan	75
B. Kebijakan Diversifikasi Usaha Tani	77
1. Diversifikasi Horisontal	78
2. Diversifikasi Vertikal	80
BAB V KESIMPULAN	86
Daftar Pustaka	90
Daftar Informan	95
Lampiran-Lampiran	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Hasil Padi Balai-Balai Bibit di Daerah Jawa Timur Tahun 1952 (kw)	20
Tabel 2. Kredit Bimas Gadu Kabupaten dan Kotamadya Surabaya Tahun 1966	27
Tabel 3. Serangan Hama Wereng di Wilayah Kecamatan Karangpilang dan Tandes Bulan Mei 1978	40
Tabel 4. Serangan Hama Wereng di Wilayah Kotamadya Surabaya Bulan April 1979	42
Tabel 5. Kebutuhan Sarana Produksi Benih untuk Bimas/Inmas Musim Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kg)	56
Tabel 6. Kebutuhan Sarana Produksi Urea untuk Bimas/Inmas Musim Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kw)	61
Tabel 7. Kebutuhan Sarana Produksi TSP untuk Bimas/Inmas Musim Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kg)	62
Tabel 8. Kebutuhan Sarana Produksi Insektisida untuk Bimas/Inmas Musim Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (Liter)	63
Tabel 9. Kebutuhan Sarana Produksi Zink Phospid untuk Bimas/Inmas Musim Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kg)	64
Tabel 10. Realisasi Kredit Bimas Musim Tanam 1970/1971-1979 di Kotamadya Surabaya (Per 31 Maret 1981)	76
Tabel 11. Rata-Rata Harga Gabah/Beras di Tingkat Penggilingan Tahun 1970-1979	82
Tabel 12. Pengiriman Beras oleh Bulog dan Swasta dari Propinsi Jawa Timur tahun 1978 (ton)	84

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Gubernur Melihat Tandes Sudah Tidak Tandus	96
Lampiran 2. Mekanisasi Pengolahan Tanah untuk Mencapai 4 Aspek Peningkatan	97
Lampiran 3. Empat Ton Bibit Padi untuk Kecamatan Tandes	98
Lampiran 4. DPR Pusat Menanggapi Keluhan Para Petani 6 Desa Di Kecamatan Sukolilo	99
Lampiran 5. "Tilik" Desa-Desa di Karangpilang	100
Lampiran 6. Jadwal Tilik Desa di Surabaya Selatan Ditetapkan	101
Lampiran 7. Peringatan Hari Krida Pertanian Tonjolkan Sikap Mawas Diri ..	102
Lampiran 8. Petani-Petani KMS yang Berprestasi Mendapat Penghargaan ...	103
Lampiran 9. Tandes juga Banjir	104
Lampiran 10. Pernyataan tentang Pembelian Padi Pemerintah	105
Lampiran 11. Resolusi: tentang kredit dan bantuan alat-alat pertanian bagi kaum tani	106
Lampiran 12. Penyelenggaraan Pekan Pertanian di Surabaya	107
Lampiran 13. Ketentuan Perincian Kredit Bimas Gadu	108
Lampiran 14. Penyelewengan Pupuk Bimas oleh Pegawai Pertanian Kecamatan Rungkut	109
Lampiran 15. Pembelian Bibit Unggul dan Penyaluran Pupuk	110
Lampiran 16. Laporan Bimas Kotamadya Surabaya	111
Lampiran 17. Perkembangan Pertanian di Daerah Kecamatan Rungkut	113
Lampiran 18. Penetapan Petugas-Petugas Direksi Proyek Rehabilitasi Irigasi ...	117
Lampiran 19. Ijin Operasi Pembasmian Hama	118

Lampiran 20. Laporan Hasil Pembuatan Waduk di Kecamatan Karangpilang ...	119
Lampiran 21. Penyetoran Padi/Gabah Peserta Bimas	120
Lampiran 22. Hal-Hal yang Berhubungan dengan Pengadaan Pangan	121
Lampiran 23. Surat Ijin untuk Mengadakan Usaha Pembasmian Hama	124
Lampiran 24. Normalisasi Proyek Kalimakmur	126
Lampiran 25. Penyimpanan Pupuk di Luar Gudang Resmi	128
Lampiran 26. Pemberantasan Hama dan Penyakit Tanaman Musim Tanam 1975/1976	129
Lampiran 27. Pengembangan IR 26, 28, 30 dalam Rangka Menanggulangi Hama Wereng dengan Virusnya	131
Lampiran 28. Program Intensifikasi Produksi Padi Bimas	132
Lampiran 29. Permasalahan Bimas dan Penyetoran SPPB	134
Lampiran 30. Situasi Aliran Air Saluran Gunungsari Untuk Pertanian Kecamatan Tandes	135
Lampiran 31. Persiapan Bantuan Pangan	136
Lampiran 32. Pengaturan Pengairan Musim Rendengan Tahun 1977/1978	137
Lampiran 33. Musim Paceklik Tahun 1978	138
Lampiran 34. Pelaksanaan Pengadaan Pangan tahun 1978/1979	139
Lampiran 35. Penanggulangan Hama Wereng dan Ulat Tentara di Kecamatan-Kecamatan Karangpilang dan Tandes untuk MT. 77/78	140
Lampiran 36. Penyuluhan Pengadaan Pangan M.K.1978	141
Lampiran 37. Serangan Hama Wereng	142
Lampiran 38. Keberhasilan Program Pengadaan Pangan Tahun 1978/1979	143
Lampiran 39. Pertanian Terpadu/Model Usaha Tani Idaman	144

Lampiran 40. Daftar Pengecer Pupuk/Obat-obatan Bimas/Non Bimas/Inmas ..	145
Lampiran 41. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pest Control	146
Lampiran 42. Laporan Serangan Hama Wereng	152
Lampiran 43. Pencemaran Air Buangan di Sawah Penduduk Desa Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya ..	153
Lampiran 44. Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit Bimas Musim Tanam 1970/1971-1979/1980 bagian bulan Maret 1981 ..	155

DAFTAR SINGKATAN



Bimas	: Bimbingan Massal
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
Bulog	: Badan Urusan Logistik
BUUD	: Badan Usaha Unit Desa
Demas	: Demonstrasi Massal
Demplot	: Demonstrasi Plot
Dolog	: Depot Logistik
Inmas	: Intensifikasi Massal
IRRI	: Internasional Rice Research Institute
KUD	: Koperasi Unit Desa
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
PPLH	: Pengendalian Pelestarian Lingkungan Hidup
PPS	: Petugas Penyuluh Lapangan
RRI	: Radio Republik Indonesia
Saprodi	: Sarana Produksi
SPPB	: Surat Pemakaian Pupuk Bersertifikat
VUTW	: Varietas Unggul Tahan Wereng
Indamardi	: Industri, Perdagangan, Maritim, dan Pendidikan.

DAFTAR ISTILAH

Burgermeester	: Walikota
Diversifikasi	: Penganekaragaman usaha pertanian
Eksplasi	: Ledakan
Ekstensifikasi	: Perluasan tanah pertanian
Fungisida	: Jenis pestisida untuk mengendalikan penyakit tanaman
Fumigator	: Badan/orang yang menyelenggarakan usaha pembasmian hama
Gemeente	: Kota
Gurem	: Lemah
Hoechst	: Pihak swasta asing yang berkecimpung dalam sistem penyaluran kredit tani di Indonesia
Insektisida	: Jenis pestisida untuk mengendalikan hama
Intensifikasi	: Peningkatan hasil produksi pertanian
Kawedanan	: Membawahi beberapa camat atau bupati
Kaonderan	: Kecamatan
Konsolidasi	: Usaha memperkuat kedudukan
Normalisasi	: Usaha untuk membuat normal/biasa
Padi Gadu	: Padi ditanam di sawah pada musim kemarau
Padi Gogo	: Padi ditanam di lahan darat
Palawija	: Jenis tanaman pangan seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian
PB/IR	: Varietas padi
Pestisida	: Bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tanaman
Pest Control	: Operasi pembasmian hama
Pupuk	: Bahan yang diperlukan tanaman untuk menambah kadar unsur hara di dalam tanah
Puso	: Padi tidak berbuah/gagal panen/rusak berat

Rehabilitasi : Pemulihan pada keadaan semula
Sundep : Hama penggerek batang
Zink Phospid : Jenis fungisida untuk memberantas hama tikus.

ABSTRAKSI

Studi ini membicarakan tentang pembangunan sektor pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya mulai tahun 1969 hingga 1979. Kotamadya Surabaya saat itu memberikan porsi tersendiri pada pembangunan pertanian tanaman pangan karena hal tersebut diarahkan pada usaha meratakan penyebaran hasil-hasil pembangunan dan memperluas kesempatan kerja.

Pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya, juga banyak menemui kendala-kendala diantaranya bencana banjir, serangan hama wereng, kekeringan, pembuangan limbah industri yang sembarangan, pengetahuan petani yang masih tradisional dan ganti rugi dalam pemilikan tanah.

Pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya untuk dapat menunjang peningkatan produksi pertanian dilakukan berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut antara lain melalui Bimas dan Inmas, penggunaan dan penyediaan bibit unggul, pengaturan dan penyediaan sarana produksi pupuk dan pestisida, pemberantasan hama wereng dan perbaikan saluran pengairan serta pompanisasi.

Pokok pembahasan dalam studi ini didasarkan pada dua permasalahan yaitu Pertama, keadaan umum pertanian tanaman pangan dan masyarakatnya di Kotamadya Surabaya serta kendala-kendala pokok yang timbul dalam pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya tahun 1969-1979. Kedua, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kotamadya Surabaya dalam pembangunan pertanian tanaman pangan tahun 1969-1979.

Dari berbagai persoalan tersebut, penulis berusaha mengkajinya dengan seperangkat metode yang sudah lazim dalam penulisan Ilmu Sejarah. Metode tersebut meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hal itu dilakukan untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam studi ini juga mengambil konsep tentang pembangunan pertanian dan definisi dari tanaman pangan. Dari konsep tersebut kemudian diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial ekonomi sehingga diperoleh kajian yang menghasilkan suatu gambaran tentang pembangunan pertanian tanaman pangan disertai kondisi sosial masyarakat dalam hal penyediaan pangan.

Hasil akhir dari studi ini adalah memberikan informasi mengenai gambaran pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya sebelum tahun 1969 kemudian dengan diperkenalkannya kebijakan teknologi baru pada Pelita I memperlihatkan perubahan sistem pertanian dan keahlian yang semakin terencana lebih baik .

Kata Kunci: Pembangunan pertanian, Tanaman Pangan dan Surabaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian di Indonesia sampai saat ini masih menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional walaupun sektor perindustrian sudah mulai berkembang tetapi pertanian masih menjadi mata pencaharian yang diutamakan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Jika kita melihat faktanya, kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian sedangkan 75% dari penduduk memperoleh penghidupan dari sektor pertanian. Data statistik menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia antara rentang waktu 1953 – 1967 mengalami perkembangan yang kurang baik. Di satu sisi produksi bahan makanan secara rata-rata mengalami peningkatan sekitar 24% seperti beras, jagung, kacang tanah dan kedelai tetapi di sisi lainnya produksi perkapita mengalami penurunan sekitar 7% sehingga kenaikan produksi makanan tidak cukup pesat untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.¹ Selain itu, situasi yang belum stabil dalam negara Indonesia praktis turut serta menimbulkan gangguan keamanan yang tidak hanya mengganggu kerja para petani tetapi juga merusak jaringan distribusi hasil pertanian, mengacaukan pengolahan pertanian dan menghambat ekspor pertanian.

Indonesia yang mendapat julukan sebagai negara agraris karena 60% penduduknya tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor

¹*Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/1970-1973/1974* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1968), hlm. 11.

pertanian, untuk masalah pangan masih merupakan salah satu masalah yang harus diatasi bersama. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pemerintah Indonesia dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I yang dimulai tahun 1969 khususnya sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produksi tanaman pangan. Begitu juga dengan Pelita berikutnya.²

Permasalahan tanaman pangan di Indonesia yang muncul dan dampaknya juga sama terjadi di Kotamadya Surabaya, salah satunya terjadi pada bidang produksi.³ Produksi tanaman pangan selain tidak merata menurut tempat juga tidak merata menurut waktu, yang pada akhirnya menimbulkan kendala tambahan dalam struktur distribusi dan secara langsung berpengaruh terhadap harga yang bakal diterima petani maupun yang harus dibayar konsumen.

Kebijaksanaan pembelian beras, padi dan gabah dalam negeri dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah, penyediaan sarana penyangga yang cukup dan penyaluran ke pasaran umum yang lancar dengan harga-harga yang terkendalikan, senantiasa diusahakan agar tingkat harga yang terjadi di pasaran masih tetap berada dalam jangkauan daya beli rakyat banyak. Setiap tahun diadakan penyesuaian terhadap harga dasar tersebut dan sebagai pengimbangannya telah ditentukan harga batas tertinggi sehingga para konsumen tidak menanggung beban kenaikan harga

² Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 319 tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.

³ Bustanil Arifin, *Pangan dalam Orde Baru* (Jakarta: KOPINFO, 1994), hlm. 191.

beras yang berat yang setiap kali disesuaikan pula dengan perkembangan ekonomi yang terjadi.⁴

Ditinjau dari segi antar waktu, dengan dilepaskannya berbagai varietas unggul baru seperti PB 5 dan PB 8 pada tahun 1969 dan IR 26, 28 serta 30 pada tahun 1975 yang umumnya berumur pendek, telah merangsang para petani untuk menambah frekuensi penanaman padinya menjadi tiga kali pertahun atau setidaknya menjadi lima kali dalam dua tahun yang berurutan. Hal itu memang sangat beralasan, sebab umur padi-padi varietas baru tersebut hanya berkisar antara 115-125 hari saja sejak benih disebar di persemaian. Kemudian timbul satu masalah baru yang menyulitkan para petani karena dihadapkan pada suatu dilema dalam menentukan pola tanam padi sawahnya. Di satu sisi, jika mereka berpedoman pada pola tanam dua kali pertahun, sawah mereka mengalami masa kosong selama tidak kurang dari tiga bulan pertahunnya yang berarti suatu pemborosan. Di sisi lain, kalau para petani berani berspekulasi menanam padinya tiga kali pertahun, mereka menghadapi resiko kekeringan yang berarti terancam bahaya kegagalan panen dan hal tersebut membuat para petani mengalami kerugian jauh lebih besar.⁵

Produksi pertanian tanaman pangan khususnya produksi padi setiap tahun selalu berfluktuasi, dipengaruhi oleh kondisi cuaca, serangan hama dan penyakit tanaman, banjir, bencana alam, dan lain-lain. Di beberapa daerah khususnya di wilayah Kotamadya Surabaya seperti Kecamatan Tandes dan Karangpilang, banyak

⁴ Bambang Tri Cahyono, *Kebijakan Pertanian* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 8.

⁵ Totok Mardikanto, *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 3-4.

yang masih menggantungkan pengairannya dari air hujan. Penggunaan benih unggul bermutu sulit untuk ditentukan mengenai jumlah kebutuhan dan waktu penyediaannya. Hal seperti itu kiranya mudah dimaklumi karena para petani tidak mau mengambil resiko terlalu besar dari kegagalan panen karena iklim (kekeringan atau banjir) mengingat jenis-jenis unggul umumnya sangat peka terhadap masalah tersebut.⁶ Khusus mengenai hama wereng yang dianggap sebagai hama yang paling ditakuti para petani, keadaannya bukanlah semakin mereda tetapi semakin menggila dengan munculnya jenis-jenis baru. Untuk timbulnya jenis wereng baru cuma diperlukan empat musim tanam saja. Jadi, kalau para petani menambah frekuensi penanamannya menjadi tiga kali pertahun, dalam jangka tidak lebih dari satu setengah tahun saja sudah timbul jenis baru seperti wereng batang coklat.⁷

Produksi tanaman pangan di Indonesia umumnya berada di tangan jutaan petani kecil yang tersebar tidak merata dan mereka itu hanya mengusahakan lahan relatif sempit. Para petani kecil tersebut juga memiliki ciri utama: Pertama, termasuk golongan ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam permodalannya, tetapi juga lemah mengenai pengetahuan dan ketrampilannya, bahkan seringkali lemah pula dalam keinginan dan semangatnya untuk maju. Kedua, mereka itu umumnya menjadi lambat untuk menerima dan melaksanakan teknologi baru, bukan saja karena tidak memiliki cukup modal untuk dapat melaksanakannya melainkan mereka selalu dihantui oleh

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

perasaan takut mengalami kegagalan panen yang berarti malapetaka bagi diri mereka dan seluruh anggota keluarga mereka.⁸

Pada awal tahun 1969, dengan diperkenalkannya teknologi pertanian yang baru dan disertai dengan kebijakan intensifikasi dan diversifikasi di Kotamadya Surabaya, semakin memperlihatkan sistem pertanian yang mulai terencana dengan baik. Bibit unggul baru mulai diperkenalkan seperti PB 5 dan PB 8 pada tahun 1969 dan IR 26, 28 dan 30 pada tahun 1975 sehingga bisa memacu semangat para petani untuk lebih meningkatkan produksinya. Begitu juga dengan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida yang persediaannya cukup memadai dan otomatis sebagai faktor pendukung dalam keberhasilan produksi pertanian karena bisa memacu pertumbuhan tanaman dan meminimalisir serangan hama wereng. Pembangunan jaringan irigasi baru ataupun rehabilitasi waduk dan sungai semakin intensif dilakukan guna mengatasi masalah kekurangan air pada musim kemarau dan mengantisipasi masalah banjir pada musim penghujan. Kredit uang yang semakin mudah didapatkan oleh para petani diantaranya melalui program Bimas. Masalah modal yang selama itu selalu menjadi faktor penghambat utama bagi para petani sedikit banyak bisa teratasi. Kemudian penyuluhan pertanian sebagai guru yang harus dianut oleh para petani juga semakin gencar dilakukan. Program *tilik desa* secara kontinue dilakukan oleh pemerintah Kotamadya Surabaya. Demikian juga dengan dibukanya Pusat Informasi Pertanian di Wonocolo pada tahun 1970, bisa dijadikan sebagai kuliah terbuka oleh para petani yang ada di Kotamadya Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.

⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang penulisan yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa permasalahan pokok yang ingin penulis kemukakan dalam penulisan skripsi yang berjudul *Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Surabaya 1969-1979*. Beberapa kajian permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana keadaan umum pertanian tanaman pangan dan masyarakatnya di Kotamadya Surabaya serta apa saja kendala-kendala pokok yang timbul dalam pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya tahun 1969-1979?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Kotamadya Surabaya dalam pembangunan pertanian tanaman pangan tahun 1969-1979?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam penulisan sejarah mengenai *Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Surabaya 1969-1979* diperlukan suatu arahan batasan yang jelas. Untuk itu penulis berusaha mengkaji beberapa hal diantaranya sektor pertanian yang akan dibahas, batasan-batasan spasial serta temporalnya.

Sektor pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan. Di dalam penulisan ini, penulis lebih menitikberatkan pada pertanian tanaman pangan terutama tanaman padi sebagai fokus utama.

Selanjutnya, penulisan ini juga mengambil batasan spasial guna memberi kemudahan dalam proses pengkajian. Kotamadya Surabaya yang memiliki aktivitas

dominan pada sektor Indamardi (Industri, Perdagangan, Maritim dan Pendidikan) untuk sektor pertaniannya tetap mendapat perhatian sesuai dengan program pemerintah dalam pembangunan nasional. Hal itu disebabkan di Kotamadya Surabaya sendiri terdapat beberapa kecamatan yang potensial untuk melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi guna meningkatkan taraf hidup para petani pada khususnya dan masyarakat Surabaya pada umumnya. Selain itu masalah tanaman pangan secara tidak langsung berhubungan erat dengan penyediaan pangan yang cukup.⁹

Batasan temporal penulisan ini adalah tahun 1969-1979. Pengambilan tahun 1969 sebagai batasan awal penulisan didasarkan pada kebijakan pemerintah berupa Pembangunan Lima Tahun Pertama yang menitikberatkan pada sektor pertanian untuk menunjang ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitu juga halnya yang terjadi di Kotamadya Surabaya. Selain itu, pada tahun tersebut teknologi baru pertanian mulai diperkenalkan.

Tahun 1979 dijadikan batas akhir dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah telah menyelesaikan Pembangunan Lima Tahun Kedua.¹⁰ Dimana dampak kebijakan pertanian pada Pelita I dan II mulai terlihat dengan jelas. Selain itu, penulis juga ingin

⁹Lihat *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991), hlm. 171. *Intensifikasi* meliputi usaha peningkatan produktivitas sumber daya alam, penggunaan teknologi tepat guna dan pemanfaatan segala sarana produksi, seperti benih unggul, pestisida dan pupuk. *Ekstensifikasi* mencakup perluasan areal tanaman budi daya /lahan pertanian. *Diversifikasi* adalah usaha penganeekaragaman usaha tani. *Rehabilitasi* adalah pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.

¹⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79.

menggambarkan kondisi pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya yang dalam rentang satu dasawarsa telah memperlihatkan peningkatan produksi pangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Beberapa tujuan yang ingin penulis kemukakan dalam penulisan skripsi yang berjudul *Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Surabaya 1969-1979* adalah:

1. Menjelaskan secara umum gambaran pertanian tanaman pangan dan masyarakat pendukungnya serta kendala-kendala yang terjadi beserta faktor-faktor penghambat dalam hal peningkatan produksi pangan di Kotamadya Surabaya.
2. Menjelaskan pelaksanaan program kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh pemerintah kotamadya Surabaya dalam hal peningkatan produksi pangan.

Berdasarkan tujuan penulisan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai wacana baru di bidang kesejarahan tentang pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya di Kotamadya Surabaya. Selain itu, sampai sekarang masih sedikit sejarawan yang menulis tentang perkembangan dan pengaruh pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya.

E. Tinjauan Pustaka dan Sumber

Kedudukan suatu sumber dalam penulisan karya sejarah memang sangatlah vital. Beberapa buku yang dipakai oleh penulis banyak yang bersifat umum mengenai

sejarah pertanian karena sumber buku yang berhubungan langsung dengan pertanian tanaman pangan khususnya di Kotamadya Surabaya belum ada yang menulis.

Buku *Ekonomi Orde Baru* yang ditulis oleh Anne Booth berisi mengenai kebijaksanaan pangan pada awal masa Orde Baru yang ditekankan pada bidang produksi dan konsumsi beras. Dijelaskan juga bagaimana kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bidang pangan pada masa kolonial dan Orde Lama yang dari segi perencanaan, keahlian dan konsistensinya kurang baik jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Ditulis juga, pada satu dasawarsa tahun 1970-an produksi beras di Indonesia mengalami gejala yang fluktuatif dikarenakan beberapa masalah yang belum bisa dimaksimalkan misalnya kredit Bimas, bencana alam, hama dan sistem pemasaran.¹¹ Walaupun buku tersebut memberikan penjelasan yang mengarah ke pembangunan pertanian tanaman pangan tetapi daerah yang disebutkan bersifat umum. Buku ini juga tidak membahas bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani masalah petani gurem.

Buku *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia* yang ditulis oleh Leon A. Mears berisi mengenai perubahan situasi perberasan Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Kurun waktu yang ditulis sekitar akhir dasawarsa 1960-an sampai awal dasawarsa 1980-an. Di situ dijelaskan juga kebijakan pemerintah mengenai swasembada pangan yang sulit tercapai pada tahun 1970-an karena masih terus mengimpor beras dan dikemukakan pula saran-saran untuk kebijakan pangan pada

¹¹ Anne Booth, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1982)

tahun 1980-an.¹² Walaupun buku tersebut memberikan penjelasan yang mengarah ke pembangunan pertanian tanaman pangan tetapi daerah yang disebutkan bersifat umum. Buku ini juga tidak membahas secara mendalam tentang kebijakan dasar pertanian seperti kebijakan bidang pembenihan, pupuk, dan pestisida.

Buku selanjutnya adalah hasil karya dari Bustanil Arifin yang berjudul *Pangan dalam Orde Baru*. Buku tersebut menerangkan, bagaimana kinerja pemerintah dalam menghadapi masalah pembangunan pertanian di Indonesia khususnya dalam hal produksi dan konsumsi pangan disertai dengan berbagai alternatif kebijakan. Rentang waktu yang dibahas dimulai dari Pelita I sampai Pelita IV. Tambahan pula, di situ juga diceritakan produksi hasil pertanian untuk sebagian besar dilaksanakan oleh para petani kecil yang merupakan bagian terbesar dari penduduk dan lokasinya tersebar di seluruh daerah.¹³ Walaupun buku tersebut memberikan penjelasan yang mengarah ke pembangunan pertanian tanaman pangan tetapi daerah yang disebutkan bersifat umum. Buku tersebut juga tidak membahas bagaimana masalah petani gurem yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah pada saat itu.

Dari beberapa penjelasan literatur yang termuat di atas, penulis juga menggunakan beberapa sumber arsip seperti arsip kota, koran Surabaya Post serta wawancara dengan pihak Dinas Pemanfaatan Pangan.

¹² Leon A. Mears, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982)

¹³ Bustanil Arifin, *Pangan dalam Orde Baru* (Jakarta: KOPINFO, 1994)

F. Metode Penulisan

Metode dalam sebuah penulisan sejarah merupakan langkah operasional yang dilakukan oleh seorang penulis. Langkah pertama yang dilakukan dalam penulisan sejarah adalah heuristik, yaitu cara yang dilakukan untuk mencari sumber baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber-sumber primer didapat dari badan arsip kota, koran di perpustakaan Akademi Wartawan Surabaya (AWS) serta data-data dari Dinas Pemantapan Pangan Kotamadya Surabaya dan Jawa Timur. Sumber-sumber sekunder didapat dari berbagai macam perpustakaan seperti Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Perpustakaan Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Surabaya.

Langkah kedua adalah kritik sumber yaitu cara yang dilakukan untuk mengetahui sumber yang kita gunakan kredibel dan otentik. Dimana kritik sumber baik primer maupun sekunder dilakukan dengan dua cara yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan dengan tujuan melihat keaslian dari sumber yang ada melalui keadaan kertas, bahasa, huruf, tinta, dll. Kemudian kritik intern dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dan otentisitas sumber yang diperoleh tersebut. Penulis melakukan kritik intern dengan membandingkan isi dokumen dan wawancara saksi sejaman yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah ketiga adalah interpretasi yaitu cara yang dilakukan untuk menganalisis sumber dengan menggunakan pendekatan. Sumber yang sudah ada mulai dianalisis agar hipotesa yang diperoleh dari berbagai sumber bisa disajikan dalam sebuah bentuk tulisan. Penganalisaan hipotesa bisa dilakukan dengan cara penafsiran atau penterjemahan data dengan menggunakan pendekatan. Di dalam

penulisan tersebut pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan ilmu sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan pembangunan pertanian tanaman pangan.

Langkah keempat adalah historiografi yaitu cara yang dilakukan untuk menyajikan ke dalam sebuah bentuk tulisan yang sistematis. Semua data dan informasi yang telah diproses itu dituangkan kembali melalui sebuah penulisan dan disusun secara sistematis tanpa menghilangkan penyajian secara obyektif dan kronologis.¹⁴

G. Kerangka Konseptual

Penulisan dengan judul *Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Surabaya 1969-1979* memunculkan konsep tentang pembangunan pertanian dan definisi tanaman pangan.

Konsep pembangunan pertanian menurut A.T.Mosher adalah proses untuk menghasilkan dan mengusahakan suatu produk melalui kegiatan penggarapan tanah untuk tanaman budidaya, mulai dari penanaman sampai pemeliharaan, pemungutan hasil dan pengolahan pascapanen. Kegiatan tersebut terus dibina dan ditingkatkan baik melalui penerapan teknologi usaha tani serta pendidikan dan penyuluhan.¹⁵

¹⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10-15.

¹⁵ Bambang Tri Cahyono, *Masalah Petani Gurem* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 18.

Definisi tanaman pangan menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia adalah tanaman konsumsi yang terdiri dari padi sebagai tanaman utama kemudian palawija yang terdiri dari kedelai, jagung, ubi kayu dan kacang hijau.¹⁶

Dari konsep pembangunan pertanian di atas kemudian diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial ekonomi yang diharapkan muncul sebuah kajian yang menghasilkan suatu gambaran dan juga sebuah hubungan antara pembangunan pertanian dengan tanaman pangan disertai kondisi sosial masyarakat dalam hal penyediaan pangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul *Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Surabaya 1969-1979* adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah Penulisan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka dan Sumber, Metode Penulisan, Kerangka Konsep Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang keadaan atau gambaran secara umum pertanian tanaman pangan di kotamadya surabaya beserta masyarakat pendukungnya sebelum tahun 1969. Bagaimana kondisi fisik pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya disertai beberapa faktor penunjangnya yang membuat kotamadya Surabaya dapat

¹⁶ Departemen Pertanian RI, *Peta Agroekologi Utama Tanaman Pangan di Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1990), hlm. 10. Lihat juga Sjamsoed'oeed Sadjad, *Kamus Pertanian* (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 123.

melaksanakan program pembangunan nasional dalam hal peningkatan produksi pangan.

Bab III berisi tentang kendala-kendala yang timbul dalam pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya, termasuk di dalamnya termuat kendala kondisi alam, pembuangan limbah industri dan kendala lingkungan fisik serta sosial.

Bab IV berisi tentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kotamadya Surabaya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian tanaman pangan dan di dalamnya akan dilaksanakan empat usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

Bab V berisi kesimpulan dari penulisan yang dilakukan serta merupakan jawaban ringkas dari apa yang ditanyakan di rumusan masalah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN

PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Kotamadya Surabaya

Berbicara mengenai pembangunan di Kotamadya Surabaya pasti tidak terlepas dari masalah kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakatnya. Penduduk yang selalu bertambah membuat wilayah Kotamadya Surabaya untuk selalu mengembangkan setiap usahanya.

Kotamadya Surabaya adalah ibukota sekaligus pusat pemerintahan propinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kotamadya Surabaya di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, di barat berbatasan dengan Gresik, di sebelah selatan berbatasan dengan Sidoarjo.¹

Pemerintah Kota Surabaya berdiri sejak 1 April 1906 dengan dasar pasal 1 instelling ordonantie, staatsblad 1906 No. 149. Saat itu Kepala Daerah Gemeente Surabaya semula dirangkap oleh seorang Asisten Residen yang merangkap Asisten Residen untuk Kabupaten Surabaya. Pada waktu itu belum ada jabatan *Burgermeester*/Walikota.

Pada tahun 1913, jumlah penduduk Gemeente Surabaya mencapai 133.632 orang dengan perincian; Eropa mencapai 8.063 orang, Cina mencapai 16.685 orang,

¹ Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan* (Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980), hlm. 20. Lihat juga *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983), hlm. 421.

Indonesia mencapai 105.817 orang, Arab mencapai 2.693 orang dan Timur Asing lainnya mencapai 374 orang. Pada tahun 1931, jumlah penduduk bertambah menjadi 260.000 orang.

Pada tahun 1942, tentara Jepang memasuki Kota Surabaya. Suasana Eropa mulai menghilang karena banyak orang Belanda ditawan. Pemerintahan Kota Surabaya kemudian dikuasai oleh tentara Jepang. Peristiwa jatuhnya bom atom pertama kali di Hiroshima dan Nagasaki pada 14 Agustus 1945 kemudian mengakhiri kekuasaan dan suasana Jepang di Kota Surabaya. Pemerintahan Kota Surabaya selanjutnya dikuasai oleh tentara Sekutu dan Kolonial Belanda. Setelah pemulihan kedaulatan tahun 1950, dengan dikeluarkannya UU no.16 tahun 1950 pemerintahan Kota Surabaya mengalami perubahan nama menjadi Kota Besar Surabaya.² Undang-undang tersebut memberi kewenangan pada kota-kota besar untuk mengatur daerahnya sendiri. Wilayah administrasi Kota Besar Surabaya saat itu terdiri atas 1 *Kawedanan* dan 6 *Kaonderan* yaitu Nyamplungan, Krembangan, Kapasan, Kranggan, Ketabang dan Kupang. Luas wilayah keseluruhan adalah 67,20 km² dengan jumlah penduduk 639.485 orang.³ Sejak awal tahun 1950, penduduk di Kota Besar Surabaya semakin meningkat jumlahnya terutama karena datangnya orang-orang dari desa di luar Kota Besar Surabaya. Mereka itu umumnya terdiri dari golongan ekonomi lemah karena di desa sulit mendapat pekerjaan sehingga mereka pindah ke kota. Gejala

² Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, *ibid.*, hlm. 28.

³ Departemen Penerangan RI, *Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Tahun 1963*, hlm. 132.

tersebut kemudian menyebabkan Kota Surabaya menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan rakyat dan pemakaian tanah secara liar.

Kota Besar Surabaya kemudian berubah menjadi Kotapraja Surabaya dengan berlakunya UU No.1 tahun 1957. Wilayah administrasinya terdiri atas tiga *Kawedanan* dan 11 *Kaonderan* yaitu *Kawedanan* Surabaya Barat dengan empat *Kaonderan* meliputi Krembangan, Semampir, Pabean Cantian dan Bubutan; *Kawedanan* Surabaya Timur dengan tiga *Kaonderan* meliputi Simokerto, Tambaksari dan Gubeng; dan *Kawedanan* Surabaya Selatan dengan empat *Kaonderan* meliputi Genteng, Tegalsari, Sawahan dan Wonokromo.⁴ Satu peristiwa yang patut dicatat dan berhubungan dengan wilayah Kotapraja Surabaya pada waktu itu adalah berlangsungnya UU No.2 tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dengan menambah lima Kecamatan dari Kabupaten Surabaya. Kelima Kecamatan itu ialah Kecamatan Wonocolo, Sukolilo, Karangpilang, Tandes dan Rungkut. Luas lima Kecamatan baru itu mencapai 224,78 km² sehingga dengan perubahan tersebut luas wilayah Kotapraja Surabaya saat itu menjadi 291,78 km².

Adanya penambahan lima Kecamatan baru dan dihapusnya Kawedanan berdasarkan Peraturan Presiden No.22 tahun 1963 serta berlakunya UU No.18 tahun 1965, sebutan Kotapraja Surabaya kemudian diubah menjadi Kotamadya Surabaya. Wilayah administrasinya terdiri dari tiga Wilayah Pembantu Walikotamadya dan 16 Kecamatan yaitu Wilayah Pembantu Walikotamadya Surabaya Selatan meliputi Karangpilang, Wonocolo, Genteng, Wonokromo, Tegalsari dan Sawahan; Wilayah Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur meliputi Rungkut, Gubeng, Sukolilo,

⁴ Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, *op.cit.*, hlm. 35.

Tambaksari dan Simokerto; dan Wilayah Pembantu Walikotamadya Surabaya Utara meliputi Pabean Cantian, Tandes, Bubutan, Krembangan dan Semampir.⁵

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kotamadya Surabaya mulai menampakkan gejala positif ketika memasuki periode Orde Baru. Salah satu contoh perwujudannya adalah pelaksanaan program pembangunan yang meliputi pendidikan, pangan dan perhubungan. Dari sektor pendidikan mulai diintensifikannya pendidikan mental/spritual, pendidikan keagamaan, pendidikan umum di sekolah, pendidikan non formal di luar sekolah yang sifatnya ketrampilan maupun berupa penerangan-penerangan untuk membawa masyarakat Kota Surabaya bergairah dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dari sektor pangan mulai diintensifikannya usaha peningkatan produksi pangan melalui Bimas, Panca Usaha Pertanian, perbaikan serta pembangunan prasarana produksi seperti waduk dan saluran irigasi. Dari sektor perhubungan mulai diintensifikannya perbaikan dan pembangunan prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, dll. Untuk mengatasi tekanan penduduk, kegiatan-kegiatan perindustrian tahap demi tahap mulai dikembangkan dan diadakan pula kegiatan program Keluarga Berencana. Selain itu usaha-usaha pembangunan desa mulai diperhatikan terutama di bidang pertanian sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Meskipun Kotamadya Surabaya memiliki aktivitas yang paling dominan pada sektor Indamardi, namun untuk Lima Kecamatan (Karangpilang, Wonocolo, Tandes, Sukolilo dan Rungkut) dapat diadakan intensifikasi dan diversifikasi di bidang pertanian tanaman pangan guna meningkatkan tingkat hidup penduduk taninya.

⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

Program yang dibuat antara lain menaikkan produksi padi melalui Bimas dan Inmas, membuat kebun bibit di tiap Kecamatan, membuat kebun buah-buahan, menyebarkan tanaman industri Jarak dan Jambu Mente serta mempertinggi teknik/teknologi pertanian rakyat dengan penyuluhan.

B. Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Surabaya Sebelum 1969.

1. Ketidakstabilan Perencanaan Pertanian.

Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang dapat diandalkan sektor pertaniannya, tentunya memiliki beban yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat seluruh Indonesia.

Pada tahun 1952 daerah Jatim adalah daerah yang paling banyak menyalurkan bibit unggul jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hasil-hasil yang memuaskan juga terlihat dari cara-cara bekerja yang digunakan oleh para petani di Jawa Timur.⁶

Akhir tahun 1952 seluruh Jawa Timur mempunyai daerah sawah kira-kira 1.132.000 ha dan terdapat 39 buah balai bibit yang menyelenggarakan sawah seluas 324 ha dan tanah tegalan seluas 22 ha, sehingga diperoleh jumlah hasil padi (kw) dari balai-balai bibit daerah Jawa Timur sebagai berikut:

⁶ Pekerjaan di kebun tidak lagi diserahkan kepada orang lain melainkan seluruhnya dikerjakan oleh Jawatan Pertanian Rakyat (Dinas Pertanian Rakyat) sendiri sehingga dapat diharapkan hasil yang sebaik-baiknya. Kecuali pada beberapa tempat, umumnya bibit padi yang ditanam tidak lebih dari 12 jenis, bahkan sudah banyak kebun bibit yang menanam satu jenis saja. Penanaman sudah mulai dilakukan di kebun-kebun bibit walaupun baru seluas 0,6-1 ha untuk mempermudah masa seleksi. Perhatian terhadap padi jenis Bengawan sangat baik sehingga penyaluran bibit dengan mudah dijalankan oleh para penyalur-penyahur bibit. Departemen Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 273.

Tabel 1
Jumlah Hasil Padi Balai-Balai Bibit
di Daerah Jawa Timur Tahun 1952 (kw)

Karesidenan	Banyaknya Balai Bibit	jenis	Untuk Bibit	Untuk Konsumsi	Jumlah
Surabaya	6	Bengawan, Genjah Beton, Andelsiem	504,03	78,87	582,90
Bojonegoro	7	Bengawan, Cina	237,56	90,15	327,71
Madiun	4	Genjah Beton, Andelsiem, Bengawan	373,75	93,28	467,03
Kediri	5	Bengawan, S.K.K. Cahaya	343,22	146,94	460,16
Malang	6	Bengawan	291,17	212,91	504,08
Madura	4	Bengawan, Mas	309,12	25,60	334,72
Besuki	7	Bengawan, Gropakgede	603,21	149,79	753
Jumlah	39		2.662,06	797,54	3.459,60

Sumber: Departemen Penerangan RI, Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Tahun 1963, hlm. 273.
⁷

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui, bahwa para petani di Jawa Timur lebih banyak menggunakan jenis padi Bengawan karena jenis tersebut memiliki keunggulan yaitu umurnya yang pendek dan rasanya enak. Padi jenis Bengawan tersebut dalam perkembangannya menyebar mulai dari daerah Madiun hingga ke Banyuwangi. Sedikit tambahan, bahwa semua bibit padi tersebut masih merupakan galur murni atau bibit yang dihasilkan tanpa persilangan.

Penyaluran bibit unggul di Jawa Timur untuk sebagian besar masih dilakukan dengan jalan menjual langsung kepada para petani. Pemerintah dalam hal ini Jawatan

⁷ Karesidenan Surabaya saat itu terdiri dari Kota Besar Surabaya, Mojokerto serta Kabupaten Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. *Ibid.*, hlm. 132.

Pertanian Rakyat (Dinas Pertanian Rakyat) seharusnya cukup selektif untuk menyalurkan dan mendistribusikan bibit tersebut yang bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian yang sering diterima para petani kecil. Pada intinya petani-petani tersebut (petani sedang dan petani kecil) boleh dikatakan menduduki posisi rendah dalam masyarakat. Kebudayaan yang bercirikan tradisional begitu khas serta kebanyakan yang hidup dari mengolah tanah saja, menempatkan mereka sebagai petani lapisan bawah dibandingkan dengan petani kaya/tuan tanah (petani lapisan atas) yang menunjukkan sejumlah ciri serba lebih dalam kemampuan menafsirkan keberhasilan, kegairahan menguasai masa depan dan dalam partisipasi sosial.

Pembangunan masyarakat desa melalui program bantuan perbaikan desa adalah sebuah contoh kasus yang dijumpai ketika perilaku pemimpin setempat (elite pertanian) dinilai kurang adil dalam membagi bantuan dari pemerintah pusat pada para petani miskin. Sebagai penganyom atau fasilitator, mereka lebih sering mencari keuntungan demi dirinya sendiri dan kelompok tertentu. Kehidupan agraris saat itu dapat diindikasikan bahwa suatu modal dan komersialisasi dibuat sebagai landasan untuk mengatur hubungan produksi di suatu desa.⁸

Hubungan antara petani kaya dan petani gurem di dalamnya selalu terdapat kesenjangan. Meskipun para petani gurem tahu apa saja penyebab perkembangan yang terjadi di daerahnya, tetapi mereka selalu saja dirugikan. Satu hal yang pasti, sikap dan perilaku petani kaya sebagai penyebab kerugian petani gurem adalah menunjuk ke dasar moral yang merupakan sebagian dari moral masyarakat petani yang telah dilanggarnya.

⁸ James.C.Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm, 4.

Sebagai contoh, pada tahun 1959 di wilayah Surabaya (Kotamadya dan Kabupaten) pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang ketentuan pembelian padi yang pada tiap-tiap tahunnya menjadi kewajiban para petani. Kebijakan tersebut cukup memberatkan petani miskin dan petani sedang karena hal itu dapat dilihat dari sistem pelaksanaan dan penyaluran uang pembelian padi yang hanya dibebankan kepada petani sedang dan petani miskin yang dilakukan oleh para tengkulak dan pejabat desa yang berkuasa. Sistem feodal yang cukup kental mengakibatkan beban penderitaan yang dipikul oleh para petani gurem semakin berat, ditambah lagi dengan alat-alat dan pembiayaan yang serba minimal membuat hasil panen kurang memuaskan dan mungkin hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan saja.⁹

Bagi para petani penggarap, menghindari biaya serta kebutuhan alat-alat penggarap dirasakan sebagai musim paceklik karena mereka terpaksa meminjam uang kepada tuan tanah dan lintah darat (rentenir) tetapi mereka memiliki keyakinan, semakin cepat mereka mendapatkan pinjaman atau kredit maka padi yang mereka panen hasilnya bisa maksimal atau dalam kalimat lain dapat diistilahkan “kalau waktu mengurangi hasil panen”.

Tetapi pinjaman dari tuan tanah dan rentenir akan berakibat pada waktu panen. Para petani tidak bisa menikmati secara penuh hasil keringatnya sendiri, karena pinjaman dengan bunga yang tidak ringan, secara tidak langsung mengurangi

⁹ Arsip Kota Surabaya No.107/I/59, *Pernyataan tentang Pembelian Padi Pemerintah* (Box.2105, No.24.048)

hasil panen para petani penggarap yang otomatis semakin menambah beban penderitaan hidupnya.

Akibat kerugian yang diderita para petani, maka pada tanggal 13-15 September 1959 Barisan Tani Indonesia (BTI) cabang Surabaya melalui konferensi yang mewakili 64.320 anggotanya mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib para petani kecil dengan memberikan keputusan-keputusan diantaranya: Pertama, mendesak kepada pemerintah untuk segera merealisasikan UU Bank Tani dan Nelayan yang sesuai dengan kebutuhan para petani secara mudah, panjang waktunya dan ringan bunganya. Kedua, mendesak kepada pemerintah untuk memperbaiki/memberikan alat-alat pertanian, bibit, rabuk dan semua yang dibutuhkan secara lebih sempurna kepada para petani terutama petani miskin dan petani sedang. Ketiga, jatah pembelian padi pemerintah pertama-tama supaya diwajibkan kepada tuan tanah dan petani kaya sedangkan petani sedang dan petani miskin secara sukarela. Keempat, diadakan pengawasan atau kontrol yang keras terhadap penyelewengan-penyelewengan dengan diberantasnya sistem tengkulak yang merugikan. Kelima, sebagian dari hasil pembelian padi tersebut supaya ditinggalkan di desa, untuk dijual atau dipinjamkan kepada rakyat kembali pada waktu musim paceklik atau waktu penggarapan tanah sawahnya.¹⁰

Pemerintah Kotamadya Surabaya kemudian melaksanakan suatu kegiatan yang bernama Komando Operasi Gerakan Makmur yang di dalamnya terdiri dari kebijaksanaan kemudahan pemberian kredit, bantuan operasional seperti sarana

¹⁰ Arsip Kota Surabaya No.111/1/59, *Resolusi: tentang kredit dan bantuan alat-alat pertanian bagi kaum tani* (Box.2105, No.57.733)

produksi bibit, pupuk dan pestisida serta menerjunkan petugas-petugas untuk mengawasi penyaluran bibit padi sehingga tidak ada suatu spekulasi yang diterima oleh para petani kecil tersebut. Sebagai langkah awal untuk memudahkan para petani kecil mendapatkan bibit pada musim tanam, Dinas Pertanian Rakyat menganjurkan kepada tiap-tiap desa untuk mendirikan lumbung-lumbung bibit. Lumbung bibit tersebut digunakan untuk menyimpan bibit murni yang diperoleh dari sawah-sawah desa. Benih dari lumbung desa tersebut dapat dikeluarkan pada tiap-tiap musim tanam dan menurut kebiasaan di masing-masing desa, dapat dijual atau dipinjamkan kepada petani dengan syarat bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada waktu panen dengan tambahan beberapa persen.¹¹ Hal itu cukup membantu para petani kecil sehingga dapat menunjang aktivitas produksi pertanian mereka dan yang paling penting bisa menghidupi seluruh anggota keluarga mereka.

Pembangunan pertanian tanaman pangan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan zaman, mensejahterakan masyarakat petani serta mampu menyediakan kebutuhan pangan sesuai dengan permintaan. Hal tersebut merupakan langkah yang strategis untuk dapat diwujudkan dan dilaksanakan sehingga sasaran dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memacu pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) baik saat produksi, pencapaian, pengolahan serta pemasaran dapat tercapai.¹²

¹¹ Departemen Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 273.

¹² Soemitro Arintadisastra, *Kebijaksanaan dan Strategi: Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura* (Jakarta: Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1997), hlm. 2.

Penyelenggaraan Pekan Pertanian di Kotamadya Surabaya adalah suatu langkah strategis yang perlu dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan para petani agar mampu berperan serta dalam setiap proses pembangunan. Kegiatan yang bersifat nasional tersebut berlangsung pada tanggal 19-26 Mei 1963 dan dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif terutama dalam pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan.

Berbagai acara banyak ditampilkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Surabaya, diantaranya dibuka stan pameran pertanian yang berisi model-model atau konsep tentang pelaksanaan kegiatan bertani, foto-foto pertanian ataupun praktek-praktek usaha tani yang meliputi proses penyebarluasan hasil-hasil penelitian.¹³ Kegiatan tersebut bertujuan agar komunikasi bisa terbangun, baik hal-hal yang diterapkan oleh petani maupun di dalam proses penyampaian umpan balik dan pemecahan masalah yang dihadapi petani setelah mencoba, menguji dan melaksanakan hasil-hasil penelitian yang disampaikan tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam setiap kegiatan yang berlangsung diharapkan timbul suatu *follow up* melalui pengenalan informasi baru sehingga memberikan sikap progresif untuk memiliki pengetahuan pertanian serta terampil dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha tani.

Pada akhir pemerintahan Orde Lama, perkembangan pertanian khususnya tanaman pangan di Kotamadya Surabaya menuju ke arah tren yang positif. Teknologi

¹³ Arsip Kota Surabaya No.P.187/BEP/1963, *Penyelenggaraan Pekan Pertanian di Surabaya* (Box.1.156, No.24.048)

yang semakin berkembang dan diikuti oleh perencanaan serta keahlian yang baik membuat produksi pertanian tanaman pangan menjadi lebih konsisten.

2. Kerangka Modernisasi Pertanian

Periode Orde Baru yang berlangsung mulai tahun 1966 menunjukkan adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang baik bagi pertanian Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan cara-cara pembudidayaan padi dengan skala prioritas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.¹⁴ Sistem Demas (Demonstrasi Massal) yang diperkenalkan sejak tahun 1953-1963/1964 dirasa belum dapat berjalan secara mulus karena masalah pendanaan dan juga faktor ekonomi yang sulit pada masa itu. Memasuki tahun 1965/1966 Demas berubah menjadi Bimas (Bimbingan Massal).¹⁵ Konsep Bimas tersebut dapat diartikan sebagai usaha terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian, penyediaan sarana produksi, kredit dan jaminan pemasaran. Semua itu pada dasarnya untuk menumbuhkan gerakan massal, mendorong partisipasi para petani dalam menerapkan sistem usaha tani secara intensif.¹⁶

Surabaya (baik itu Kabupaten atau Kotamadya) dalam hal tersebut juga turut serta mensukseskan pembangunan pertanian yang ada di daerahnya masing-masing.

¹⁴ Anne Booth, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 29.

¹⁵ Sjamsoed'oed Sadjad, *Kamus Pertanian* (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 16. *Bimas* adalah suatu gerakan membimbing para petani secara massal dengan target mempertinggi produksi melalui teknologi yang dibimbingkan. Cirinya dengan memberikan kredit pada petani sehingga petani mampu melaksanakan hal yang dibimbingkan. Misal pengolahan tanah secara intensif, menggunakan benih varietas unggul, pemupukan sesuai dosis yang dianjurkan, pengendalian hama dan pengaturan air secara baik (Panca Usaha Tani). *Inmas* adalah petani melaksanakan Panca Usaha peningkatan produksi padi sawah atas inisiatif dan kemampuan sendiri, tanpa mendapat kredit.

¹⁶ Bustanil Arifin, *Pangan dalam Orde Baru* (Jakarta: KOPINFO, 1994), hlm. 203.

Luas total areal Bimas Gadu Tahun 1966 Kabupaten dan Kotamadya Surabaya adalah 1.271 ha. Hal tersebut dapat diperinci melalui data-data berikut dibawah ini:

Tabel 2
Kredit Bimas Gadu Kabupaten dan Kotamadya Surabaya tahun 1966

No	Kecamatan	Desa	Realisasi Kredit (Rp)	Jumlah Kredit (Rp)
1	Duduk Sampeyan	Tebaloan	3.500	11.000
		Samirplapan	7.500	
2	Wringinanom	Sumberame	5.500	5.500
3	Kebomas	Dahanrejo	2.000	2.000
4	Sukolilo	Manyar Sabrangan	4.000	45.500
		Klampis Ngasem	10.000	
		Medokan Semampir	3.500	
		Gebang Putih	3.500	
		Nginden Jangkungan	4.500	
		Semolowaru	10.000	
		Menur Pumpungan	10.000	
5	Wonocolo	Kebonsari	7.500	19.000
		Jambangan	5.000	
		Margorejo	6.500	
6	Rungkut	Kedung Baruk	7.000	49.750
		Rungkut Kidul	6.000	
		Tenggilis	5.500	
		Panjangjiwo	5.000	
		Rungkut Tengah	8.500	
		Prapen	4.250	
		Kalirungkut	13.500	
Total Kredit				132.750

Sumber: Arsip Kota Surabaya No.782/IX/1966, *Ketentuan Perjanjian Kredit Bimas Gadu* (Box.1.556, No.34.890)

Wilayah Kabupaten Surabaya untuk program Bimas Gadu tahun 1966 meliputi Kecamatan Duduk Sampeyan, Wringinanom dan Kebomas sedangkan wilayah Kotamadya Surabaya meliputi Kecamatan Sukolilo, Wonocolo dan Rungkut. Di dalam pelaksanaan program Bimas Gadu tahun 1966, Kabupaten dan Kotamadya Surabaya menerima kredit dari Pemerintah Propinsi Jatim sebesar Rp 317.750 (untuk sementara masih digunakan sebesar Rp 132.750). Dari laporan yang diterima dari

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Surabaya, masih terdapat beberapa kekurangan dana terutama untuk pembelian bibit dan biaya penggarapan. Untuk bibit membutuhkan dana sebesar Rp 63.550 dan penggarapan membutuhkan dana sebesar Rp 358.422. Total keseluruhan untuk biaya yang harus diberikan Pemerintah Propinsi Jatim saat itu masih kurang Rp 104.222 (Rp 421.972 dari biaya bibit dan penggarapan dikurangi Rp 317.750 saat penerimaan awal). Biaya tersebut secepatnya akan diberikan melalui Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Surabaya.¹⁷

Akibat kebutuhan para petani yang sangat mendesak dan juga untuk pemberantasan hama terutama tikus, mereka juga mengajukan kepada Pemerintah Propinsi Jatim untuk dapat diberikan Zink Phosphid untuk tiap hektar kira-kira 0,1 kg. Jadi total keseluruhan untuk lahan seluas 1.271 ha dibutuhkan Zink Phosphid 127,1 kg. Di dalam perkembangannya, Pemerintah Propinsi Jatim melalui Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Surabaya kemudian memenuhi permintaan dari para petani, karena hal tersebut memang berada dalam satu paket program Bimas diantaranya yaitu biaya penggarapan dan kebutuhan sarana produksi benih, pupuk dan pestisida.

Keberhasilan program Bimas Gadu 1966 membawa dampak yang cukup baik terutama di Kotamadya Surabaya untuk pelaksanaan program Bimas Gadu tahun-tahun selanjutnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan keberhasilan program Bimas Gadu Teladan tahun 1967 yang diikuti oleh tiga Kecamatan diantaranya Wonocolo, Rungkut dan Sukolilo. Mengambil lahan seluas 500 ha, Wonocolo saat itu mendapat

¹⁷ Arsip Kota Surabaya No.782/IX/1966, *Ketentuan Perjanjian Kredit Bimas Gadu* (Box.1.556, No.34.890)

kredit sebesar Rp 208.100 (90 ha), Rungkut menerima Rp 444.655 (225 ha) dan Sukolilo menerima Rp 337.800 (185 ha).¹⁸ Sama dengan program Bimas gadu tahun sebelumnya, hal tersebut cukup membawa peningkatan produksi pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya.

Khusus untuk Kecamatan Rungkut, dalam pelaksanaan program Bimas Gadu 1967 mengalami sedikit hambatan dikarenakan telah terjadi peristiwa penyelewengan pupuk Bimas oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian Kecamatan Rungkut pada tanggal 5 september 1967 sebanyak 12,5 ton. Kejadian tersebut menyebabkan empat desa telah dirugikan dan tanahnya seluas 125 ha terpaksa tidak jadi dibimaskan. Adapun empat desa yang seharusnya menerima pupuk urea tersebut adalah Desa Kalirungkut sebanyak empat ton, Desa Tenggilis sebanyak tiga ton, Desa Gununganyar sebanyak tiga ton dan Desa Prapen sebanyak dua setengah ton. Oknum pegawai Dinas Pertanian Kecamatan Rungkut tersebut sebenarnya diberikan suatu kesempatan selama 15 hari yaitu sampai tanggal 20 September 1967 untuk mengembalikan pupuk yang telah diselewangkan itu tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik. Berhubung dengan adanya penyelewengan pupuk di daerah Kecamatan Rungkut maka jatah Bimas Gadu Teladan tahun 1967 untuk Kotamadya Surabaya berkurang menjadi 375 ha.¹⁹ Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi, Walikota Surabaya menghimbau kepada Dinas Pertanian Rakyat beserta semua warga yang terlibat dalam sektor pertanian tanaman pangan untuk tahun-tahun

¹⁸ Arsip Kota Surabaya No.0020/Bimas/1968, *Laporan Bimas Kotamadya Surabaya* (Box.1.744, No.42.340)

¹⁹ Arsip Kota Surabaya No.0400/362/1967, *Penyelewengan Pupuk Bimas oleh Pegawai Pertanian Kecamatan Rungkut* (Box.1391, No.30.170)

selanjutnya lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana produksi baik itu benih, pupuk dan pestisida.

Partisipasi untuk ikut serta dalam mensukseskan hasil produksi padi tahun penggarapan 1967/1968 juga disambut baik oleh salah satu Ormas Islam yang ada di Kotamadya Surabaya yaitu NU (Nahdlatul Ulama). Di dalam bentuk suatu organisasi yang menamakan dirinya PERTANU (Pertanian Nahdlatul Ulama), mereka berharap walikota Surabaya memperhatikan jeritan rakyat petani mengenai pembelian bibit jenis unggul dan pupuk serta berkenan untuk mengusahakan:

1. Bibit padi jenis unggul untuk para petani dalam daerah Kotamadya Surabaya yang cukup merata.
2. Menyalurkan pupuk secara langsung kepada para petani dengan harga jauh lebih rendah dari pasaran bebas.
3. Mengadakan pengawasan atau pengamanan pelaksanaan penyalurannya sehingga tidak menjadi bahan perdagangan spekulasi.²⁰

Pemerintah Kotamadya Surabaya kemudian mengambil suatu tindakan dengan mengakomodir penyaluran dan pendistribusian bibit, pupuk dan pestisida secara langsung sehingga sampai ke tangan para petani khususnya para petani kecil. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah pengawasan penyaluran sarana produksi, hal tersebut semakin diperketat agar penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab bisa dihindari.

Pada waktu pelaksanaan Bimas Gadu tahun 1968 di Kotamadya Surabaya terlihat agak berbeda dari Bimas-Bimas sebelumnya, dimana saat itu telah diperkenalkan suatu varietas baru yaitu PB 5 dan PB 8 yang sekaligus menandai dimulainya Bimas Baru. Kecamatan Rungkut sebagai salah satu dari lima kecamatan

²⁰ Arsip Kota Surabaya No. 012/Pert/XI/1967, *Pembelian Bibit Unggul dan Penyaluran Pupuk* (Box.2.435, No.74.913)

yang ditetapkan oleh Walikota Surabaya menjadi daerah pertanian pada tahun 1968 menaruh perhatian dalam perluasan penambahan produksi pangan khususnya terhadap PB 5 dan PB 8. Oleh karena itu, agar para petani di Kecamatan Rungkut dalam penggarapan sawahnya bisa bekerja secara efisien selain diadakan Bimas juga diadakan percobaan pengolahan tanah dengan menggunakan traktor.

Pada Musim Gadu tahun 1968 untuk Desa-Desa di Kecamatan Rungkut yang mengambil bagian dalam penanaman PB 5 dan PB 8 adalah Kutisari seluas 30 ha, Gununganyar 1,5 ha (percobaan), Tenggilis seluas 1,5 ha (percobaan). Di dalam perkembangannya, hasil pelaksanaan pembimasan Kutisari seluas 30 ha mengalami kegagalan karena serangan hama putih, tikus dan genangan air. Di samping itu para petani juga tidak memenuhi petunjuk dan syarat-syarat teknis pertanian, serta bibit PB 5 dan PB 8 yang merupakan padi jenis baru masih belum dikenal oleh masyarakat yang mempunyai pandangan acuh tak acuh dan kurang menarik perhatian mereka.²¹ Pemerintah Kotamadya Surabaya dalam menangani masalah tersebut kemudian mengadakan suatu penyuluhan dan menghimbau kepada para petani agar dalam pelaksanaan penanaman padi selanjutnya bisa bekerjasama dan mengikuti aturan teknis yang sudah ditetapkan oleh para penyuluh dari Dinas Pertanian Kotamadya Surabaya, sehingga bisa menghasilkan produksi padi secara maksimal. Hal tersebut memang tidak secara langsung dipahami oleh para petani tetapi dalam perkembangannya mereka bisa menerima apa yang diajarkan oleh penyuluh seiring dengan masuknya teknologi dan perencanaan yang baik di bidang pertanian.

²¹ Arsip Kota Surabaya No. 0020/Bimas/1968, *Laporan Bimas Kotamadya Surabaya* (Box.1.744, No.42.340)

Berdasarkan hal-hal yang termuat di atas, secara garis besar dapat diambil benang merahnya bahwa sifat-sifat pembangunan pertanian tanaman pangan pada awal tahun 1950-an di Kotamadya Surabaya didominasi oleh usaha tani yang tradisional dan pertumbuhan pertanian yang rendah serta tekanan dari para petani gurem akhirnya tampak secara politis dalam tahun-tahun terakhir periode tersebut.

Tahap permulaan konsolidasi ekonomi dan politik Orde Baru dari tahun 1966-1968 telah memperkenalkan varietas padi unggul yang baik dan program penggalakan produksi yang dimulai dengan Bimas untuk mengintensifkan budidaya padi. Tahun 1969 telah terjadi banyak kemajuan dalam kebijaksanaan pengembangan pertanian. Pertama, digalakkannya kerjasama dengan perusahaan produsen sarana produksi pertanian asing untuk mempromosikan Bimas. Kedua, tahun 1969 merupakan tahun pertama periode Pembangunan Lima Tahun yang berasaskan program stabilisasi dan pertumbuhan.²²

²² Karl-Heinz.W.Bechtold, *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 234-236.

BAB III

KENDALA-KENDALA PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KOTAMADYA SURABAYA 1969-1979

Kegiatan-kegiatan pembangunan haruslah dilaksanakan tanpa mengakibatkan perusakan terhadap sumber kekayaan dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, tanah pertanian yang ada masih belum seluruhnya dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai dengan kepentingan para petani. Di samping itu para petani perlu mempunyai kepastian mengenai hak atas tanah yang dimiliki ataupun digarapnya.¹

Rendahnya hasil pertanian sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh tingkat pengetahuan para petani yang masih rendah, tetapi juga masalah biaya. Para petani gurem sebagai sebutan mereka, biasanya tidak mempunyai modal yang cukup untuk usaha tani. Hasil panen kadang-kadang hanya cukup untuk makan dan biaya hidup sehari-hari, akibatnya pada waktu akan mulai menanam lagi para petani tersebut mengalami kekurangan modal.²

Masalah kegagalan panen yang selalu menghantui para petani memang kerap sering terjadi. Biasanya hal tersebut diakibatkan oleh serangan hama, bencana alam, banjir, dan lain lain. Menyinggung beberapa masalah di atas, tentunya di Kotamadya Surabaya mengalami hal-hal yang menghambat pembangunan pertanian tanaman

¹ *Rencana Pembangunan Lima tahun Kedua 1974/1975-1978/1979* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1974), hlm. 32.

² Imam Suprayitna, *Kiat Sukses Bertani* (Solo: C.V. Aneka, 1996), hlm. 8.

pangan. Berikut dipaparkan mengenai kendala-kendala pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya tahun 1969-1979.

A. Kendala Kondisi Alam

Alam bagi manusia kadang-kadang bisa menjadi sahabat atau musuh. Itu tentunya tergantung dari perilaku manusia sendiri dalam memperlakukan alam tersebut. Sering manusia menganggap kalau alam yang diciptakan untuk mereka adalah rumah sekaligus tempat kehidupan yang paling ideal, tetapi hal tersebut juga menuntut diri manusia untuk konsekuen dalam menjaganya. Penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, polusi dari berbagai macam aktivitas ternyata lebih sering terlihat untuk menghargai alam yang tidak bersalah, akibatnya kemurkaan seperti banjir, bencana alam sering menimpa manusia sendiri. Apakah dengan adanya hal tersebut alam patut disalahkan? Mungkin hanya pribadi dari masing-masing manusia saja yang dapat menjawabnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya juga tidak terlepas dari berbagai macam bencana alam seperti banjir, kekeringan ataupun serangan hama. Pada tahun 1969 di daerah Kecamatan Rungkut dilaksanakan Bimas Gotong Royong Hoechst dengan luas lahan sawah kira-kira 925,5 ha dengan rincian jenis PB 5 seluas 745,5 ha dan jenis nasional/PB 8 seluas 180 ha. Pada saat panen tanggal 19 Mei 1969 di Desa Gununganyar khusus untuk PB 5 diperoleh hasil sementara 5.500 kg gabah kotor yang sebelumnya mengalami serangan hama sundep. Desa Kalirungkut menghasilkan 5.050 kg gabah kotor yang sebelumnya mengalami perubahan teknis akibat banjir, walang sangit dan

sundep. Desa Rungkutkidul menghasilkan 5.600 kg gabah kotor yang sebelumnya pada waktu pelaksanaan tanam padi berumur lima minggu tergenang air hingga mengakibatkan kerusakan, akibatnya lahan sekitar 30% dibongkar dan ditanam lagi. Hama yang menyerang saat itu adalah jenis sundep/beluk berkisar 4% dan walang sangit berkisar 5% dari total keseluruhan lahan.³ Pemerintah Kotamadya Surabaya menyikapi kejadian itu segera bertindak dengan mengadakan pemberantasan hama tikus secara massal. Selain itu diberikan pula petunjuk teknis tentang sistem penggarapan, pembibitan, dan penanaman kepada para petani oleh penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kotamadya Surabaya.⁴

Serangan hama tikus yang secara nasional terjadi pada tahun 1972 otomatis juga menimpa daerah pertanian di Kotamadya Surabaya. Intensitas serangan cukup berbahaya karena merusak sebagian besar lahan pertanian di daerah Kotamadya Surabaya. Kemudian diikuti dengan kemarau panjang yang mengakibatkan penurunan produksi beras.⁵ Antisipasi dari pemerintah Kotamadya Surabaya mengenai hal tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu melakukan pemberantasan hama tikus secara massal dan daerah yang mengalami kekeringan diberikan bantuan berupa beras agar tidak terjadi bencana kelaparan. Krisis pada tahun 1972 tersebut di sisi lain membawa hikmah tersendiri. Pertama, diakui bahwa

³ Arsip Kota Surabaya No.0000/389, *Perkembangan Pertanian di Daerah Kecamatan Rungkut* (Box.1.780, No.44.032)

⁴ Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006 dan Bapak Warsidi (Petani di Daerah Kotamadya Surabaya) pada tanggal 2 Mei 2006.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 3 Januari 2006.

untuk meningkatkan persyaratan kualitas pengadaan, perlu dilakukan secara bertahap dan perlu melihat kendala-kendala yang terjadi. Kedua, untuk mempercepat pemasukan, maka sarana yang memadai seperti gudang, angkutan, penggilingan dan segala sesuatu yang menunjang perlu dilengkapi.⁶

Bencana banjir yang dialami oleh para petani sepertinya sudah menjadi tradisi yang biasa. Banjir tersebut pada tahun 1975 menyerang lahan pertanian yang ada di Kecamatan Karangpilang sehingga mengakibatkan banyak tanaman-tanaman padi rusak dan membusuk serta para petani banyak yang menderita kerugian. Sebab-sebab dari banjir yang dimaksud adalah karena dangkalnya dan sempitnya *Kali Makmur* yang sejak kurang lebih tahun 1957 hingga tahun 1975 belum pernah direhabilitasi oleh Pemerintahan Kotamadya Surabaya terutama di bagian bawah saluran sungai.

Berdasarkan laporan dari para Kepala Desa dalam konferensi dinas tanggal 29 Januari 1975, daerah yang sawah-sawahnya terkena banjir di sepanjang saluran *Kali Makmur* dikarenakan hujan yang sebelumnya terjadi pada tanggal 19 dan 20 Januari 1975 adalah Desa Kedurus mencapai 65 ha, Desa Jajartunggal mencapai 10 ha, Desa Wiyung mencapai 105 ha, Desa Babatan mencapai 80 ha, Desa Lidah Wetan mencapai 70 ha, Desa Lidah Kulon mencapai 80 ha, Desa Jeruk mencapai 55 ha, Desa Lakarsantri mencapai 15 ha, Desa Kebraon mencapai 30 ha, Desa Balas Klumprik mencapai 75 ha, Desa Sumur Welut mencapai 55 ha dan Desa Bangkingan mencapai 30 ha. Total keseluruhan luas hektar sawah yang rusak terkena banjir adalah 670 ha dari 12 Desa di Kecamatan Karangpilang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para petani meminta bantuan kepada Walikota Surabaya untuk

⁶ Bustanil Arifin, *Pangan dalam Orde Baru* (Jakarta: KOPINFO, 1994), hlm. 217.

berkenan menangani normalisasi *Kali Makmur*.⁷ Proyek tersebut diharapkan dapat terealisasi pada musim kemarau sekitar bulan September/Oktober 1975, mengingat pentingnya bagi peningkatan produksi pertanian dan kesehatan pada waktu yang akan datang. Masalahnya, justru tertundanya lagi proyek normalisasi tersebut dikarenakan ada proyek-proyek lain yang lebih penting sehingga hal tersebut belum dapat diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut beberapa sumber yang ada, proyek tersebut baru dilakukan ketika memasuki tahap pembangunan lima tahun yang ketiga dan kedepannya dapat dilihat, walaupun pernah ditemui pada musim penghujan beberapa sawah di sekitar areal *Kali Makmur* tergenang air, tetapi kerusakannya tidak separah waktu sebelum diadakan normalisasi.⁸ Mengenai dampak sosial ekonomi yang diterima oleh para petani dengan kejadian tersebut bisa sedikit teratasi karena setelah adanya berita acara dari para Kepala Desa tentang bencana banjir tersebut, pemerintah Kotamadya Surabaya memberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan pestisida secara gratis. Dan bagi para petani yang sawahnya mengalami kerusakan berat tetapi telah mengikuti program Bimas, maka akan diberikan keringanan kredit dari penundaan kredit hingga pembebasan kredit.⁹

Pada pertengahan musim tanam 1975/1976 sampai tahun 1977 secara nasional Indonesia mengalami eksplosif serangan hama wereng dan kemarau yang panjang

⁷ Arsip Kota Surabaya No.733/7/75/Wil.Sel., *Normalisasi Proyek Kalimakmur* (Box.2.404, No.73.566)

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fajar (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 3 Januari 2006.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006 dan Bapak Edilan (Petani di Daerah Kotamadya Surabaya) pada tanggal 2 Mei 2006.

sehingga mengakibatkan kerusakan pada areal lahan tanam mencapai 302.915 ha. Pada tahun 1977, tidak kurang dari 700.746 ha dari areal tanaman semusim mengalami gangguan panen akibat serangan hama.¹⁰ Hal tersebut disebabkan karena. Pertama, petani kurang tepat waktu dalam melakukan sistem aplikasi/penggunaan pestisida. Kedua, petani kurang mampu mengidentifikasi jenis dan gejala serangan hama. Ketiga, petani kurang memperoleh informasi tentang pengendalian hama.¹¹ Meskipun hama wereng telah melakukan serangan secara seporadis dalam tiga tahun berturut-turut dan kemarau yang kurang bersahabat, pada intinya produksi pertanian secara nasional masih cukup berhasil berkat adanya penyempurnaan dan pelaksanaan intensifikasi.

Musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Timur termasuk di Kotamadya Surabaya pada tahun 1977 mengakibatkan banyak terjadinya bencana kelaparan. Daerah Kotamadya Surabaya yang banyak ditinjau diantaranya adalah Kecamatan Karangpilang, Sukolilo dan Rungkut. Akibat musim kemarau penduduk daerah-daerah tersebut banyak menderita kekurangan makan. Oleh karena itu Pemerintah Kotamadya Surabaya mulai menghimpun bantuan-bantuan yang sudah ada maupun yang sedang dirintis untuk segera mensubsidi daerah-daerah yang kritis.¹²

Bencana banjir di Kotamadya Surabaya memasuki tahun 1978 menimpa daerah Kecamatan Tandes, Kecamatan Karangpilang dan Kecamatan Rungkut. Banjir

¹⁰ Bustanil Arifin, *op.cit.*, hlm. 221.

¹¹ Abdullah Taufiq, *Perakitan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan untuk Tanah Vertisol* (Malang: Balai Penelitian Tanaman Pangan, 1994), hlm. 78.

¹² Arsip Kota Surabaya No.0207/688/77, *Persiapan Bantuan Pangan* (Box.2.400, No.73.360)

yang terjadi pada bulan Januari itu telah merusak sawah seluas 1.959 ha dengan intensitas seluas 865 ha berkategori sedang dan 894 ha berkategori berat. Untuk meringankan beban para petani yang sawahnya terkena banjir, pihak Pemerintah Kotamadya Surabaya memberikan bantuan kredit berupa bibit padi VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng) jenis IR 32 sebanyak satu setengah ton yang dibagikan kepada para petani di Kecamatan Tandes, Kecamatan Rungkut sebanyak setengah ton dan Kecamatan Karangpilang sebanyak dua ton. Total keseluruhan bantuan kredit yang diberikan Pemerintah Kotamadya Surabaya adalah sebanyak empat ton bibit padi.¹³

Sistem pemberian kredit tersebut dilakukan oleh petugas lumbung bibit desa. Berhubung hal tersebut masih dalam bentuk kapasitas kredit, maka para petani akan tetap mengembalikan pinjaman bibit itu dalam bentuk bibit VUTW yang sama atau bahkan lebih baik mutunya tanpa dikenakan bunga.

Berselang empat bulan kemudian, masih dalam tahun yang sama tepatnya bulan Mei 1978 terdapat laporan di dua wilayah Kecamatan yaitu Karangpilang dan Tandes mengalami serangan hama wereng. Luas keseluruhan serangan mencapai 887 ha dengan rincian lahan Bimas sebanyak 391,25 ha, lahan Inmas 213 ha dan non Bimas/Inmas sebanyak 292,75 ha. Untuk intensitas serangan dengan rincian kategori berat mencapai 194 ha, kategori sedang mencapai 300,25 ha dan kategori ringan mencapai 392,75.

Gambaran lebih lengkap tentang serangan hama wereng di wilayah Kecamatan Karangpilang dan Tandes pada bulan Mei 1978 adalah sebagai berikut:

¹³ *Empat Ton Bibit Padi untuk Kecamatan Tandes* (Surabaya Post: 11 Februari 1978), hlm. 2.

Tabel 3
Serangan Hama Wereng di Wilayah Kecamatan Karangpilang dan
Tandes Bulan Mei 1978

Daerah	Luas Tanaman yang Diserang (ha)												Jumlah Besar	Ket Puso (ha)	
	Bimas				Inmas				Non Bimas/Inmas						
	B	S	R	Jumlah	B	S	R	Jumlah	B	S	R	Jumlah			
Karangpilang															
Madec	20	30,5	75	125,5	25	2	4,5	31,50	30	11	21	62	219	25	
Bringin	10	11	15	36	20	8	14	42	35	11	10	56	134	15	
Lakarsantri	10,25	2	3	5,25	21,25	4	7	32,50	19	6	9	34	71,75	4	
Sambikerep	1,5	1	2	4,5	1	1	4	6	4	2	6	12	22,5	15	
Warugunung	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	7	-	
Jumlah	31,75	44,5	95	171,25	74,25	15	29,50	119	119	30	46	164	454,25	59	
Tandes															
Pakal	-	70	37	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	
Banjarsugihan	-	15	-	15	-	-	8	8	-	-	-	-	23	0,5	
Sumberejo	-	2	2	4	-	-	-	-	-	25	15	40	44	-	
Benowo	-	2	7	9	-	-	-	-	-	10	4	24	23	-	
Sememi	-	30	4	34	-	20	-	20	-	1,75	50	51,75	105,75	1	
Babatrawat	-	25	25	45	-	10	30	40	-	-	-	-	85	2	
Tandeskidul	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	5	5	8	-	
Kandangan	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-	3	3	15	0,5	
Tanjungsari	-	-	1	1	-	-	6	6	-	-	3	3	10	-	
Sukomanunggal	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	2	2	12	-	
Jumlah	-	144	76	220	-	30	64	94	-	36,75	82	128,75	432,75	4	
Jumlah Keseluruhan	31,75	188,5	171	391,25	74,25	45	93,5	213	88	66,75	128	292,75	887	63	

Sumber: Arsip Kota Surabaya No.0207/378/78, *Serangan Hama Wereng* (Box.2.564, No.78.567)

Keterangan: B = Berat, S = Sedang, R = Ringan

Pada umumnya varietas padi yang diserang adalah non VUTW dan rata-rata umurnya berkisar satu setengah hingga dua setengah bulan. Pemerintah Dinas Pertanian Kotamadya Surabaya, telah mengambil tindakan berupa bantuan obat-obatan sebanyak 1.360 liter atau setara dengan Rp 1.672.800. Dari total 1.360 liter obat-obatan terdapat sekitar 300 liter Diazinon untuk penanggulangan hama wereng dan ulat-ulat tentara. Kemudian berupa uang operasional atau perbaikan peralatan

sebanyak Rp 165.000. Pembiayaan untuk pengeluaran obat-obatan dibebankan pada APBD Kotamadya Surabaya Tahun Anggaran 1978/1979.¹⁴

Kerusakan sawah akibat banjir untuk kesekian kali menimpa Kecamatan Tandes pada tahun 1979, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1979. Beberapa Desa di daerah itu sawahnya mengalami kebanjiran diantaranya Desa Tambakdono, Desa Sumberejo, Desa Pakal, Desa Babatjrawat, Desa Sememi dan Desa Benowo. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan sawah seluas 5,05 ha di Tambakdono, seluas 300 ha di Sumberejo dan total kerugian akibat banjir pada saat itu ditaksir mencapai Rp 50 juta.¹⁵ Pemerintah Kotamadya Surabaya menyikapi kejadian itu segera memberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan pestisida serta keringanan berupa penundaan kredit hingga pembebasan kredit sesuai dengan kondisi kerusakan sawah.

Wilayah Kotamadya Surabaya pada tanggal 13 april 1979 kembali dikejutkan dengan adanya serangan hama wereng. Dari total luas areal lahan mencapai 7.095 ha yang terindikasi terkena serangan hama wereng mencapai 3.568 ha, ditambah lagi dengan adanya daerah bahaya serangan yang mencapai 3.821 ha dan luas tanaman yang puso mencapai 581 ha. Untuk lebih jelasnya bagaimana kondisi kerusakan lahan di Kotamadya Surabaya yang diakibatkan serangan hama wereng dapat dilihat dari tabel berikut dibawah ini:

¹⁴ Arsip Kota Surabaya No.0207/378/78, *Serangan Hama Wereng* (Box.2.564, No.78.567)

¹⁵ *Tandes juga Banjir* (Surabaya Post: 8 Januari 1979), hlm. 2.

Tabel 4
Serangan Hama Wereng di Wilayah Kotamadya Surabaya
Bulan April 1979

No	Kecamatan	Luas Tanaman	Luas Serangan		Luas Daerah Bahaya (ha)	Luas Tanaman Puso (ha)	Keterangan
			Ha - %	Intensitas (%)			
1	Tandes	1.350	990 - 73	115	1.070	8	- luas tanaman puso bertambah 7 ha dibandingkan laporan tanggal 12 April 1979 khusus wilayah Tandes
2	Gubeng	71	29 - 41	11	34	-	
3	Tambaksari	190	55 - 29	11	92	2	
4	Sukolilo	1.774	530 - 30	12	535	29	
5	Rungkut	984	620 - 63	35	670	45	
6	Wonocolo	506	196 - 39	14	230	11	
7	Karangpilang	2.220	1.119 - 50	35	1.210	486	
	Jumlah	7.095	3.568 - 50	12,25	3.821	581	

Sumber: Arsip Kota Surabaya No.7500/54/1979, *Laporan Serangan Hama Wereng* (Box.1.541, No.34.217)

Pada tanggal 14 April 1979 Gubernur Jawa Timur dan Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya melakukan suatu peninjauan di seluruh daerah yang terkena serangan hama wereng dan menginstruksikan untuk melaksanakan gerakan pembasmian dan pembakaran alang-alang dan padi puso. Juga ditegaskan agar penerangan/penyuluhan harus tetap sering dilakukan untuk membawa masyarakat tetap bergairah walaupun seringkali sawahnya terkena bencana banjir ataupun hama.¹⁶ Bagi para petani yang sawahnya terkena serangan hama wereng diberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan pestisida serta penundaan kredit hingga pembebasan kredit.

¹⁶ Arsip Kota Surabaya No.7500/54/1979, *Laporan Serangan Hama Wereng* (Box.1.541, No.34.217)

B. Kendala Pembuangan Limbah Industri.

Masalah kelestarian alam ternyata cukup berpengaruh terhadap proses kesempurnaan pembangunan pertanian tanaman pangan. Kestarian alam yang berguna untuk menjaga keseimbangan biologis harus dijaga keadaannya. Penggunaan teknologi yang tidak tepat guna dalam usaha pertanian biasanya mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang serius. Demikian juga sistem pertanian yang berpindah-pindah dapat menurunkan kesuburan tanah sehingga mempercepat proses rusaknya tanah.

Masalah pembuangan limbah industri yang sembarangan akan menyebabkan daya dukung alam yang ada semakin merosot. Akibat dari semua itu adalah terjadinya erosi yang mengakibatkan tanah kritis meluas lebih cepat daripada usaha-usaha memulihkannya. Pengawasan dan aturan yang jelas sepertinya sangat dibutuhkan agar pembangunan pertanian yang ditujukan untuk peningkatan produksi pangan bisa berjalan secara efektif.¹⁷

Kasus pembuangan limbah industri yang terjadi bulan Desember 1979 di daerah persawahan penduduk Desa Kedungbaruk Kecamatan Rungkut membuktikan kesadaran manusia terhadap lingkungan amat tipis. Bahkan boleh dibilang hal itu merupakan kasus kriminal karena secara nyata merugikan hak orang lain. Kejadian tersebut mendorong penduduk dan komisi PPLH untuk melaporkan kepada Walikota. Menyikapi berita tersebut, Walikota segera memberi peringatan kepada dua

¹⁷ *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/1980-1984/1985* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1979), hlm. 333.

pabrik/industri yang bertanggung jawab atas kasus itu diantaranya P.T. Star Angkasa dan P.T. Horizon Syntex untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan pembuangan air buangan industri ke saluran umum yang menuju ke sawah penduduk di sekitarnya. Saluran pembuangan dari pabrik yang menuju ke pengairan tersier harus ditutup.
2. Baik kepada P.T. Horizon Syntex maupun P.T. Star Angkasa sebelum membuat dan mengoperasikan *waste water treatment plant* secara sempurna diharuskan membuang air buangannya ke Sungai Jagir dibawah Dam Jagir.
3. Diperintahkan kepada masing-masing pimpinan pabrik/industri untuk segera melakukan pengolahan air buangan industri dan memberikan laporan hasil analisa air buangan secara periodik setiap bulan sekali kepada komisi PPLH Propinsi Jawa Timur dan komisi PPLH Kotamadya Surabaya.
4. Membayar ganti rugi yang dituntut oleh penduduk setempat secara musyawarah antara pihak pabrik/industri dengan penduduk setempat yang sawahnya rusak.¹⁸

Mendapat teguran dari Walikota, dua pabrik tersebut kemudian melaksanakan instruksi yang diberikan dan mengenai ganti rugi kepada para penduduk yang sawahnya rusak karena pencemaran air limbah, hal itu telah disanggupi oleh kedua pabrik dengan ketentuan pembayaran ganti rugi melibatkan pejabat pemerintah kota, pejabat desa dan warga yang bersangkutan.

Instruksi tersebut bertujuan agar pabrik-pabrik mendapat pengawasan yang cukup ketat berkaitan dengan pengelolaan limbah industri dan kekhawatiran terhadap kejadian serupa dapat lebih diminimalisir. Pengelolaan kelestarian alam yang semaksimal mungkin, pada dasarnya harus dijaga dan diimbangi dengan kesadaran lingkungan masing-masing individu.

¹⁸ Arsip Kota Surabaya No.260/6800/BUM/79, *Pencemaran Air Buangan di Sawah Penduduk Desa Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya* (Box.2.286, No.68.100)

C. Kendala Lingkungan Fisik dan Sosial

Pertanian sebagai bidang usaha, dalam banyak hal sangat tergantung kepada kondisi fisik yang tidak selalu dapat dikuasai atau diatur oleh petani sebagai juru tani ataupun pengelolanya. Karena itu, setiap upaya perubahan yang dilakukan harus selalu memperhatikan keadaan lingkungan fisik dimana perubahan yang direncanakan itu diterapkan.

Teknologi yang tersedia, hal itu tidak saja berpengaruh langsung secara teknis terhadap kemampuan atau daya dukung bagi usaha tani yang diterapkan. Ketidakpastian keadaan fisik ataupun ketidakpastian dari keberhasilan setiap teknologi yang akan diterapkan juga seringkali membuat suatu konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan (biaya operasional atau pemeliharaan).¹⁹ Hal-hal itulah yang kemudian membuat para petani khususnya para petani gurem cukup sulit untuk menerima masukan-masukan baru. Pada permulaan periode pembangunan lima tahun pertama, masyarakat petani di Kotamadya Surabaya masih ada yang belum bersedia mengadopsi dan melaksanakan sistem teknologi baru. Mereka menganggap bahwa ajaran dari orang tuanya sudah cukup baik untuk diterapkan.

Para petani gurem tersebut umumnya mendapatkan pengetahuan tentang pertanian dari nenek moyang mereka secara turun menurun. Mereka tetap memegang teguh pengetahuan tersebut untuk menghormati leluhurnya, akibatnya mereka sulit untuk berkembang dalam usaha taninya, misalnya cara menanam, memupuk, panen dan sebagainya.

¹⁹ Totok Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1992), hlm. 30.

Golongan petani gurem tersebut sebenarnya juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Saat itu telah diterjunkan tenaga penyuluh untuk memberi penyuluhan kepada mereka. Setiap satu orang guru tani membawahi 15 tani maju dan satu tani maju membawahi 20 petani biasa (gurem), tetapi mereka masih sulit untuk menerima materi penyuluhan dan menerapkannya.²⁰

Pada umumnya para petani gurem saat itu masih memiliki tingkat sosial ekonomi yang masih rendah, dan bila mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal baru dari penyuluhan, mereka belum sepenuhnya melaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena mereka takut mengalami kegagalan. Bagi mereka kegagalan dalam usaha tani merupakan pukulan berat, karena mereka merasa telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, jika gagal berarti mengalami kerugian besar.

Memang penerapan teknologi baru di bidang pertanian memerlukan tambahan biaya yang cukup besar. Umumnya para petani kurang mampu untuk memenuhi biaya tersebut walaupun sudah akan dijanjikan akan mendapatkan pinjaman/kredit jika mau melaksanakannya. Sesuatu yang selalu ada di pikiran para petani gurem adalah mau mencoba jika sudah ada yang mencoba dan berhasil.

Pada satu dasawarsa 1970-an para petani di Kotamadya Surabaya telah banyak mengalami kemajuan secara bertahap. Mayoritas mereka adalah para petani muda. Mereka bersedia datang pada acara penyuluhan pertanian dan mendengarkan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadjar (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 3 Januari 2006.

dengan cermat. Informasi yang mereka peroleh dalam penyuluhan pertanian tersebut mereka praktekkan, dengan demikian diperoleh tambahan ilmu pengetahuan.²¹

Petani yang kurang dapat memanfaatkan kemajuan IPTEK pertanian juga disebabkan karena kurangnya informasi yang sampai ke para petani. Peran dan bantuan dari pihak yang berwenang sangat dibutuhkan secara intensif untuk menyampaikan hal-hal yang baru kepada para petani dalam hal ini adalah PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), PPS (Petugas Penyuluh Spesialis) dan pihak Pemerintah Kotamadya Surabaya.

Petani sebagai pelaksana usaha tani pada setiap pengambilan keputusan untuk usaha tani tidak selalu dapat dengan bebas melakukannya sendiri tetapi sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di sekelilingnya, misalnya disebabkan oleh suatu tata nilai dan moral sangat dijunjung oleh masyarakat bersangkutan. Jika mereka merasa moral atau harga diri mereka terampas, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Sukolilo pada tahun 1978 merupakan bukti nyata bahwa mereka sebagai rakyat kecil tetap menginginkan suatu keadilan untuk menghadapi pihak-pihak tertentu yang ingin menimbulkan suatu pergesekan atau konflik sosial.

Permasalahan dimulai ketika pertengahan Januari 1978, para petani di enam Desa wilayah Kecamatan Sukolilo meminta keadilan langsung kepada DPR pusat soal ganti rugi tanah sawah kira-kira seluas 600 ha. Sebelumnya memang pada tahun

²¹ Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 3 Januari 2006.

1972, mereka mendapat kabar dari panitia pembangunan bahwa tanah sawah dan sebagian tanah kering mereka akan dipakai untuk mendirikan bangunan sebuah akademi (sekarang ITS) dengan perjanjian para petani diberi ganti rugi. Akan tetapi sebelum tanah itu diisi dengan bangunan, para petani masih diberi hak untuk menanam tanah dengan berbagai tanaman tanpa dikenakan dana wajib bagi hasil.

Mereka mendapat ganti rugi Rp 25, untuk permeter perseginya. Tanpa diketahui sebab yang pasti, tiba-tiba para petani di Desa Medokan Semampir dan Ngemplak dikejutkan dengan pungutan yang dilakukan oleh pihak kepala proyek pembangunan gedung akademi. Merasa bukan kewajiban mereka, pungutanpun ditolak dan terjadilah penangkapan diantara para petani yang tidak mau menyetorkan sebagian gabah hasil panen kepada kepala proyek. Bahkan sebagian diantara mereka ada yang dimintai tanda tangan secara paksa soal bagi hasil panen tersebut.

Berselang dua tahun kemudian, para petani diwajibkan lagi menyetorkan sekitar 15-30% dari hasil panen kepada kepala proyek. Terhitung mulai tahun 1974 setoran ditentukan bagi setiap hektarnya dan para petani harus menyetor minimal lima kwintal dari hasil panen. Setoran tanaman para petani itu diangkut oleh truk-truk dinas sebuah instansi resmi dan diantaranya ada yang langsung dijual ke tempat pedagang, malahan kalau ada keluarga petani yang mau mendirikan gubug-gubug di sekitar sawah itu dikenakan pungutan sebesar Rp 25.000. Ternyata sampai tahun 1978, tanah sawah di enam desa belum nampak didirikan bangunan sebuah akademi/ perguruan tinggi tetapi yang nampak sekitar 100 ha tanah sawah dikapling-

kapling dan diantaranya sudah didirikan rumah yang dibangun oleh swasta.²² Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum proyek pembangunan akademi yang bekerjasama dengan salah satu oknum dari dinas pemerintahan sudah dilakukan penyelidikan dan yang terbukti bersalah dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat itu. Di dalam perkembangannya pembangunan kampus yang bernama ITS itu, dapat menyelesaikan tahap pertamanya pada tahun 1981 dan penggunaannya mulai diresmikan pada tanggal 27 Maret 1982.

²² *DPR Pusat Menanggapi Keluhan Para Petani 6 Desa di Kecamatan Sukolilo* (Surabaya Post: 7 Maret 1978), hlm. 2.

BAB IV

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KOTAMADYA SURABAYA 1969-1979

Pembangunan pertanian tanaman pangan adalah suatu produk masyarakat. Proses pembangunan dijalankan oleh segala pihak yang bersangkutan terutama para petani, petugas penyuluhan, petugas riset, para pedagang, pengusaha dan pejabat pemerintah. Di dalam hubungan tersebut, tugas pemerintah yang utama ialah menciptakan iklim yang kondusif agar para petani dan mereka yang bersangkutan mampu dan bersedia untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu produksi. Dibutuhkan suatu kemampuan manajemen yang baik agar pihak-pihak lain secara otomatis dapat bekerja.

Segala kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan diusahakan agar dapat memenuhi fungsinya untuk: Pertama, meningkatkan kemampuan berproduksi para petani. Kedua, memelihara kelangsungan peningkatan produksi pangan terutama beras dengan tujuan mencukupi kebutuhan. Ketiga, mengurangi pengangguran baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Keempat, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber alam yang ada dan menjaga kelestariannya demi kepentingan generasi mendatang.¹

Berdasarkan fungsinya itu, pembangunan pertanian tanaman pangan diharapkan mempunyai suatu konsep pertanian yang tangguh diantaranya: Pertama,

¹ *Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama 1969/1970-1974/1975* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1969), hlm. 33.

pertanian harus memanfaatkan segala sumber daya alam secara optimal untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Kedua, pertanian tanaman pangan harus mampu mengatasi hambatan dan tantangan seperti musim kemarau yang panjang dan serangan hama. Ketiga, pertanian tanaman pangan harus dapat menyesuaikan diri dalam pola dan struktur produksinya terhadap perubahan yang terjadi, baik perubahan permintaan masyarakat maupun perubahan teknologi. Keempat, pertanian tanaman pangan harus mampu berperan positif terhadap pembangunan nasional, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat.²

Pembangunan pertanian tanaman pangan yang tangguh menurut A.T.Mosher harus memiliki syarat mutlak sebagai berikut:

1. Pasaran untuk hasil-hasil usaha tani yang diproduksi untuk menjamin pendapatan bagi usaha tani tersebut.
2. Teknologi yang selalu berubah.
3. Tersedianya sarana produksi secara lokal sehingga para petani dengan mudah dapat mencukupi kebutuhan akan sarana-sarana produksi yang diperlukan seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dsb.
4. Perangsang secukupnya bagi petani.
5. Fasilitas pengangkutan atau pemasaran.³

Hal-hal tersebut diatas juga harus didukung dengan berbagai faktor pelancar diantaranya: Pertama, pendidikan pembangunan. Kedua, kredit produksi. Ketiga, kegiatan gotong royong. Keempat, perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Kelima, perencanaan untuk pembangunan.

Pembangunan di bidang pertanian khususnya yang menghasilkan beras dan palawija tentunya perlu didorong laju pertumbuhan dan peningkatan produksinya

² *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991), hlm. 169.

³ Bambang Tri Cahyono, *Masalah Petani Gurem* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 18.

yang kemudian pada gilirannya dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan lainnya seperti di bidang industri dan perdagangan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, akan dilaksanakan empat usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

Keempat usaha pokok tersebut merupakan usaha terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan. Sehubungan hal tersebut, akan ditempuh langkah-langkah untuk mengendalikan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga lahan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Penguasaan atas tanah harus diikuti oleh pengusahaan yang optimal. Langkah-langkah tersebut juga ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dimana potensi sumber alam seperti tanah, iklim, air akan dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak kelestarian sumber-sumber alam tersebut.

Usaha meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian, di samping menjaga kelestarian alam, maka pembangunannya diarahkan pada yang bersifat padat karya. Pemilihan dan penggunaan teknologi selain menunjang peningkatan produksi juga untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan ketrampilan para petani di pedesaan.⁴

Kebijaksanaan usaha tani terpadu adalah suatu usaha pembinaan terhadap usaha tani yang mempunyai beranekaragam cabang usaha untuk dimanfaatkan secara optimal. Segala sumber daya dan dana yang dimiliki dikerahkan untuk bisa mencapai

⁴ Departemen Pertanian RI, *Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 1989), hlm. 3.

tujuan peningkatan kesejahteraan petani. Pelaksanaan intensifikasi, perluasan areal dan diversifikasi diusahakan agar terdapat keterpaduan usaha tani.⁵

Di dalam rangka menciptakan keadaan dan suasana yang makin menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, akan ditempuh berbagai langkah dari sektor pertanian. Golongan para petani kecil sebagai sasaran pembangunan pertanian diusahakan memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan tersebut. Namun demikian diantara para petani ada yang sangat lemah kedudukannya karena tanah yang dimiliki sangat sempit serta ketrampilan dan pengetahuannya sangat terbatas. Hal tersebut mungkin sulit sekali bagi para petani lemah untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Untuk memperkuat kedudukan para petani lemah dikembangkan BUUD/KUD dengan mengintegrasikan kelompok para petani lemah di dalamnya sebagai unit usaha, unit organisasi dan unit penyuluhan. Kesempatan memperoleh kredit untuk alat-alat pertanian yang tepat guna bagi para petani lebih diperhatikan. Langkah-langkah tersebut juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing petani dan daerah.⁶

Selengkapnya bagaimana kebijaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya melalui penerapan inovasi panca usaha tani pada periode 1969-1979 adalah sebagai berikut.

⁵ *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/1980-1984/1985* (Jakarta: Departemen Pengerangan RI, 1984), hlm. 339.

⁶ Bustanil Arifin, *Pangan dalam Orde Baru* (Jakarta: KOPINFO, 1994), hlm. 206.

A. Kebijakan Intensifikasi Usaha Tani.

Pembangunan pertanian tanaman pangan pada periode 1969-1979 titik perhatiannya secara umum memang ditekankan terhadap peningkatan usaha intensifikasi. Program intensifikasi usaha tani di Kotamadya Surabaya sering digencarkan, baik itu meliputi peningkatan produktivitas areal pertanian tanah sawah ataupun tanah kering dengan menggunakan sarana produksi seperti benih unggul, pemupukan, pestisida, jaringan irigasi, penyuluhan dan pembinaan kredit bagi para petani.⁷

1. Kebijakan Bidang Pembenihan

Benih unggul adalah salah satu sarana terpenting untuk meningkatkan produksi beras. Benih unggul haruslah bermutu baik. Keunggulan suatu varietas kadang-kadang hanya bersifat sementara, misalnya suatu varietas sudah dibuktikan tahan terhadap hama sehingga para petani sangat suka menanam varietas tersebut, tetapi setelah beberapa tahun varietas tersebut mulai terserang hama dan menjadi tidak tahan terhadap hama. Untuk mengatasi masalah itu, harus sering diadakan penelitian untuk menghasilkan benih-benih unggul yang sangat responsif terhadap penggunaan pupuk dan tahan terhadap serangan hama serta penyakit tanaman.

Pada musim tanam 1968/1969 dimulai dengan diperkenalkannya varietas padi jenis PB 5 dan PB 8. Jenis baru tersebut adalah hasil penelitian Internasional Rice

⁷ Kebijakan ekstensifikasi dan rehabilitasi di Kota Surabaya pada Tahun 1969-1979 lebih banyak terakomodasi pada bidang intensifikasi, misalnya pada pembangunan sarana irigasi baru (ekstensifikasi) ataupun rehabilitasi jaringan irigasi. Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006

Research Institute (IRRI).⁸ Penggunaan benih unggul PB 5 dan PB 8 dilihat dari hasil produksi rata-rata di kebun percobaan berkisar antara tiga sampai empat ton beras/ha. Seperti dikemukakan pada bab sebelumnya, hasil sementara saat itu untuk panen ubinan/perhektar khusus PB 5 di Kecamatan Rungkut di Desa Gununganyar menghasilkan 5.500 kg gabah kotor, Desa Kalirungkut menghasilkan 5.050 kg gabah kotor dan Rungkutkidul menghasilkan 5.600 kg gabah kotor.

Tanaman padi yang berasal dari benih-benih unggul baru tersebut butirnya agak pendek dan tangkai butir terbungkus pelepah daun. Pada waktu panen diperlukan penggunaan sabit, karena adanya kemungkinan lebih mudah diserang hama dan persiapan untuk mengatasi serangan hama harus dilaksanakan secara lebih sempurna.⁹

Benih-benih unggul yang baru tersebut jika dapat diproduksi dalam jumlah yang besar serta dapat disebarakan dengan cepat ke daerah-daerah lainnya, maka produksi beras meningkat dengan cepat pula. Sudah barang tentu di samping produksi dan penyebaran benih-benih unggul, diperlukan pula sarana-sarana produksi yang lain dalam jumlah yang cukup.

Varietas-varietas unggul baru seperti PB 5 dan PB 8 ternyata hanya bertahan sampai tahun 1975, hal itu disebabkan karena jenis tersebut telah peka terhadap hama wereng batang coklat. Pada musim tanam 1975/1976 kemudian diperkenalkan bibit

⁸ Rudi Wibowo, *Refleksi Pertanian: Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hlm. 128.

⁹ A.G.Kartasapoetra, *Teknologi Penanganan Pasca Panen* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 198.

jenis baru yaitu IR 26, IR 28 dan IR 30 sekaligus untuk menanggulangi hama wereng batang coklat dalam intensifikasi padi Bimas/Inmas.¹⁰

Di dalam program intensifikasi produksi pangan musim tanam 1976 untuk kebutuhan saprodi (sarana produksi) benih dalam Bimas dan Inmas di Kotamadya Surabaya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5
Kebutuhan Sarana Produksi Benih untuk Bimas/Inmas Musim Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kg)

No	Kecamatan	Bulan										Total		
		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Bimas	Inmas	Total
		B	I	B	I	B	I	B	I	B	I			
1	Wonocolo	1.250	375	6.250	1.375	2.500	1.750	625	250	-	-	10.625	3.750	14.375
2	Sukolilo	-	-	1.250	-	6.250	5.000	5.625	10.000	-	1.500	13.125	16.500	29.625
3	Rungkut	-	-	2.500	3.125	5.000	3.750	750	2.625	-	-	8.250	9.500	17.750
4	Gubeng	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750	750
5	Tambaksari	-	-	-	-	750	-	1.000	2.000	-	1.750	1.750	3.750	5.500
6	Tandes	-	-	-	-	250	-	1.000	750	-	-	1.250	750	2.000
7	Karangpilang	-	-	-	-	1.875	1.250	625	1.250	-	-	2.500	2.500	5.000
Jumlah		1.250	375	10.000	4.500	16.625	12.500	9.625	16.875	-	3.250	37.500	37.500	75.000

Sumber: Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 10.

Keterangan: B = Bimas, I = Inmas, luas lahan musim tanam tahun 1976 mencapai 3.000 ha

Kebutuhan sarana produksi benih untuk Bimas pada bulan Juli merupakan yang tertinggi karena enam kecamatan serentak melakukan penanaman awal kecuali Kecamatan Gubeng yang mulai tahun 1976 tidak lagi mengikuti program Bimas karena areal tanahnya semakin berkurang untuk pemukiman penduduk. Sedangkan untuk Inmas, bulan Agustus merupakan yang tertinggi karena enam kecamatan kecuali Kecamatan Gubeng baru merasa siap melakukan penanaman pada bulan

¹⁰ Pada tahun 1982 padi IR 26, IR 28 dan IR 30 telah peka terhadap wereng batang coklat yang kemudian digantikan dengan benih padi IR 32, Cisadane dan IR 36. Arsip Kota Surabaya No.471/XV-B/1976, *Pengembangan IR 26, 28, 30 dalam Rangka Menanggulangi Hama Wereng dengan Virusnya* (Box.2.444, No.75.190)

tersebut. Hal itu disebabkan, para petani masih melihat dulu kondisi iklim yang berkembang dan jika sudah memungkinkan langsung dilakukan penanaman secara serentak. Hal tersebut memang bisa dimaklumi karena program Inmas biayanya dari para petani itu sendiri dan jika sewaktu-waktu sawah mereka mengalami bencana, maka bantuan dari pemerintah yang diterima akan lebih sedikit dibandingkan dengan sawah yang mengikuti program Bimas. Mengenai angka yang tertera pada tabel merupakan angka minimal kebutuhan yang pasti akan terealisasi bahkan bisa bertambah sekitar 10% karena sewaktu-waktu para petani bisa menambah jumlah produksi penanamannya.¹¹ Hal yang sama berlaku juga untuk kebutuhan sarana produksi lainnya seperti urea, TSP, insektisida dan zink phospid.

2. Kebijakan Bidang Sarana Produksi Pupuk dan Pestisida.

Pada musim tanam tahun 1968/1969 di Kecamatan Rungkut untuk pemberantasan hama pada intinya ketersediaan pupuk dan obat-obatan tidak mengalami suatu hambatan, yang menjadi masalah adalah terbatasnya petugas penyemprot dan pengawas teknik full timer. Pihak Kecamatan Rungkut sendiri telah meminta bantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Surabaya untuk menunjuk tenaga penyemprot dengan syarat pendidikan minimal SMP, mengingat di daerah Kecamatan Rungkut pemuda-pemuda yang berpendidikan SMP sangat tipis bahkan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006. Lihat juga Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 10.

hanya beberapa orang saja, walaupun ada jarang yang suka bertani.¹² Permintaan tersebut selanjutnya diproses dan beberapa orang tenaga penyemprot mulai dikirimkan ke wilayah Kecamatan Rungkut.

Kegiatan operasi pembasmian hama pada tanaman pangan ataupun pada gudang-gudang penyimpanan beras di Kotamadya Surabaya semakin hari mulai diintensifkan. Hal tersebut dapat dijelaskan, pada bulan Maret 1972 perusahaan yang bergerak pada bidang penyemprotan hama yaitu Fa Jasa unit National Contra Pest (NCP) telah melakukan aktivitasnya dalam operasi pembasmian hama.¹³ Pada tahun 1974, semakin banyak perusahaan-perusahaan penyemprotan hama yang melakukan aktivitasnya di dalam daerah Kotamadya Surabaya diantaranya P.T.Setrasari dan P.T.Gaviron.

Untuk mengadakan usaha pest control (operasi pembasmian hama) di daerah Kotamadya Surabaya tentunya setiap perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Pemerintah Kotamadya Surabaya termasuk Dinas Kesehatan diantaranya:

1. Perusahaan harus berbentuk badan hukum.
2. Harus ada seorang tenaga ahli sebagai penanggungjawab teknis.
3. Dua minggu sebelum mengadakan pembasmian hama, lebih dahulu harus melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kotamadya Surabaya mengenai: waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, syarat-syarat pelaksanaan, bahan-bahan yang dipakai dalam hal ini aktif substansinya, tidak membahayakan manusia, banyaknya bahan yang diperlukan, pernah dites di suatu daerah serta nama-nama petugas yang diterjunkan.
4. Memberikan daftar nama-nama bahan pestisida yang dipakai.

¹² Arsip Kota Surabaya No.0000/389/1969, *Perkembangan Pertanian di Kecamatan Rungkut* (Box.1780, No.44.032)

¹³ Arsip Kota Surabaya No.33/NCP/IV/1972, *Ijin Operasi Pembasmian Hama* (Box.1597, No.36.467)

5. Laporan bulanan kegiatan-kegiatan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kotamadya Surabaya.
6. Gudang pestisida tidak boleh terletak di dekat tempat tinggal warga dan tidak boleh terletak di daerah banjir.
7. Harus mentaati semua peraturan atau petunjuk-petunjuk mengenai pengamanan penggunaan pestisida.
8. Surat ijin operasi pembasmian hama diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan ijin baru setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Surabaya.¹⁴

Sehubungan dengan adanya berita-berita disurat kabar/harian di Kotamadya Surabaya tentang akan masuknya pupuk ke Jawa Timur sebanyak 600.000 ton dalam bulan Juni 1975, maka demi keamanan dan ketertiban, Tim Pengawas pelaksanaan Bimas Propinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada para Importir dan penyalur yang akan menyimpan pupuk-pupuk di luar gudang resmi di daerah hukum Kotamadya Surabaya agar terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah setempat dan Tim Pengawas penyaluran sarana produksi Kotamadya Surabaya untuk menghindari penyelewengan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁵ Hal tersebut memang membutuhkan suatu antisipasi agar penyelewengan pupuk yang nantinya merugikan para petani dan pemerintah dapat dihindari.

Di dalam rangka mensukseskan produksi padi untuk musim tanam 1975/1976 di seluruh wilayah Jawa Timur, Gubernur menginstruksikan kepada para

¹⁴ Catatan sedikit untuk P.T.Gaviron bahwa perusahaan tersebut sudah mendapat penunjukan resmi sebagai fumigator dan pest-controller (menjaga keselamatan beras/bahan pangan pemerintah) untuk Bulog (Badan Urusan Logistik) di seluruh Indonesia. Arsip Kota Surabaya No.6700/167/1974, *Surat Ijin untuk Mengadakan Usaha Pembasmian Hama* (Box.2.240, No.59.798)

¹⁵ Arsip Kota Surabaya No.79/TPPSP/1975, *Penyimpanan Pupuk di Luar Gudang Resmi* (Box.2.245, No.66.095)

Bupati/Walikota untuk memperhatikan hal-hal yang bisa menghambat keberhasilan penanaman diantaranya sebagai berikut:

1. Kerusakan tanaman pangan (padi) Musim Tanam 1975/1976 akibat hama dan penyakit harus dapat diatasi atau ditekan semaksimal mungkin antara lain kemungkinan terhadap timbulnya hama wereng dan penyakit lainnya (tikus)
2. Penyediaan pestisida berdasarkan hasil stok tanggal 28 Oktober 1975 yang berada di ruang lini III (insektisida) sebanyak 30% dan di ruang lini IV (fungisida) sebanyak 12%.
3. Mendekatkan semua jenis pestisida yang saat ini berada di lini III ke gudang-gudang BUUD (Badan Usaha Unit Daerah). Jenis pestisida tersebut penyalurannya berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas Pertanian setempat.
4. Mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan tepat agar tidak terjadi kemungkinan timbulnya hama dan penyakit secara eksplosif.
5. Dacrah-dacrah yang telah ditengarai sebagai daerah eks-serangan hama wereng maka bibit padinya mutlak harus diganti dengan jenis padi baru yaitu IR 26.¹⁶

Walikota Surabaya bersama Dinas Pertanian Rakyat Kota Surabaya segera melakukan evaluasi pada bibit, pupuk dan pestisida yang digunakan oleh para petani di dacrahnya. Pelaksanaannya sesuai dengan apa yang termuat dari instruksi Gubernur diantaranya melakukan Demplot (Demonstrasi Plot/Petakan). Di situ para petani dikumpulkan kemudian diberikan arahan dan bimbingan dari mulai awal penanaman hingga panen. Program ini 90% berhasil dan manfaatnya langsung diterima oleh para petani.¹⁷

Untuk dapat tumbuh baik dan berproduksi tinggi, tanaman padi membutuhkan unsur hara yang lengkap terutama unsur N, P dan K. Pupuk yang biasa digunakan adalah Urea dan TSP (Pupuk Phosphat). Di dalam pelaksanaan program Intensifikasi

¹⁶ Arsip Kota Surabaya No.Ek.011.4/574/1975, *Pemberantasan Hama dan Penyakit Tanaman Musim Tanam 1975/1976* (Box.615, No.12.123)

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006.

produksi pangan musim tanam 1976¹⁸ untuk kebutuhan sarana produksi Urea dalam Bimas/Inmas Kotamadya Surabaya dapat dilihat dari tabel berikut dibawah ini:

Tabel 6
Kebutuhan Sarana Produksi Urea untuk Bimas/Inmas Musim Tanam
1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kw)

No	Kecamatan	Bulan										Total		
		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Bimas	Inmas	Total
		B	I	B	I	B	I	B	I	B	I			
1	Wonocolo	100	15	500	55	200	70	50	10	-	-	850	150	1.000
2	Sukolilo	-	-	100	-	500	200	450	400	-	60	1.050	660	1.710
3	Rungkut	-	-	200	125	400	150	60	105	-	-	660	380	1.040
4	Gubeng	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	30
5	Tambaksari	-	-	-	-	60	-	80	80	-	70	140	150	290
6	Tandes	-	-	-	-	20	-	80	30	-	-	100	30	130
7	Karangpilang	-	-	-	-	150	50	50	50	-	-	200	100	300
Jumlah		100	15	800	180	1.330	500	770	675	-	130	3.000	1.500	4.500

Sumber: Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 6.

Keterangan: B = Bimas, I = Inmas, luas lahan musim tanam tahun 1976 mencapai 3.000 ha

Kebutuhan sarana produksi urea sama dengan kebutuhan sarana produksi benih yaitu untuk Bimas kebutuhan tertinggi pada bulan Juli dan Inmas pada bulan Agustus. Di dalam melaksanakan pemupukan, para petani sudah banyak yang mematuhi anjuran dari Dinas Pertanian Kota Surabaya. Mereka memberikan dosis sesuai takaran pada tanaman yaitu berkisar 150 kg/ha.¹⁹ Mengenai pemberian urea, biasanya diberikan sesudah pemupukan dasar dengan TSP.

Untuk kebutuhan sarana produksi TSP (Pupuk Phosphat) dalam Bimas/Inmas di Kotamadya Surabaya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Arsip Kota Surabaya No.0089/Bimas/77/Wil.Sel., *Program Intensifikasi Produksi Padi Bimas* (Box.2.000, No.52.986)

¹⁹ Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 6.

Tabel 7
Kebutuhan Sarana Produksi TSP untuk Bimas/Inmas Musim Tanam
1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kg)

No	Kecamatan	Bulan										Total		
		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Bimas	Inmas	Total
		B	I	B	I	B	I	B	I	B	I			
1	Wonocolo	2.500	375	12.500	1.375	5.000	1.750	1.250	250	-	-	21.250	3.750	25.000
2	Sukolilo	-	-	2.500	-	12.500	5.000	11.250	10.000	-	1.500	26.250	16.500	42.750
3	Rungkut	-	-	5.000	3.125	10.000	3.750	1.500	2.625	-	-	16.500	9.500	26.000
4	Gubeng	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750	750
5	Tambaksari	-	-	-	-	1.500	-	2.000	2.000	-	1.750	3.500	3.750	7.250
6	Tandes	-	-	-	-	500	-	2.000	750	-	-	2.500	750	3.250
7	Karangpilang	-	-	-	-	3.750	1.250	1.250	-	-	-	5.000	2.500	7.500
	Jumlah	2.500	375	20.000	4.500	33.250	12.500	19.250	16.875	-	3.250	75.000	37.500	112.500

Sumber: Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 7.

Keterangan: B = Bimas, I = Inmas, luas lahan musim tanam tahun 1976 mencapai 3.000 ha

Kebutuhan sarana produksi TSP sama dengan kebutuhan sarana produksi benih yaitu untuk Bimas kebutuhan tertinggi pada bulan Juli dan Inmas pada bulan Agustus. Pemberian pupuk TSP dilakukan oleh para petani sebagai pupuk dasar. Dosis yang diberikan berkisar 50 kg/ha.²⁰

Di dalam rangka melindungi tanaman serta untuk mengurangi beban kerugian yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman, sepertinya total penggunaan pestisida dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk musim tanam 1976 di Kotamadya Surabaya kebutuhan sarana produksi insektisida dalam Bimas/Inmas adalah sebagai berikut:

²⁰ Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 7.

Tabel 8
Kebutuhan Sarana Produksi Insektisida untuk Bimas/Inmas Musim
Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (Liter)

No	Kecamatan	Total		
		Bimas	Inmas	Jumlah
1	Wonocolo	850	300	1.150
2	Sukolilo	1.050	1.320	2.370
3	Rungkut	660	760	1.420
4	Gubeng	-	60	60
5	Tambaksari	140	30	170
6	Tandes	100	60	160
7	Karangpilang	200	200	400
	Jumlah	3.000	3.000	6.000

Sumber: Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 4-5.

Keterangan: B = Bimas, I = Inmas, luas lahan musim tanam tahun 1976 mencapai 3.000 ha

Kebutuhan sarana produksi insektisida otomatis mengikuti jumlah kebutuhan benih yang ditanam. Penggunaan insektisida tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dengan adanya serangan hama wereng. Dosis yang diberikan sekitar dua liter/ha. Di dalam wawancara yang dilakukan penulis, tidak diketahui secara pasti besar atau kecilnya serangan hama wereng dalam musim tanam tahun 1976.²¹

Untuk kebutuhan sarana produksi Zink Phosphid (fungisida) dalam Bimas/Inmas di Kotamadya Surabaya adalah sebagai berikut:

²¹ Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006. Lihat juga Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya, *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 4-5.

Tabel 9
Kebutuhan Sarana Produksi Zink Phospid untuk Bimas/Inmas Musim
Tanam 1976 di Daerah Kotamadya Surabaya (kg)

No	Kecamatan	Bulan										Total		
		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Bimas	Inmas	Total
		B	I	B	I	B	I	B	I	B	I			
1	Wonocolo	5	1,5	25	5,5	10	7	2,5	1	-	-	42,5	15	57,5
2	Sukolilo	-	-	5	-	25	20	22,5	40	-	6	52,5	66	118,5
3	Rungkut	-	-	10	12,5	20	15	3	10,5	-	-	33	38	71
4	Gubeng	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3
5	Tambaksari	-	-	-	-	3	-	4	8	-	7	7	15	22
6	Tandes	-	-	-	-	1	-	4	3	-	-	5	3	8
7	Karangpilang	-	-	-	-	7,5	5	2,5	5	-	-	10	10	20
	Jumlah	5	1,5	40	18	66,5	50	38,5	67,5	-	13	150	150	300

Sumber: Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya. *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 8.

Keterangan: B = Bimas, I = Inmas, luas lahan musim tanam tahun 1976 mencapai 3.000 ha

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui, bahwa kebutuhan sarana produksi zink phospid otomatis mengikuti jumlah kebutuhan benih yang ditanam. Penggunaan zink phospid tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dengan adanya serangan hama tikus. Dosis yang diberikan biasanya sekitar 0,1 kg/ha. Di dalam wawancara yang dilakukan penulis, tidak diketahui secara pasti besar atau kecilnya serangan hama tikus dalam musim tanam tahun 1976.²²

Di dalam pelaksanaan program peningkatan produksi padi dan palawija musim tanam 1976/1977 di daerah Kotamadya Surabaya, demi tercapainya secara maksimal dibidang pangan khususnya padi Bimas, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif di bidang penyaluran pupuk/obat-obatan yang lazim mempergunakan SPPB (Surat Pemakaian Pupuk Bersertifikat), Walikota Surabaya menginstruksikan

²² Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006. Lihat juga Badan Pelaksana Bimas Kotamadya Surabaya. *Pedoman Program Intensifikasi Produksi Pangan Musim Kemarau 1976*, hlm. 8.

kepada para Camat selaku ketua Badan Pelaksana Bimas Kecamatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam pelaksanaan tanam padi Bimas tahun 1976/1977, jangan sampai ada sisa-sisa SPPB pada musim tanam tahun-tahun yang lalu belum disetorkan.
2. Apabila di suatu desa terdapat kehilangan SPPB, hendaknya Kepala Desa yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkan dengan jalan membuat berita acara dan diketahui oleh Ketua Badan Pelaksana Kotamadya setempat kemudian Ketua Badan Pelaksana Kecamatan melaporkan kepada Ketua Badan Pelaksana Kotamadya Surabaya dalam hal ini Sub Direktorat Perekonomian.
3. Laporan perkembangan adanya Bimas secara menyeluruh dan kontinue dilaporkan kepada Ketua Badan Pelaksana Kotamadya Surabaya dan tindakan dikirim pada Dinas Pertanian Kotamadya Surabaya selaku Ketua Harian Badan Pelaksana Kotamadya Surabaya. Laporan itu meliputi areal tanam, penyaluran kredit dan sarana produksi, gangguan hama, realisasi panen (hasil produksi) serta tunggakan-tunggakan kredit yang belum terbayar lunas.²³

Perkembangan mengenai laporan Bimas di wilayah Kotamadya Surabaya selalu diadakan setiap tahunnya sebagai bahan program penyediaan pangan tahun yang akan datang. Masalah SPPB tidak mengalami suatu kendala karena adanya kerjasama yang baik antara semua pihak baik itu dari para petani hingga pejabat desa.

Penyaluran pupuk yang tepat pasti sedikit banyak akan mengurangi penyelewengan-penyelewengan yang menimpa serta merugikan para petani dan pemerintah. Untuk itu pada tahun 1978 Pemerintah Kotamadya Surabaya mendaftarkan semua pengecer/penyalur pupuk dan obat-obatan Bimas, Inmas serta Non Bimas/Inmas yang nantinya akan dilayani menjadi penyalur resmi di wilayah

²³ Arsip Kota Surabaya No.0207/49/1977, *Permasalahan Bimas dan Penyetoran SPPB* (Box.2.330, No.70.396)

Kotamadya Surabaya. Para penyalur pupuk dan obat-obatan itu antara lain dari P.T.Pertani, Fa Tamansari, C.V.Kertopaten dan C.V.Tulus Karya.²⁴

Perpanjangan ijin usaha mengadakan pembasmian hama di wilayah Kotamadya Surabaya pada tahun 1979, seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh P.T.Setrasari, C.V.Prima dan Fa Kapecon. Diharapkan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang mendaftar sebagai pest controller di wilayah Kotamadya Surabaya, maka masalah hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman pangan sedikit banyak bisa ditanggulangi.²⁵

3. Kebijakan Bidang Pengairan/Irigasi

Air merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penerapan teknologi panca usaha tani secara sempurna juga tergantung dari sarana pengairan yang memadai. Secara garis besar fungsi air bagi tanaman adalah Pertama, sebagai pelarut unsur hara didalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kedua, berperan dalam proses fotosintesis. Ketiga, berperan dalam pembentukan tubuh tanaman. Keempat, untuk mengatur suhu tubuh tanaman.²⁶ Meskipun sebagian besar daerah di Indonesia dianugerahi curah hujan yang menguntungkan, namun air sebagai sumber kehidupan untuk pertanian perlu dilestarikan baik kuantitas dan kualitasnya maupun distribusi dan penggunaannya.

²⁴ Arsip Kota Surabaya No.0207/1061/1978, *Daftar Pengecer Pupuk/Obat-obatan Bimas/Non Bimas/Inmas* (Box.1.672, No.39.080)

²⁵ Arsip Kota Surabaya No.6700/34/1979, *Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pest Control* (Box.1.751, No.44.219)

²⁶ Effendi Pasandaran, *Irigasi di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 145.

Pada musim tanam 1969 di daerah Kecamatan Rungkut untuk areal sawah seluas 925,5 ha, Dinas Pengairan Kotamadya Surabaya memberikan jatah air sebanyak 200 ha. Hal tersebut memang kurang sebanding dengan luas keseluruhan lahan tetapi satu hal yang pasti jenis bibit padi PB 5 dan PB 8 yang ditanam di sawah tidak banyak membutuhkan air. Untuk mencukupi kebutuhan pengairan, pihak Camat Rungkut telah meminjam pompa air dari Dinas Pertanian Kabupaten Surabaya untuk menyedot air Sungai Wonocolo guna menambah dan mencukupi kebutuhan sawah-sawah yang dibimaskan.

Untuk menunjang pelaksanaan program intensifikasi, pembangunan pengairan juga mendapat prioritas dalam hal pembangunan jaringan irigasi baru ataupun rehabilitasi jaringan-jaringan irigasi. Pada tahun 1970, Dinas Pengairan Daerah "Brantas" Mojokerto mengadakan pengangkatan petugas-petugas direksi untuk proyek rehabilitasi irigasi Delta Brantas dan perbaikan tata pengairan di Kotamadya Surabaya dan sekitarnya. Proyek tersebut dikerjakan mulai tahun 1970 sampai tahun 1971 dan mengenai biaya-biaya akibat dari tugas-tugas tersebut akan dibebankan ke dana-dana proyek rehabilitasi irigasi Delta Brantas dan Kotamadya Surabaya.²⁷

Usaha ekstensifikasi (pembangunan jaringan irigasi) di Kotamadya Surabaya pada tahun 1972 salah satunya dilakukan di daerah Kecamatan Karangpilang. Melalui dibangunnya sarana pengairan yang lebih memadai tersebut, diharapkan tanah-tanah yang selama itu hanya merupakan tanah tegalan dan tanah sawah tadah hujan dapat

²⁷ Arsip Kota Surabaya No.P.1/1560/1970, *Penetapan Petugas-Petugas Direksi Proyek Rehabilitasi Irigasi* (Box.1.929, No.49.978)

ditingkatkan menjadi lahan sawah yang berpengairan. Tanah-tanah yang tadinya hanya dapat ditanami pada musim hujan, sekarang dapat ditanami sepanjang tahun, serta dengan diintroduksinya benih varietas unggul yang berumur pendek, para petani dapat meningkatkan penggunaan tanahnya termasuk intensitas penggunaan lahan yang akhirnya akan memberikan peningkatan produktivitas lahan.²⁸

Berhubungan dengan produktivitas lahan, pada tahun 1976 Gubernur Jawa Timur melakukan acara sidak tepatnya di daerah Kecamatan Tandes.²⁹ Gubernur merasa ada sesuatu hal yang menggembirakan karena daerah yang dikunjunginya itu terdapat banyak hamparan sawah dan tidak tandus lagi seperti dulu. Gubernur juga melihat, disana terdapat banyak tandon-tandon dan air untuk saluran irigasi.³⁰

Pengelolaan air yang baik pada pembangunan pertanian tanaman pangan diharapkan bisa efektif di tingkat para petani. Hal tersebut berhubungan dengan pengaturan air di saluran Gunungsari untuk areal pertanian di Kecamatan Tandes pada musim kemarau tahun 1977 yang berkisar 400 liter/detik. Areal pertanian dalam wilayah Kecamatan Tandes saat itu 941 ha. Jika dilakukan penanaman Padi Gadu maka dipastikan akan timbul kesulitan-kesulitan pembagiannya karena tersedot oleh Padi Gadu itu saja, tetapi bila ditanami palawija secara keseluruhan akan memerlukan aliran air sekitar 450 liter/detik.

²⁸ Arsip Kota Surabaya No.6500/75/1972, *Laporan Hasil Pembuatan Waduk di Kecamatan Karangpilang* (Box.2.571, No.79.806)

²⁹ Arsip Kota Surabaya No.6966/V/WU/1976, *Surat dari Pembantu Walikota Surabaya Utara kepada Camat Tandes tentang Intensifikasi Padi Bimas* (Box.2.329, No.70.383)

³⁰ *Gubernur Sudah Melihat Tandes Sudah Tidak Tandus* (Surabaya Post: 4 November 1976), hlm. 2.

Dinas Pengairan Umum Seksi "Brantas" Wonokromo akhirnya meminta kepada para petani yang ada di Kecamatan Tandes untuk musim tanam 1977 menanam palawija, agar aliran air di musim kemarau dapat diatur dan dimanfaatkan secara merata di areal pertanian mereka.³¹ Permintaan itu kemudian disanggupi oleh para petani karena hal tersebut juga menyangkut dengan kepentingan mereka. Jika dipaksakan menanam Padi Gadu, hasilnya pasti akan kurang maksimal sehingga untuk sementara lebih baik menanam palawija.

Pengaturan air musim rendengan (hujan) tahun 1977/1978 di Kotamadya Surabaya sebagaimana yang diinstruksikan Gubernur Jawa Timur kepada Walikota Surabaya bahwa dalam pelaksanaan pembagian pengairan diharapkan adanya penjadwalan yang sesuai untuk masing-masing Kecamatan yang akan diairi agar hasil panen yang diharapkan bisa mencapai target maksimal. Walikota Surabaya kemudian merespon dengan melakukan beberapa kebijakan tentang efisiensi pemanfaatan air, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat diantaranya: Pertama, penyampaian air dari sumbernya ke lahan usaha tani dapat dilakukan secara adil dan merata. Para petani disini mendapat kesempatan untuk melaksanakan usaha tani pada lahan sawahnya guna memperbesar produksi pangan kebutuhan pokoknya. Kedua, penyampaian air dalam jumlah dan waktu yang tepat. Pemberian air dilakukan sesuai kebutuhan tanaman dan tidak diberikan secara berlebihan. Pemberian air dilakukan pada waktu-waktu yang dibutuhkan, tidak dialirkan secara terus-menerus. Ketiga, air yang tersedia pada sawah-sawah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produksi

³¹ Arsip Kota Surabaya No.1.6/181/1977, *Situasi Aliran Air Saluran Gunungsari Untuk Pertanian Kecamatan Tandes* (Box.2.000, No.54.345)

atau pendapatan setinggi mungkin. Teknologi budidaya pemupukan dan komoditi yang diusahakan dilibatkan sesuai fungsinya.³²

Pertengahan tahun 1978, bersamaan dengan program *Tilik Desa* di Kecamatan Karangpilang, Walikota Surabaya melakukan peninjauan beberapa obyek yang menjadi sarana penunjang pembangunan pertanian di wilayah itu, antara lain pembangunan jalan yang bersubsidi dan waduk inpres. Dibagikan pula 54 buah pompa air dan pelaksanaan rehabilitasi enam waduk dari total 39 waduk yang ada di Kecamatan Karangpilang guna menghadapi musim kering/kemarau dan pengairan sawah.³³

4. Kebijakan Bidang Penyuluhan

Pembangunan apapun kegiatannya yang dilaksanakan, pada hakekatnya selalu bertujuan untuk selalu terus menerus memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan manusia maupun bagi seluruh warga masyarakatnya. Pelaksana utama pembangunan pertanian adalah warga masyarakat itu sendiri, yang pada umumnya termasuk golongan yang lemah dalam pemilikan modal, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dikuasainya, serta lemah dalam hal teknologi dan peralatan bahkan sering pula lemah dalam hal semangatnya untuk maju guna meraih kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian terus menerus dikembangkan dalam rangka menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

³² Arsip Kota Surabaya, *Pengaturan Pengairan Musim Rendengan Tahun 1977/1978* (Box.2.400, No.73.358)

³³ *Tilik-Tilik Desa di Kecamatan Karangpilang* (Surabaya Post: 27 April 1978), hlm. 2. Lihat juga *Jadwal Tilik Desa di Surabaya Selatan Ditetapkan* (Surabaya Post: 28 April 1978), hlm.2. Lihat juga Arsip Kota Surabaya No.0207/14/1978, *Musim Paceklik Tahun 1978* (Box.2.205, No.63.783)

dalam proses pembangunan, agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan.

Penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah agar para petani selalu mau dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara otomatis harus dibarengi dengan tenaga-tenaga penyuluh yang handal. Para penyuluh pertanian harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga penyuluhan yang diwakilinya dengan masyarakat sasaran, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sasaran maupun untuk menyampaikan tanggapan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga penyuluhan yang bersangkutan. Melalui penempatan diri pada kedudukan atau posisi seperti itulah, para penyuluh akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atau dalam arti yang lain, mampu menjalankan kebijakan pemerintah atau keinginan lembaga penyuluhan yang bertujuan membantu masyarakat memperbaiki mutu hidup dan di lain pihak para penyuluh memperoleh kepercayaan sebagai tangan kanan yang dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sasarnya.

Mengenai sasaran penyuluhan pertanian sebenarnya tidak boleh hanya terfokus pada para petani saja melainkan seluruh warga masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam pembangunan pertanian. Diantaranya adalah pemimpin setempat yang memiliki kekuasaan mengambil keputusan kebijakan pembangunan pertanian dan sekaligus bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di wilayah kerjanya. Para peneliti sebagai pemasok

informasi/teknologi yang diperlukan oleh para petani baik yang berupa inovasi tentang teknik bertani ataupun pengelolaan usaha tani serta para produsen, pedagang, pengusaha dan konsumen hasil-hasil pertanian.³⁴

Efektivitas penyuluhan yang terjadi di Kotamadya Surabaya dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya dari mutu dan ketrampilan para penyuluh serta dari program penyuluhan dan sarana-sarana yang tersedia untuk melaksanakannya. Untuk memperluas jaringan penyuluhan agar dapat diterima oleh para petani di seluruh Jawa Timur dan di Kotamadya Surabaya sendiri, maka Dinas Pertanian Jawa Timur (bagian publikasi dan dokumentasi) pada tahun 1970 mendirikan Pusat Informasi Pertanian di Wonocolo, Surabaya. Pusat Informasi Pertanian tersebut selain berfungsi sebagai salah satu sarana sumber informasi juga sebagai tempat dokumentasi pertanian, sumber bahan dan pusat kegiatan penyuluhan pertanian serta sebagai tempat rapat tentang perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan pertanian, latihan kerja, kursus, workshop, study tentang pembangunan pertanian dan wisata karya.³⁵

Pusat Informasi Pertanian tersebut sejak berdiri sampai tahun 1975 telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya: Pertama, mengumpulkan bahan-bahan informasi dari Departemen Pertanian, lembaga-lembaga penelitian dari universitas/fakultas pertanian, sumber-sumber baik yang ada di dalam atau di luar negeri, selain itu juga dari masyarakat umum dan masyarakat tani pada khususnya.

³⁴ Totok Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1992), hlm. 37-38.

³⁵ Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Rakyat Jawa Timur No.Dok/2823/I-a tentang "Pusat Informasi Pertanian".

Kedua, mengolah dan menganalisa bahan-bahan informasi sehingga dapat dijadikan bahan penyuluhan untuk para petani dan menampung problem dari masyarakat tani yang perlu dibantu pemecahannya. Ketiga, melakukan penyuluhan kepada para petani dengan media: radio (RRI), film dan publikasi. Dilihat dari keberadaannya terhitung sampai satu dasawarsa sejak pendiriannya maka Pusat Informasi Pertanian tersebut menjadi perantara yang efektif dalam membawakan hal-hal baru antara petugas pertanian dan para petani di lingkungan mereka masing-masing.³⁶

Mengingat usaha peningkatan produksi sangat ditentukan oleh kegiatan para petani, maka Pemerintah Kotamadya Surabaya juga terus berusaha memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para petani agar mereka mampu menggunakan teknologi baru di dalam usaha tani mereka. Pada penyuluhan pengadaan pangan musim tanam tahun 1978 tepatnya bulan Mei, seperti penyuluhan-penyuluhan tahun sebelumnya kegiatan dilakukan di balai Kecamatan/Desa masing-masing daerah. Materi yang disampaikan lebih banyak bersifat informatif, diantaranya kebijakan pelaksanaan pembangunan pertanian seperti kebijakan harga dasar, penyaluran kredit usaha tani, pengalaman petani yang telah berhasil, petunjuk teknis tentang penggunaan alat dan sarana produksi serta dorongan dan rangsangan untuk terciptanya usaha swadaya masyarakat.³⁷

Menyambut Hari Krida Pertanian ke VI tahun 1978 di Kotamadya Surabaya, Menteri Pertanian yang saat itu datang sebagai tamu kehormatan, menilai bahwa

³⁶ Wawancara dengan Bapak Warsidi dan Bapak Edilan (Petani di Daerah Kotamadya Surabaya) pada tanggal 2 Mei 2006.

³⁷ Arsip Kota Surabaya No.021/BM/13.10V/1978, *Penyuluhan Pengadaan Pangan Musim Kemarau 1978* (Box.2.564, No.78.572)

perkembangan pembangunan di bidang pertanian pada umumnya sebagaimana yang dirasakan saat itu sudah dapat dikatakan berhasil walau belum sepenuhnya. Bidang pengadaan pangan keberhasilannya sungguh dirasakan terutama setelah ditunjang oleh tanaman-tanaman padi jenis baru.³⁸

Usaha intensifikasi Bimas/Inmas dirasakan peningkatannya sehingga pendapatan para petani serta kesempatan kerja sebagai akibat dari keberhasilan penanaman padi dapat dinikmati oleh rakyat banyak terutama oleh para petani. Selain itu upaya yang telah dirintis dalam melestarikan sumber daya alam dengan segala pengaturannya harus diimbangi dengan adanya sikap mawas diri dan hasil yang telah dicapai untuk masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi.

Acara yang berlangsung selama satu bulan (18 Juni-18 Juli) tersebut ditutup oleh Walikota Surabaya dengan pemberian penghargaan kepada 11 orang petani berprestasi. empat desa berprestasi dalam program Bimas dan Inmas turut juga mendapatkan penghargaan dalam bentuk bibit padi VUTW diantaranya Desa Pakal Kecamatan Tandes menerima empat kwintal, Desa Pagesangan Kecamatan Wonocolo menerima tiga kwintal, Desa Made Kecamatan Karangpilang menerima dua kwintal dan Desa Rungkut Tengah Kecamatan Rungkut menerima satu kwintal bibit padi.³⁹

Sesuai dengan kenyataan-kenyataan empiris diatas, pemahaman tentang peranan penyuluhan pertanian di dalam proses pembangunan pertanian sudah selayaknya untuk tidak lagi dipandang sekedar sebagai faktor pelancar tetapi justru

³⁸ *Peringatan Hari Krida Pertanian Tonjolkan Sikap Mawas Diri* (Surabaya Post: 21 Juni 1978), hlm. 2.

³⁹ *Petani-Petani Kotamadya Surabaya yang Berprestasi Mendapat Penghargaan* (Surabaya Post: 22 Juli 1978), hlm. 2.

sebagai aktor yang perlu mendapat perhatian terbesar di dalam proses pembangunan pertanian. Pemahaman tersebut tidak berarti bahwa penyuluhan pertanian merupakan satu-satunya upaya yang akan menjamin keberhasilan pembangunan pertanian tetapi perannya disitu hanyalah salah satu perubah yang tanpa tersedianya inovasi, kemudahan kredit dan penyediaan sarana produksi yang memadai tidak akan menjamin keberhasilan pembangunan pertanian.

5. Kebijakan Bidang Perkreditan

Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi disadari masih sering menghadapi permasalahan di bidang permodalan. Untuk membantu para petani agar mereka dapat menerapkan paket teknologi panca usaha tani secara lengkap, pemerintah mengusahakan sistem dan prosedur pemberian kredit yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan penyederhanaan prosedur kredit Bimas, sehingga dapat dijangkau oleh para petani kecil.⁴⁰

Realisasi penyaluran kredit Bimas padi untuk wilayah Kotamadya Surabaya dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Untuk lebih lengkapnya tentang laporan realisasi kredit Bimas musim tanam 1970/1971-1979 di Kotamadya Surabaya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

⁴⁰ Bustanil Arifin, *op.cit.*, hlm. 197.

Tabel 10
Realisasi Kredit Bimas Musim Tanam
1970/1971-1979 di Kotamadya Surabaya (Per 31 Maret 1981)

No	Kecamatan	Tahun Realisasi (Rp)					
		1970-1971- 1976-1977	1977 (Gadu)	1977-1978	1978 (Gadu)	1978-1979	1979 (Gadu)
1	Gubeng	5.092.765	-	-	-	-	-
2	Tambaksari	6.014.058,75	297.520	823.910	-	467.220	383.932,50
3	Sukolilo	103.189.110,65	4.020.060	9.563.557,50	5.745.895	6.626.117,50	4.183.935
4	Rungkut	65.165.583,60	697.702,50	4.209.905	2.430.345	5.635.615	10.883.956,25
5	Wonocolo	89.979.613,35	4.078.222,50	4.347.725	4.430.415	6.050.690	5.974.170
6	Karangpilang	81.333.893,50	714.095	18.182.122,50	-	15.806.507,50	1.249.560
7	Tandes	55.114.270,50	-	12.048.197,50	-	6.367.457,50	-
	Jumlah	405.889.295,60	9.807.600	49.175.117,50	12.606.655	10.953.807,50	22.675.553,75

Sumber: Arsip Kota Surabaya, *Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit Bimas Musim Tanam 1970/1971-1979/1980 bagian bulan Maret 1981* (Box.1.751, No.42.556)

Keterangan: (*) Tahun 1970/1971-1976/1977, 1977/1978, dan 1978/1979 adalah waktu musim rendengan/penghujan.

(*) Tahun 1977, 1978, dan 1979 adalah waktu musim gadu/kemarau.

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui, bahwa musim tanam padi tahun 1970/1971-1976/1977 untuk realisasi kredit pertahun jika dirata-rata mencapai Rp 57.984.185,23. Secara keseluruhan realisasi kredit Bimas untuk musim rendengan dari tahun 1970/1971-1978/1979 mengalami penurunan karena para petani khawatir akan bencana banjir yang sewaktu-waktu menimpa sawahnya. Sedangkan realisasi kredit Bimas untuk musim gadu dari tahun 1977-1979 mengalami kenaikan karena pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi mulai diintensifkan oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya. Untuk total anggaran keseluruhan realisasi kredit Bimas musim tanam 1970/1971-1979 di Kotamadya Surabaya mencapai Rp 541.107.829,35.⁴¹ Di dalam perkembangannya mengenai tunggakan yang dilakukan

⁴¹ Arsip Kota Surabaya, *Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit Bimas Musim Tanam 1970/1971-1979/1980 bagian bulan Maret 1981* (Box.1.751, No.42.556)

oleh para petani saat mengikuti program Bimas oleh pemerintah Kotamadya Surabaya telah dilakukan pemutihan tunggakan terutama yang berada di bawah tahun 1980.⁴²

Sehubungan dengan program Bimas, para petani di Kecamatan Gubeng mulai tahun 1976 sudah tidak lagi mengikuti program tersebut karena lahan sawahnya banyak yang berkurang untuk pembangunan pemukiman penduduk. Kecamatan Tandes untuk musim gadu tidak melakukan penanaman padi karena jaringan irigasi tidak mencukupi. Sebagai gantinya, para petani di Kecamatan Tandes menanam palawija. Pada tahun 1978 terlihat hanya beberapa kecamatan yang mengikuti program Bimas karena pada tahun itu Kotamadya Surabaya mengalami masa paceklik dan antisipasi Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelaparan adalah menghimpun bantuan dan mensubsidi daerah yang dianggap kritis seperti Kecamatan Karangpilang, Sukolilo dan Rungkut.

B. Kebijakan Diversifikasi Usaha Tani

Usaha penganekaragaman usaha tani/diversifikasi usaha tani mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi tingkat ketergantungan pada satu jenis komoditi tanaman yang diusahakan serta untuk menekan resiko kegagalan. Melalui adanya usaha tersebut, selain resiko kegagalan dan tingkat ketergantungan dalam usaha tani dapat ditekan, maka intensitas penggunaan lahan maupun tenaga

⁴² Wawancara dengan Bapak Ketang Satria (Pegawai Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya) pada tanggal 24 Maret 2006.

kerja juga dapat ditingkatkan sehingga areal panen produksi meningkat yang akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan para petani.

Diversifikasi menurut Bustanil Arifin dibedakan menjadi dua yaitu diversifikasi horisontal dan diversifikasi vertikal. Di dalam diversifikasi horisontal harus ditumbuhkan kesediaan para petani produsen untuk menanam berbagai tanaman di lahan yang dikuasai dengan tetap memperhatikan prinsip ketergantungan terhadap penggunaan sumber daya alam dan sosial ekonomi setempat (berkaitan dengan produksi). Di dalam diversifikasi vertikal lebih ditekankan pada masalah penanganan lepas panen sejak dari tahap proses, perdagangan sampai pada tahap konsumsi.⁴³

1. Diversifikasi Horisontal

Pelaksanaan diversifikasi usaha tani pada periode 1969-1979 di Kotamadya Surabaya pada umumnya bersifat vertikal, mengingat lahan pertanian di Kotamadya Surabaya tidak seluas daerah-daerah disekitarnya seperti Sidoarjo, Mojokerto dan Kabupaten Surabaya (Gresik). Perlu diingat juga, walaupun diversifikasi vertikal lebih banyak dilakukan tetapi satu hal yang berhubungan dengan diversifikasi horisontal pernah sukses dilakukan pada pertengahan tahun 1976. Saat itu di daerah Kecamatan Karangpilang dibuat suatu proyek mekanisasi pengolahan tanah kering untuk mencapai empat aspek peningkatan diantaranya: Pertama, peningkatan

⁴³ Bustanil Arifin. *op.cit.*, hlm. 212.

penyediaan pangan. Kedua, peningkatan taraf hidup para petani. Ketiga, peningkatan penyediaan lapangan kerja. Keempat, pembangunan di bidang pertanian.⁴⁴

Pada umumnya proyek mekanisasi tersebut (tanah pertanian sawah tadah hujan) meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, penggunaan traktor dan peralatan berat untuk pembukaan lahan dimana tenaga manusia atau hewan tidak akan memadai. Kedua, mekanisasi dalam mempersiapkan lahan dan panen di wilayah tropis terdapat kemungkinan tumpang gilir/tumpang sari.

Sawah tadah hujan pada musim kemarau sebelum dilakukan penanaman haruslah dibuka supaya tanahnya mengalami proses pengasaman yang sempurna sehingga dapat mematahkan kehidupan hama beluk dan mempercepat musim tanam padi kurang lebih menjadi dua bulan.

Proyek mekanisasi dengan sebutan sawah tadah hujan tersebut pertama-tama mengerjakan luas areal lahan 125 ha dari seluruh 3.000 ha lahan yang telah disediakan. Tujuan proyek tersebut adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus menambah penghasilan para petani. Pada saat pengerjaan bisa menghasilkan tiga kali panen dimana yang pertama panen padi (Padi Gogo), yang kedua palawija (jagung) dan yang ketiga palawija tumpang sari (jagung dan kacang hijau).⁴⁵

Sistem yang dikerjakan sebelum adanya mekanisasi tersebut, pada saat panen padi (satu kali/tahun) rata-rata menghasilkan 17,6 kwintal atau hanya setara Rp 35.872/ha. Saat menggunakan sistem mekanisasi, para petani menghasilkan Rp

⁴⁴ *Mekanisasi Pengolahan Tanah untuk Mencapai 4 Aspek Peningkatan* (Surabaya Post: 5 November 1976), hlm. 2.

⁴⁵ Danarti Sri Najiyati, *Palawija Budidaya dan Analisis Usaha Tani* (Jakarta: Penebas Swadaya, 1992), hlm. 5. Pada metode ini, waktu tanam dilakukan bersamaan, demikian pula waktu panennya. Karena terdapat tanaman lain, maka jarak tanam jagung harus lebih lebar.

227.928/ha selama setahun. Mengenai masalah ongkos penggarapan tanah, menggunakan sistem tradisional memakan biaya Rp 90.000/ha (tenaga manusia dan hewan), dengan sistem mekanisasi tersebut hanya memakan biaya Rp 25.000/ha. Jadi bisa disimpulkan, pendapatan para petani dengan adanya proyek mekanisasi tersebut untuk tahap awal dengan luas lahan 125 ha x 227.928 = Rp 28.491.000 dan dikurangi Rp 3.125.000 untuk pengembalian kredit pengolahan menjadi sekitar Rp 25.366.000/tahun.

Proyek mekanisasi tersebut juga menjadi dasar bagi terlaksananya program pertanian terpadu/usaha tani idaman (pembangunan bersubsidi) yang berlangsung di Desa Sambikerep Kecamatan Karangpilang tahun 1976/1977. Pada tahun 1978/1979, lokasinya diperluas untuk Kecamatan Karangpilang dan Kecamatan Tandes.⁴⁶

2. Diversifikasi Vertikal

Pelaksanaan diversifikasi vertikal di Kotamadya Surabaya sebenarnya merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam usaha penyediaan pangan musim panen padi rendengan tahun 1973, Kotamadya Surabaya diberi jatah harus memasukkan sebanyak 1.555 ton gabah kering giling. Luas areal Bimas Kotamadya Surabaya sekitar 3.100 ha. Para peserta Bimas harus menyetorkan gabah sebanyak 500 kg/ha. Di dalam perkembangannya target dapat terpenuhi dan untuk masalah harga serta setoran gabah diserahkan

⁴⁶ Pembangunan bersubsidi dapat dijabarkan sebagai pembangunan yang semua anggarannya ditanggung oleh pemerintah. Arsip Kota Surabaya No.Sosek/Pem/2070/XV.b., *Pertanian Terpadu/Model Usaha Tani Idaman* (Box.1.976, No.51.892)

sepenuhnya kepada lembaga-lembaga pemasaran seperti BUUD/KUD setempat yang telah ditetapkan harga dasarnya oleh Bulog.⁴⁷

Di dalam mensukseskan usaha penyediaan beras/pangan tahun 1974, baik untuk stok nasional maupun untuk pasaran umum di Jawa Timur, Gubernur meminta kepada semua Bupati/Walikota di wilayahnya untuk bertindak jangan sampai terjadi tidak ada pembelian padi/gabah/beras oleh BUUD dan penggilingan seandainya harga padi/gabah/beras sama atau lebih rendah dari harga dasar. Untuk itu semua pejabat yang berkecimpung dalam usaha penyediaan diminta senantiasa mengadakan operasi/pengecekan terhadap harga padi/gabah/beras di pasaran umum. Sehubungan dengan itu Walikota Surabaya meminta kepada pihak BRI cabang dan lembaga perkreditan daerah untuk menyediakan kredit pada BUUD tepat waktu dalam jumlah uang yang diperlukan. Pelaksanaannya saat itu berupa kegiatan/aktivitas pembelian pangan dengan mempertahankan prinsip, pembayaran dilakukan oleh BRI secara langsung pada petani penjual padi/gabah/beras. Saat ramai-ramainya panen, BUUD diberi kewenangan memegang keuangan dari BRI dengan syarat adanya saksi dari Kepala Desa dan juga jaminan bahwa uang itu benar-benar dibelikan padi/gabah.

Perkembangan mengenai kontrak beras melalui padi/gabah yang saat itu dihadapi oleh penggilingan, terdapat suatu penyelesaian dimana untuk pembayaran padi/gabah yang telah terkumpul di penggilingan bisa dijual kepada BUUD dengan harga kering giling Rp 41,60/kg kemudian BUUD menjualnya kepada Dolog (Depot

⁴⁷ Arsip Kota Surabaya No.0000/264/1973, *Penyetoran Padi/Gabah Peserta Bimas* (Box.1.938, No.50.317)

Logistik) dengan harga Rp 41,80/kg sedangkan penggilingan padi yang bersangkutan oleh Dolog ditugaskan untuk menggiling gabah itu menjadi beras.⁴⁸

Perkembangan harga gabah/beras dari tahun 1970-1979 di Jawa timur pada dasarnya mengalami kenaikan yang cukup fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini.

Tabel 11
Rata-Rata Harga Gabah/Beras di Tingkat Penggilingan
Tahun 1970-1979

Tahun	Harga (Rp/kg)		
	Jawa Timur	Jawa Barat	Sulawesi Selatan
	Beras	Gabah	
1970	36,31	20,63	16,75
1971	35,11	23,12	19,42
1972	39,13	22,20	18,06
1973	54,79	33,68	30,25
1974	73,15	45,24	46,42
1975	90,18	57,10	57,05
1976	113,72	72,86	69,27
1977	112,49	79,34	72,03
1978	120,78	70,17	77,58
1979	157,10	99,20	93,31

Sumber: Leon A. Mcars, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 619.

Harga beras di Propinsi Jawa Timur selama satu dasawarsa tahun 1970-an walaupun mengalami kenaikan secara fluktuatif tetapi cenderung berada di bawah harga maksimum karena adanya injeksi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mempertahankan harga pasar di Kotamadya Surabaya. Selain itu, perdagangan beras

⁴⁸ Arsip Kota Surabaya No.Ek.IV/4994/5403/Ekum/1974, *Hal-Hal yang Berhubungan dengan Pengadaan Pangan* (Box.1.344, No.28.845)

ke propinsi lain mulai tahun 1974 sudah dibatasi dengan memberlakukan ijin pengangkutan di dalam Propinsi Jawa Timur.⁴⁹

Aktivitas program pengadaan pangan dari tahun ke tahun di Kotamadya Surabaya boleh dibilang memuaskan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kontraktor pengadaan pangan sebutan lain dari BUUD/KUD dan Non BUUD/KUD yang selalu berprestasi atau dengan kata lain selalu memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kotamadya Surabaya. Salah satunya adalah pada musim penyediaan pangan tahun 1978/1979, pemerintah setempat memberikan kontrak kepada BUUD/KUD Karangpilang (Karangpilang, Tandes dan Wonocolo) serta Sukolilo (Sukolilo, Rungkut, Gubeng dan Tambaksari) sebanyak 50.000 kg beras dan memberikan kontrak kepada Pabrik Beras (Non BUUD/KUD) Kedurus dan Sumber Baru masing-masing sebanyak 100.000 kg beras. Jadi total beras yang bisa digunakan untuk stok nasional berjumlah 250.000 kg beras.⁵⁰ Jumlah tersebut kemudian ditambah dengan hasil dari daerah-daerah Jawa Timur lainnya yang ditujukan untuk daerah-daerah defisit beras di Indonesia. Berikut gambaran jalur pengiriman beras dari Propinsi Jawa Timur ke beberapa propinsi di Indonesia yang mengalami defisit beras pada tahun 1978.

⁴⁹ Leon A. Mears, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), hlm. 267.

⁵⁰ Arsip Kota Surabaya No.032/13-edv/1978, *Pelaksanaan Pengadaan Pangan tahun 1978/1979* (Box.1.976, No.51.897). Lihat juga Arsip Kota Surabaya No.0207/418/1978, *Keberhasilan Program Pengadaan Pangan tahun 1978/1979* (Box.1.967, No.78.563)

Tabel 12
Pengiriman Beras oleh Bulog dan Swasta
dari Propinsi Jawa Timur tahun 1978 (ton)

Propinsi Asal	Propinsi Tujuan	Bulog	Swasta
JAWA TIMUR	Sumatera Utara	-	1.000
	Lampung	1.000	-
	Sumatera Selatan	5.000	6.000
	Kalimantan Barat	-	3.500
	Kalimantan Selatan	1.500	500
	Kalimantan Timur	-	4.500
	Sulawesi Utara	-	7.500
	Sulawesi Selatan	-	1.000
	Sulawesi Tengah	-	3.000
	Sulawesi Tenggara	750	-
	Jakarta	5.000	-
	Yogyakarta	24.000	-
	Timor-Timor	3.000	-
	Maluku	2.000	-
	Irian Jaya	-	75
	NTB	4.200	500
NTT	24.025	1.000	
Jumlah		70.475	34.075

Sumber: Leon A. Mears, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 559-560.

Tabel di atas menggambarkan arus utama beras antar propinsi selama tahun 1978. Hal tersebut merupakan sebagian dari pemindahan beras yaitu dari daerah surplus (Jawa Timur) ke daerah Defisit. Pengiriman beras dari Jawa timur sebagian besar memang ditujukan untuk menyalurkan kelebihan produksi.

Pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya selama satu dasawarsa dari tahun 1969-1979 pada intinya menuju ke arah yang baik. Sasaran

yang belum tercapai dan masalah baru yang timbul sebagai akibat dari dinamika pembangunan jangan hanya ditelantarkan tetapi harus dipecahkan. Kesemuanya itu haruslah terlaksana secara terpadu, guna mencapai tujuan akhir yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

BAB V

KESIMPULAN

Skripsi ini membicarakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya dari tahun 1969 sampai tahun 1979. Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu:

Pertama, gambaran umum tentang pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya sebelum tahun 1969. Kotamadya Surabaya yang aktivitasnya dominan pada sektor Indamardi juga memperlihatkan keseriusan dalam hal pertanian tanaman pangan. Pada awal tahun 1950-an di Kotamadya Surabaya memperlihatkan suatu ciri khas bentuk pertanian tanaman pangan yang belum terencana dengan baik. Diceritakan juga bagaimana sistem feodal dan pengambilan kebijakan yang agak kontroversial menjadi suatu landasan masyarakat yang berkembang saat itu. Kebanyakan tuan tanah dan petani kaya lebih sering mendominasi pada sektor pertanian tanaman pangan. Belum lagi adanya campur tangan tengkulak dan rentenir dalam mempermainkan harga yang semakin membuat para petani miskin dan petani sedang menjadi terperosok lebih dalam ke sebuah beban penderitaan.

Aksi protes ke pemerintah Kotamadya Surabaya yang dilakukan oleh para petani gurem pada akhir dekade 1950-an sering mewarnai suasana politik yang berkembang di Kotamadya Surabaya. Pada pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, terlihat juga pergantian suatu teknologi dan keahlian yang semakin terencana dengan baik. Konsep Bimas mulai diperkenalkan ke kalangan para petani. Program

ini berusaha melatih kemandirian para petani untuk lebih meningkatkan produksinya melalui bantuan kredit yang diberikan oleh pemerintah. Suatu pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan stabilisasi dijadikan sebagai dasar perkembangan ekonomi pertanian saat itu hingga mulai diterapkannya program Pelita I pada tahun 1969.

Kedua, kendala-kendala pokok yang timbul pada pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya tahun 1969-1979. Dibicarakan kendala-kendala yang sering dialami oleh para petani di Kotamadya Surabaya biasanya diakibatkan oleh banjir, serangan hama wereng, prasarana, sarana, pembuangan limbah industri, lingkungan fisik dan sosial. Bencana banjir dan serangan hama wereng secara bergiliran sering menimpa lahan pertanian sehingga mengakibatkan banyak tanaman padi rusak dan membusuk. Prasarana penunjang pertanian seperti sungai atau waduk meskipun mulai banyak yang dibangun, tetapi proses rehabilitasi pada sungai atau waduk sering juga menemui kendala dalam hal waktu dan biaya. Demikian juga kurang sempurnanya pembuangan limbah industri yang terjadi pada sawah penduduk sehingga mengakibatkan kerusakan pada kelestarian alam. Konflik sosial tentang pungutan liar terhadap para petani juga turut mewarnai kondisi ekonomi pertanian pada akhir dasawarsa tahun 1970-an di Kotamadya Surabaya.

Antisipasi pemerintah Kotamadya Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala pertanian tanaman pangan di wilayahnya pada tahun 1970-an terlihat cukup aktif dan partisipatif. Jika ada wilayah yang terkena serangan hama wereng ataupun banjir, bantuan baik itu uang atau obat-obatan secara kontinue terus diberikan, sehingga bencana seperti kelaparan dapat dihindari sedini mungkin. Pemecahan masalah melalui musyawarah juga dilakukan ketika terdapat peristiwa yang melibatkan warga

dengan pihak luar. Misalnya kasus pembuangan limbah industri dan ganti rugi tanah pertanian untuk pembangunan gedung pendidikan.

Ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan di Kotamadya Surabaya tahun 1969-1979. Dibicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah Kotamadya Surabaya yang diambil untuk meningkatkan produksi pertanian diantaranya kebijakan intensifikasi melalui bidang pembenihan, sarana produksi pupuk dan pestisida, pengairan, penyuluhan dan perkreditan. Kebijakan diversifikasi melalui diversifikasi horisontal dan vertikal.

Pada bidang pembenihan dengan diperkenalkannya bibit unggul baru jenis PB 5 dan PB 8 pada tahun 1969 dan jenis IR 26, 28 dan 30 pada tahun 1975 semakin mendorong laju peningkatan produksi pertanian di Kotamadya Surabaya. Pada bidang sarana produksi pupuk dan pestisida, dengan semakin banyaknya perusahaan penyemprot hama dan pengecer pupuk yang berpartisipasi, membuat masalah hama dan penyakit tanaman yang sering menyerang tanaman pangan di Kotamadya Surabaya sedikit banyak bisa diatasi. Pada bidang pengairan/irigasi, dengan semakin banyak dibangunnya prasarana pengairan maka tanah-tanah yang selama ini hanya merupakan tanah tegalan dan tanah sawah tadah hujan dapat ditingkatkan menjadi lahan sawah yang berpengairan. Pada bidang penyuluhan, pemerintah Kotamadya Surabaya terus berusaha memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para petani, agar mereka mampu menggunakan teknologi baru di dalam usaha taninya. Di samping itu, pemerintah Kotamadya Surabaya juga terus meningkatkan kegiatan informasi pertanian serta mengadakan acara-acara pertanian seperti pekan pertanian. Pada bidang perkreditan, pemerintah Kotamadya Surabaya secara bertahap membantu

para petani dalam penyediaan kredit usaha tani. Realisasi penyaluran kredit bimas dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Bentuk penyaluran kredit ini dilakukan oleh BUUD/KUD melalui BRI di masing-masing cabang daerah.

Pada kebijakan diversifikasi horisontal, ditumbuhkan suatu kesediaan para petani produsen untuk menanam berbagai tanaman palawija di lahan yang dikuasainya dengan tetap memperhatikan penggunaan sumber daya alam dan sosial ekonomi setempat, sedangkan pada kebijakan diversifikasi vertikal lebih ditekankan pada masalah penanganan lepas panen sejak dari tahap proses, perdagangan sampai pada tahap konsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip

- Arsip Kota Surabaya No.107/I/1959. *Pernyataan tentang Pembelian Padi Pemerintah*. Box.2105, No.24.048.
- Arsip Kota Surabaya No.111/I/1959. *Resolusi: tentang kredit dan bantuan alat-alat pertanian bagi kaum tani*. Box.2105, No.57.733.
- Arsip Kota Surabaya No.P.187/BEP/1963, *Penyelenggaraan Pekan Pertanian di Surabaya*. Box.1.156, No.24.048.
- Arsip Kota Surabaya No.782/IX/1966, *Ketentuan Perincian Kredit Bimas Gadu*. Box.1.556, No.34.890.
- Arsip Kota Surabaya No.0400/362/1967, *Penyelewengan Pupuk Bimas oleh Pegawai Pertanian Kecamatan Rungkut*. Box.1391, No.30.170.
- Arsip Kota Surabaya No.012/Pert/XI/1967, *Pembelian Bibit Unggul dan Penyaluran Pupuk*. Box.1391, No.74.913.
- Arsip Kota Surabaya No.0020/Bimas/1968, *Laporan Bimas Kotamadya Surabaya*. Box.1.744, No.42.340.
- Arsip Kota Surabaya No.0000/389/1969, *Perkembangan Pertanian di Daerah Kecamatan Rungkut*. Box.1.780, No.44.032.
- Arsip Kota Surabaya No.P.1/1560/1970, *Penetapan Petugas-Petugas Direksi Proyek Rehabilitasi Irigasi*. Box.1.929, No.49.978.
- Arsip Kota Surabaya No.33/NCP/IV/1972, *Ijin Operasi Pembasmian Hama*. Box.1597, No.36.467.
- Arsip Kota Surabaya No.6500/75/1972, *Laporan Hasil Pembuatan Waduk di Kecamatan Karangpilang*. Box.2.571, No.79.806.
- Arsip Kota Surabaya No.0000/264/1973, *Penyetoran Padi/Gabah Peserta Bimas*. Box.1.938, No.50.317.
- Arsip Kota Surabaya No.Ek.IV/4994/5403/Ekum/1974, *Hal-Hal yang Berhubungan dengan Pengadaan Pangan*. Box.1.344, No.28.845.

- Arsip Kota Surabaya No.6700/167/1974, *Surat Ijin untuk Mengadakan Usaha Pembasmian Hama*. Box.2.240, No.59.798.
- Arsip Kota Surabaya No.733/7/75/Wil.Sel, *Normalisasi Proyek Kalimakmur*. Box.2.404, No.73.566.
- Arsip Kota Surabaya No.79/TPPSP/1975, *Penyimpanan Pupuk di Luar Gudang Resmi*. Box.2.245, No.66.095.
- Arsip Kota Surabaya No.Ek.011.4/574/1975, *Pemberantasan Hama dan Penyakit Tanaman Musim Tanam 1975/1976*. Box.615, No.12.123.
- Arsip Kota Surabaya No.471/XV-B/1976, *Pengembangan IR 26, 28, 30 dalam Rangka Menanggulangi Hama Wereng dengan Virusnya*. Box.2.444, No.75.190.
- Arsip Kota Surabaya No.0089/Bimas/77/Wil.Sel, *Program Intensifikasi Produksi Padi Bimas*. Box.2.000, No.52.986.
- Arsip Kota Surabaya No.0207/49/1977, *Permasalahan Bimas dan Penyeteroran SPPB*. Box.2.330, No.70.396.
- Arsip Kota Surabaya No.1.6/181/1977, *Situasi Aliran Air Saluran Gunungsari Untuk Pertanian Kecamatan Tandes*. Box.2.000, No.54.345.
- Arsip Kota Surabaya No.0207/688/1977, *Persiapan Bantuan Pangan*. Box.2.400, No.73.360.
- Arsip Kota Surabaya No.0207/704/1977, *Pengaturan Pengairan Musim Rendengan Tahun 1977/1978*. Box.2.400, No.73.358.
- Arsip Kota Surabaya No.0207/14/1978, *Musim Paceklik Tahun 1978*. Box.2.205, No.63.783.
- Arsip Kota Surabaya No.032/13-edv/1978, *Pelaksanaan Pengadaan Pangan tahun 1978/1979*. Box.1.976, No.51.897.
- Arsip Kota Surabaya No.0207/328/1978, *Penanggulangan Hama Wereng dan Ulat Tentara di Kecamatan-Kecamatan Karangpilang dan Tandes untuk MT. 77/78*. Box.2.564, No.78.569.
- Arsip Kota Surabaya No.021/BM/13.10V/1978, *Penyuluhan Pengadaan Pangan M.K.1978*. Box.2.564, No.78.572.

Arsip Kota Surabaya No.0207/378/1978, *Serangan Hama Wereng*. Box.2.564, No.78.567.

Arsip Kota Surabaya No.0207/418/1978, *Keberhasilan Program Pengadaan Pangan Tahun 1978/1979*. Box.2.564, No.78.563.

Arsip Kota Surabaya No.Sosek/Pem/2070/XV.b./1978. *Pertanian Terpadu/Model Usaha Tani Idaman*. Box.1.976, No.51.892.

Arsip Kota Surabaya No.0207/1061/1978, *Daftar Pengecer Pupuk/Obat-obatan Bimas/Non Bimas/Inmas*. Box.1.672, No.39.080.

Arsip Kota Surabaya No.6700/34/1979, *Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pest Control*. Box.1.751, No.44.219.

Arsip Kota Surabaya No.7500/54/1979, *Laporan Serangan Hama Wereng*. Box.1.541, No.34.217.

Arsip Kota Surabaya No.260/6800/BUM/1979, *Pencemaran Air Buangan di Sawah Penduduk Desa Kedungharuk Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya*. Box.2.286, No.68.100.

Arsip Kota Surabaya, *Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit Bimas Musim Tanam 1970/1971-1979/1980 bagian bulan Maret 1981*. Box.1.751, No.42.556.

B. Surat Kabar dan Jurnal

Surabaya Post. 4 November 1976.

Surabaya Post. 5 November 1976.

Surabaya Post. 11 Februari 1978.

Surabaya Post. 7 Maret 1978.

Surabaya Post. 27 April 1978.

Surabaya Post. 28 April 1978.

Surabaya Post. 21 Juni 1978.

Surabaya Post. 22 Juli 1978.

Surabaya Post. 8 Januari 1979.

C. Sumber Buku

Abdullah Taufiq. *Perakitan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan untuk Tanah Vertisol*. Malang: Ballitan Malang, 1994.

A.G.Kartasapoetra. *Teknologi Penanganan Pasca Panen*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Bambang Tri Cahyono. *Kebijakan Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

_____. *Masalah Petani Gurem*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

Bechtold, Karl-Heinz.W. *Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.

Booth, Anne. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Bustanil Arifin. *Pangan dalam Orde Baru*. Jakarta: KOPINFO, 1994.

C, Scoot. James. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Danarti Sri Najiyati. *Palawija Budidaya dan Analisis Usaha Tani*. Jakarta: Penebas Swadaya, 1992.

Departemen Penerangan RI, *Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Tahun 1963*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1971.

Departemen Pertanian RI. *Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1989.

_____. *Peta Agroekologi Utama Tanaman Pangan di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1990.

Effendi Pasandaran. *Irigasi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Ensiklopedia Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983.

Ensiklopedia Nasional Indonesia. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991.

- Gottschalk, Louis., *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Imam Suprayitna. *Kiat Sukses Bertani*. Solo: C.V.Aneka, 1996.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 319 tahun 1968 tentang *Rencana Pembangunan Lima Tahun*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1974 tentang *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79*.
- Mears, Leon A. *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982
- Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/1970-1973/1974*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1968.
- Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*. Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980.
- Sjamsu'ed'oeed Sadjad. *Kamus Pertanian*. Jakarta: Grasindo, 1993.
- Soemitro Arintadisastra. *Kebijaksanaan dan Strategi: Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura*. Jakarta: Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1997.
- Totok Mardikanto. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- _____. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1992.



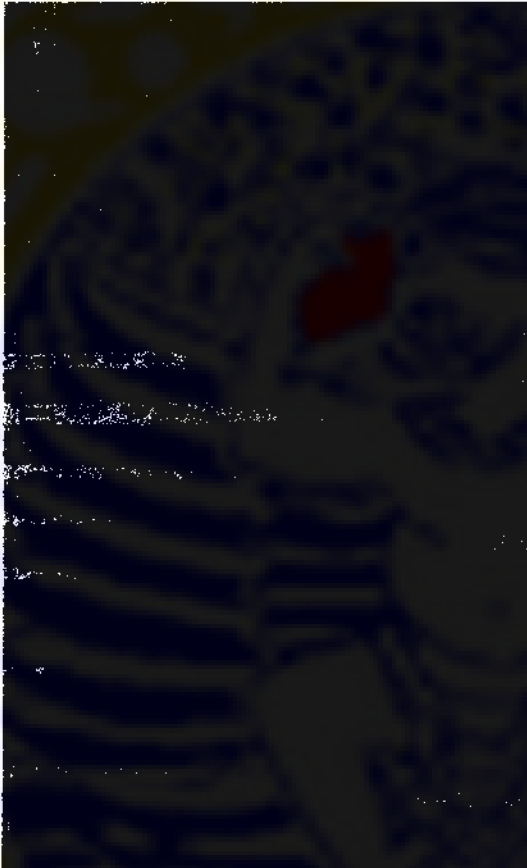
DAFTAR INFORMAN

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ahmad Fajar
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/1 Mei 1955
 Alamat Rumah : Pucangan Gang 6/15 Surabaya
 Umur : 51 tahun
 Pekerjaan : * Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) → Tahun 1976-2005
 * Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Pemantapan Pangan) → Maret 2005
 * Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan) → November 2005-Sekarang.
2. Nama : Ketang Satria
 Tempat/Tanggal Lahir : Malang/10 November 1949
 Umur : 57 tahun
 Alamat Rumah : Rungkut Tengah 3/40 Surabaya
 Pekerjaan : Penyuluh Pertanian → Tahun 1970-Sekarang.
3. Nama : Warsidi
 Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk/9 Desember 1944
 Umur : 62 tahun
 Alamat Rumah : Siwalankerto Gang 2a/15 Surabaya
 Pekerjaan : Petani → Tahun 1971-Sekarang
4. Nama : Edilan
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/30 Januari 1942
 Umur : 64 tahun
 Alamat Rumah : Siwalankerto Gang 3a (Gubug Siwalankerto) Surabaya
 Pekerjaan : Petani → Tahun 1970-Sekarang

Lampiran - Lampiran

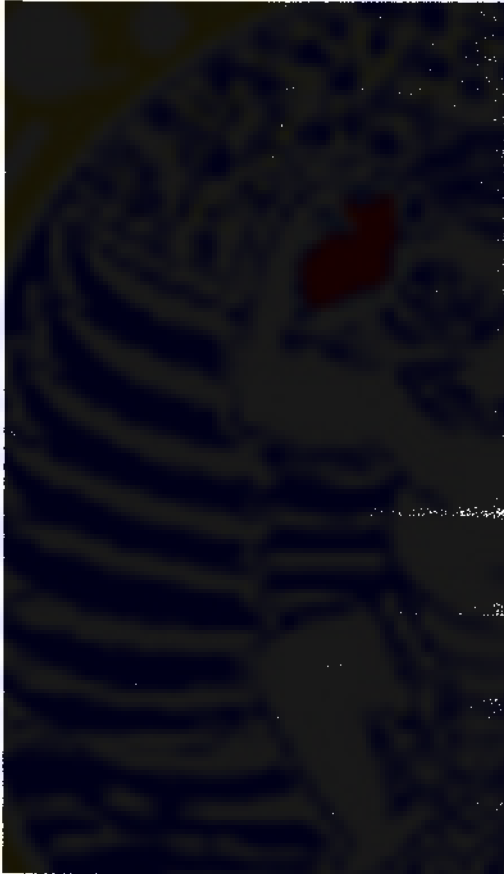
Lampiran 1



Surabaya Post, 4 November 1976.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 2



Surabaya Post, 5 November 1976.

Lampiran - Lampiran

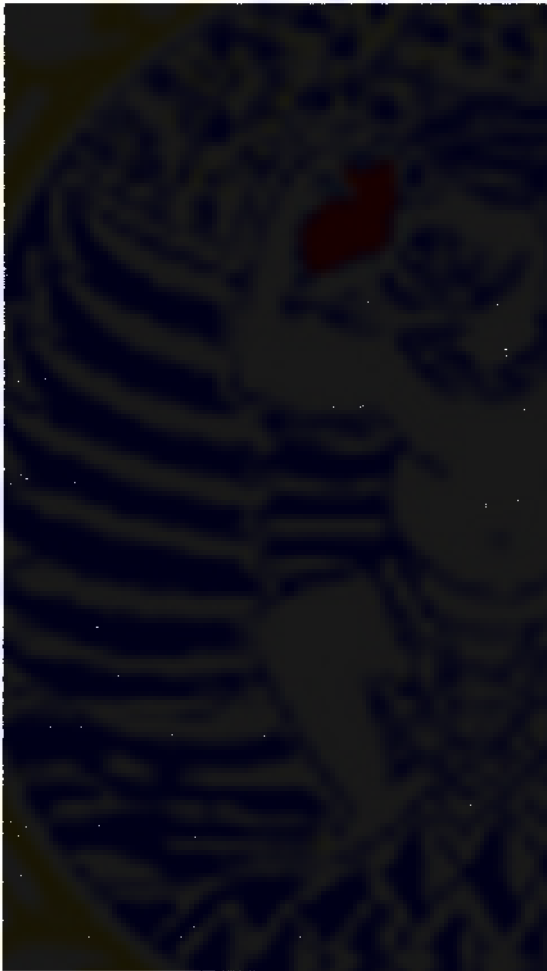
Lampiran 3



Surabaya Post, 11 Februari 1978.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 4



Surabaya Post, 7 Maret 1978.

Lampiran - Lampiran

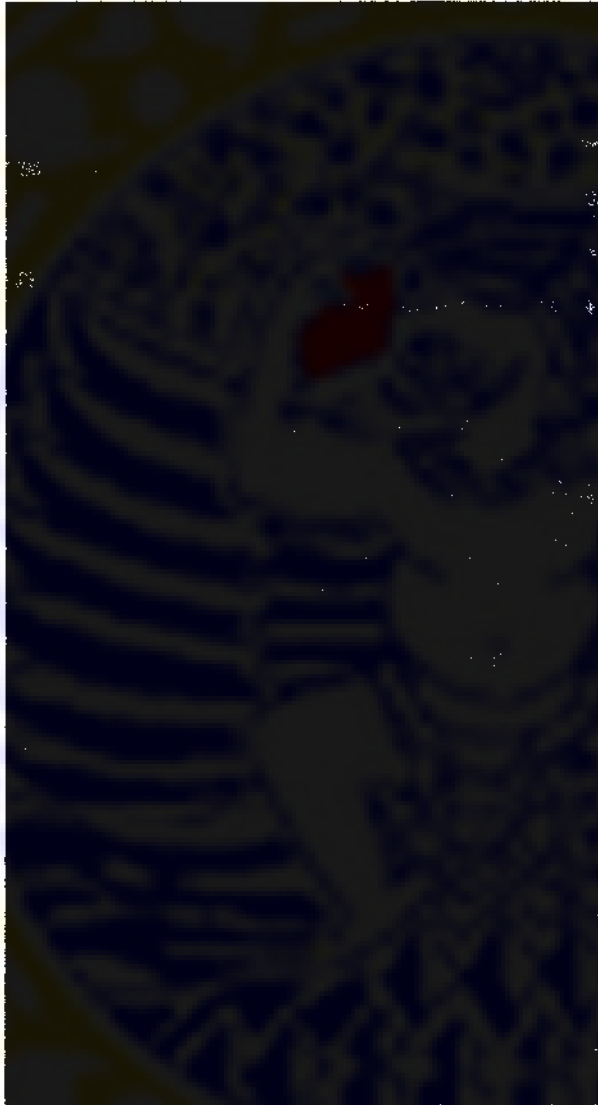
Lampiran 5.



Surabaya Post, 27 April 1978.

Lampiran - Lampiran

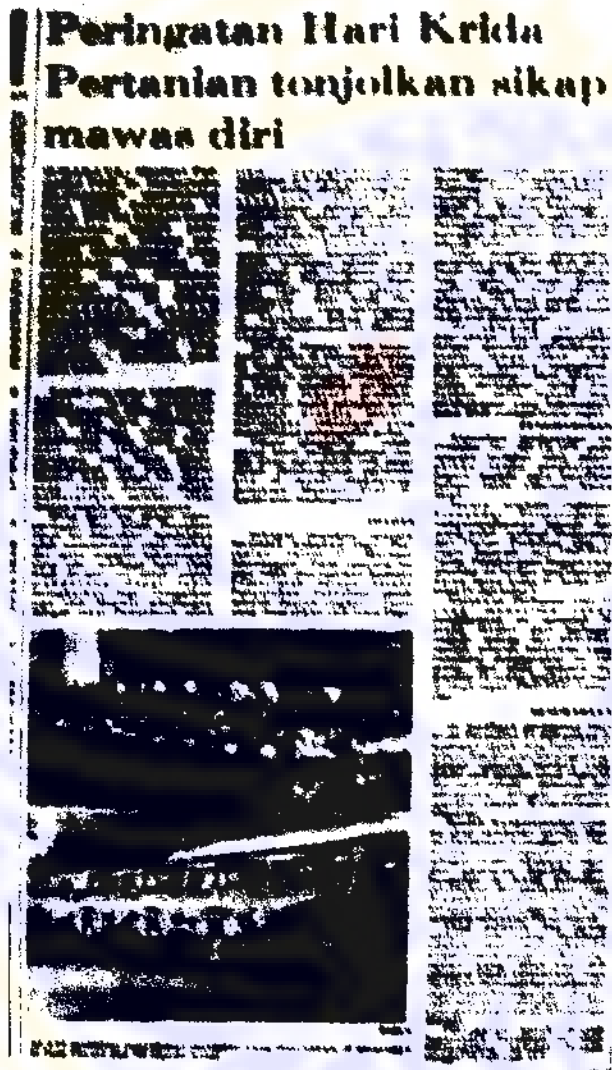
Lampiran 6.



Surabaya Post, 28 April 1978.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 7.



Surabaya Post, 21 Juni 1978.

Lampiran - Lampiran

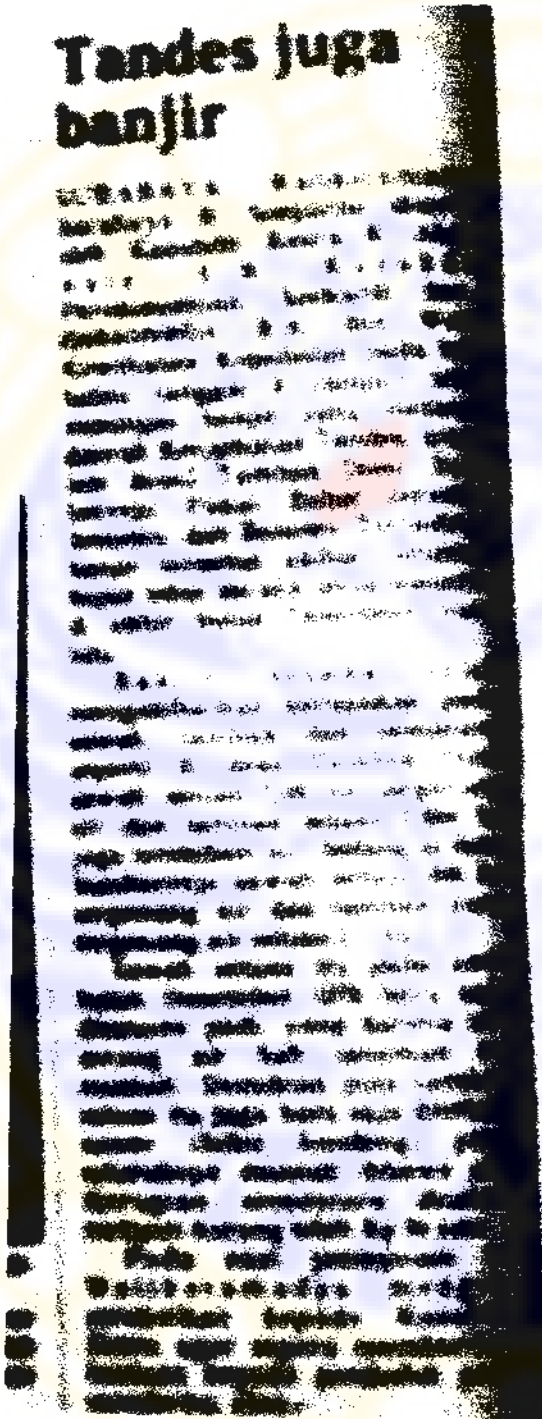
Lampiran 8.



Surabaya Post, 22 Juli 1978.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 9.



Surabaya Post, 8 Januari 1979.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 10

REPUBLIK INDONESIA
SURABAYA
No. 107/1/59.

K e m u d a :
1. Presiden/Pengarah Menteri RI.
2. Menteri Pertanian RI.

P E N U J U T A A N
T e r b u s
P E M B E L I A N P A D I P A S U R A B A J A . -

Berhubung dengan adanya ketentuan Pembelian Padi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah pada tahun yang harus menjadi kejadiannya dan lahan kaum Tani, terutama yang menjadi sasaran pertama dalam pelaksanaan pembelian padi itu ialah Tanahodang dan Tanahodang, demikian itu juga telah diketahui pula banyaknya tanah yang bersedia untuk dipindahtugaskan kepada kaum Tani yang akan sekarang belum berkecukupan. Pemerintah dengan terdapat pembelian padi Pemerintah yang berwujud dan ada di daerah Kabupaten Surabaya untuk memenuhi diarah dari Pemerintah terutama mengenai pelaksanaan pembelian padi yang akan pembelian padi tersebut hanya seratus-tiga ditetapkan kepada Tanahodang dan Tanahodang saja, dan terutama yang ditetapkan oleh tanahodang atau seseorang yang berkecukupan dalam Desa/Pamong Desa. Karena masih ada dan perlakuan sistem feodal di Desa, akibatnya kaum Tani dalam menandatangani tanahnya hanya dengan alat dan pembajakan yang serba kekurangan, oleh karena itu hasil panennya juga tidak dapat memuaskan dan hanya cukup untuk hidup selama-2nya 3 (tiga) bulan saja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih lanjut mereka harus bekerja ke mana-mana untuk mencari nafkah untuk bekerja tidak dari ke-luaran.

Selanjutnya pelaksanaan pembelian padi Pemerintah tersebut juga tidak sedikit yang dialokasikan, yang langsung atau tidak langsung dipergunakan untuk memperlancar keuntungan tanahodang padi/kaum sekuler dan untuk melindungi padi milik tuan tanah dan tanikaja, akibatnya pihak Pemerintah dan kaum Tani yang menderita kerugian dan menjadi korban.

Dalam masa ini Kementerian Pertanian RI Surabaya pada tanggal 14 s/d 15 September 1959 yang mewakili 54520 orang petani, setelah berunding dengan hasil tersebut diatas, berkeinginan dan selanjutnya hendak kearah Kementerian :

1. Djanah pembelian padi Pemerintah pertama-tama supaya diadjudikan kepada Tanahodang dan Tanikaja, adonum hari Tanahodang dan Tanahodang sebagai sukarela.
2. Supaya diadakan pengawasan/kontrol yang keras terhadap penjelewan-kan dengan dibarengkannya sistem tanahodang yang merugikan itu.
3. Bahwa sebagian dari hasil pembelian padi tersebut supaya ditin- ralkan di Desa, untuk dijual/dipindahtugaskan kepada Rakyat kecil pada waktu musim tanam atau waktu menanamkan tanah/awabnya.

Surabaya, 15 September 1959.
DPT. RTI. Surabaya.

Terbuan :

1. Instansi2 Pemerintah Kab. Surabaya,
2. Pimpinan RTI di semua blok.
3. Partai2/Organisasi Desa.
4. Para, untuk dibuat.

(S. A. A. A. A.)

Lampiran - Lampiran

Lampiran 11

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
SURABAYA

No. : 112/1/59.

Surabaya, 15 September 1959

- K e m a d e a.
1. Pdt. Prudhian/Perdana Menteri
 2. Jk. Menteri Pertanian RI.
 3. Jk. Menteri Pertanian RI.
 4. Jtn. Kepala Bank Tani/Melajar Pusat, Jakarta.-

P R O P O S I :
tentang
**KEMINT. DAN PANTUAN ALAI-2
PERTANIAN KAWI KAWI TANI.-**

Pada waktu musim kawa tani kebanyakan pemertanian tanah adalah waktu yang menentukan bagi kawa tani memotong tanah, pada waktu itulah kawa tani menghadapi kawa tani, dan saat itu itulah sangat teras dan tenaga tenaga kawa tani serta alat2 kelengkapan pemertanian tanah yang tidak dapat dipandang lagi paku-paku dan sebagainya "kawa tani" seperti kawa tani, paku-paku, teras kawa tani pemertanian untuk pemertanian kawa tani ini teras kawa tani dalam pandangan dari tujuannya di listabdarat pemertanian kawa tani tidak ringan teras kawa tani, di teras kawa tani pemertanian kawa tani dapat dikatakan "kawa tani" pemertanian di tujuannya dan di listabdarat. Sebagai hal ini dari pihak pemertanian telah berusaha untuk pemertanian jawa telah dikolaborasi kawa tani dan Melajar No. 12/56, tetapi pemertanian kawa tani di dalam pemertanian kawa tani terutama pemertanian dan Tani tidak akan dapat pemertanian, karena pemertanian di listabdarat kawa tani dan Tani (badan pemertanian) yang suka di kontrol pemertanian pemertanian dengan kawa tani yang pemertanian kawa tani kawa tani pemertanian kawa tani lainnya.

Perdasarkan pendapat dan keterangan2 tersebut diatas, maka Kementerian Pertanian RI Surabaya yang mewakili GUKSO akan membuat rencana pemertanian pemertanian dan pemertanian kawa tani.

1. Mendesak kepada Pemertanian untuk pemertanian pemertanian kawa tani dan Melajar jawa pemertanian dengan pemertanian kawa tani pemertanian pemertanian dan pemertanian kawa tani.
2. Mendesak kepada Pemertanian untuk pemertanian/pemertanian alat2 pemertanian, bibit, rekam dll. yang telah pemertanian kepada kawa tani pemertanian pemertanian dan pemertanian.

Surabaya, 15 September 1959
DPEK-2 PPI, Surabaya.
Pemerintah Sidang,

bertujuan kepada Jtn.:

1. Instansi2 Pemertanian kawa tani Surabaya.
2. Koordinator Panitia Badan Pemertanian kawa tani.
3. DPP, PPI, Jakarta.
4. DPEK-2 PPI, Djawa Timur.
5. DPEK-2 PPI Melajar kawa tani, Surabaya.
6. Partai-2 dan Badan Pemertanian.
7. Perm. untuk dituat.

[Handwritten signature]
(Pemerintah Sidang)

Lampiran - Lampiran

Lampiran 12

PERUSAHAAN

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRIKULTUR
KANTOR PUSAT

No.P.187/BEP/1963.

Djakarta, 10 Mei 1963.-

Lampiran :

Perihal : Penjelenggaraan
pekan pertanian
di Surabaya.-

Kepada
JH. Soetjipto Ketua Perikanan
di
SURABAYA.

K A T A M A

Memujuk surat kend tgl.23 April 1963 No. P 142/BEP/63, dengan ini memberi tahu bahwa sesuai dengan isi dari surat tel., maka No.2 harus dibayar sebagai berikut:

2.) Agar Departemen Perikanan + Perhutani + Kotapradja dibebankan Rp. 1.705.000,- dan P.P.N. Rp. 1.500.000

berupa cek/citra pembagian beban keuangan menurut surat adr. tgl. 19 April 1963 No. 102/1 R/63 menjadi:

	Tempat Penerimaan.	Tempat Penerima di
Kotapradja Surabaya	Rp. 750.000,-	Rp. 250.000,-
P.P.N.	" 750.000,-	" 750.000,-
Perhutani	" 225.000,-	" 225.000,-
Perikanan	" 100.000,-	" 100.000,-
Perikanan Darat	" 100.000,-	" 100.000,-
Perikanan Laut	" 100.000,-	" 100.000,-

Jumlah: Rp. 1.625.000,- Rp. 1.620.000,-

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRIKULTUR

u.h.

Ketua Biro Ekonomi dan Perencanaan,

td.

Pembutan :

1. Kabinat Menteri.
2. Pomb. Menteri Bidang Perikanan.
3. Bagian Keuangan.
4. P.P.N.
5. Perhutani.
6. Perikanan.
7. Perikanan.
8. Djawatan Perikanan.
9. Djawatan Kehutanan.
10. Djawatan Perikanan Darat.
11. Djawatan Perikanan Laut.
12. Arsip.
13. Perintani.

(Soetjipto)-

Miturus sesuai
dengan aslinya oleh:

(Muljani)-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 13

DINAS PERTANIAN RAKJAT
KABUPATEN SURABAYA

Surabaya, 25 Agustus 1966.

Keputusan

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Djawa Timur
selaku:
Kepala Staf Kopel Bimas Propinsi
Djawa Timur.

No.
Lampiran: -
Perihal: Ketentuan prinjisa
kredit Bimas gadu.

Bersama ini memberi tahu dengan hormat, bahwa ketentuan prinjisa kredit bimas gadu sebanyak Rp. 750.000.- tiap Ha. untuk Kabupaten Surabaya tetap berpedoman pada keputusan rapat Komando Pelaksanaan Bimas Dati I Djawa Timur tgl. 30 - 4 - 1966, yaitu sebagai berikut:

Pupuk	"	341.--
Bibit	"	50.--
Obat-obatan	"	2.--
Pengairan	"	15.--
Cost of living	"	282.--
Management fee	"	60.--

D j u m l a h Rp. 750.-- (u.b.)

Untuk bibit dan cost of living mengharap dengan sangat agar dapat diberikan dalam bentuk uang.

Luas areal bimas gadu Kabupaten Surabaya + Kotamadya adalah 1.271 Ha., sehingga kebutuhan uang untuk:

bibit 1.271 x Rp. 50.- = Rp. 63.550.- (u.b.)
cost of living 1.271 x Rp. 282.- = " 358.422.- (u.b.)

D j u m l a h Rp. 421.972.- (u.b.)

Uang jaag telah kami terima dari Propinsi adalah Rp. 317.750.- (u.b.).

Djadi untuk penggantian pembelian bibit dan biaya penggarapan masih kurang Rp. 104.222.- (u.b.)

Mengingat kebutuhan para petani jaag sangat mendesak pada saat ini, maka kami mohon dengan hormat agar kekurangan uang penggantian pembelian bibit dan biaya penggarapan segera dikeluarkan.

Untuk pembrantasan hama, terutama tikus jaag pada saat ini, mulai mengadakan serangan pada padi gadu bimas, maka kami mohon dapat saja diberi zink phosphide untuk tiap Ha ± 0,1 Kg. Djadi untuk 1.271 Ha. ± = 127,1 Kg.

Kemudian atas perhatian Bapak Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Djawa Timur, kami mengutjapkan banjak terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Surabaya,
selaku:
Kepala Staf Kopel Bimas Kab. Surabaya
(Ir. ANIKNO)

TEMBUSAN Kepada:

1. Jth. Bp. Pembantu Kepala Dinas Pertanian Rakjat Prop. Djawa Timur di MUDJOKERTO;
2. " Bp. Bupati, Kepala Daerah Kab. Sbbaja selaku Komandan Kopel Bimas Kat. Sbbaja;
3. " Bp. Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Sbbaja selaku Komandan Kopel Bimas Kotadya Surabaya;

Lampiran - Lampiran

Lampiran 14

Surabaya, 2 Oktober 1967.-

Surabaya, 2 Oktober 1967.-

Kepada:
Jh. Bapak Gubernur, Kepala Daerah
Propinsi Djawa Timur
Melalui Kopel Binro Prop. Djatin

Kepada:
Jh. Bapak Gubernur, Kepala Daerah
Propinsi Djawa Timur
Melalui Kopel Binro Prop. Djatin

Darihal : penjeleweangan pupuk
Urea oleh Sdr. Doel-
hadi, pegawai Perta-
nihan Ketjamatan Rang-
kut.-

Sesungguhnya diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal 5 September 1967 telah diketahui terdijadiny penjeleweangan pupuk Urea sebanyak 12,5 ton oleh Sdr. Doelhadhi, Pegawai Pertenihan Ketjamatan Rangkut. Adapun yang bersangkutan telah dituntut waktu sampai tgl. 20 September 1967 untuk menjeleweangkan/ mengembalikan pupuk tersebut, akan tetapi kesempatan itu telah tidak dipergunakan olehnya, maka pada tgl. 21-9-1967 Sdr. Doelhadhi telah kami serahkan kepada Pihak Kepolisian Komers 1014 dan hingga kini telah berlingkuk dalam tindakan, menunggu pengusutan lebih lanjut.

Tersebut diketahui, bahwa pupuk Urea tersebut adalah diperantukkan Primer 2 Koperta:

1. desa Kelirungkut = 4 ton
2. " Tonggilis = 3 "
3. " Sununganjar = 3 "
4. " Kropen = 2,5 "

Jumlah: 12,5 ton

guna kepentingan dan penyiapan lahan Bina Gada 1967 seluas 125 ha.

Dengan adanya penjeleweangan pupuk tersebut yang ternyata dijual luar kepada seorang pedagang di Medjokerto, maka 4 desa yang bersangkutan telah dirugikan dan tanahnya seluas 125 ha. penyekanya tidak jadi di-bimaskan.

Adapun luas Bina Gada 1967 untuk Kotamadya Surabaya merupakan luasnya menjadi 375 ha.

Demikian surat ini dikirimkan mohon.

En. Salikow, Kepala Daerah Kotamadya
Surabaya

Komandan Kopel Binro

Sehil Komandan,

Tinjauan kembali:

1. Sdr. Panembahan, Kepala Daerah
di Surabaya, (Kopel Binro)

(R.K. Pongko Soeroko) -

Lampiran - Lampiran

Lampiran 15

KEMENTERIAN PERTANIAN
 DEPARTEMEN HORTIKULTURA
 (PERIKANAN)
 KOTAMADYA SURABAYA

Alamat Sekretariat : Dji. Kartung Djaya No-72 Sbj

DE/2.-

No. : 012/Per/11-67.
 Lampiran : -
 Pasial : 1. Bilangan bibit unggul
 dan pengalusan paku.

Surabaya, 6 November 1967.

B E P A N U
 Jth. Wakil Walikota/Kepala
 Daerah Kotamadya Surabaya
 di

K o t a m a d y a S u r a b a j a

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

Assalamualaikum War. Kab.

Bidang ikut serta melaksanakan hasil produksi padi tahun peng-
 garapan 1967/1968 yang sudah dilung pinta dan melaksanakan djeritan
 Rakjat Tani dan pembelian bibit jenis Unggul dan paku, maka bersama ini
 kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Walikota Kepala Daerah Kotamadya
 Surabaya untuk mengizinkan :

- 1) bibit padi jenis unggul untuk para petani dalam daerah
 Kotamadya Surabaya yang terdapat merata.
- 2) Mengaluskan paku yang kelas-2 Jangsung 1 pada para petani
 dengan harga djam lebih rendah dari pasaran bebas.
- 3) Mengadakan pengalusan/pengaluan pada kawasan pengaluranja,
 sehingga tidak menjadi bahan perdagangan spekulasi.

Demikian bersama ini agar pelaksanaan kebijaksanaan yang kami
 maksud diatas dapat terlaksana baik Walikota / Kepala Daerah Kota-
 madya Surabaya. Dem bersama ini pula kami sampaikan terima kasih yang se-
 besar - besarnya.

K e m e n t e r i a n
 Departemen Tjabung " B E P A N U "
 Kotamadya Surabaya

S e k r e t a r i a t

(M. Ja'ub Rokid, Kab.) (Moch. Anwar, Kab.)

Terbuanan kepada :

1. Jth. Bapak Ketua / Bc. Ketua B.P.H.B.C.R. Kotamadya Surabaya.
2. Jth. Para Ketua Komisi-2 B.P.H.B.C.R. Kotamadya Surabaya.
3. Jth. Para Anggota B.P.H. Kotamadya Surabaya.
4. Jth. Bapak Pimpinan Hilajah PERTANI Djawa Timur.
5. Jth. Bapak Pimpinan Partai P.K. Kotamadya Surabaya.
6. Jth. Para Tjarat 5 Kotajatan yang baru untuk Kotamadya Surabaya.
7. Jth. Para Pimpinan Anak Tjabung PERTANI Kotamadya Surabaya.
8. Jth. Semua Pengurus Lembaga PERTANI di Kotamadya Surabaya.
9. S I K E P A N U .-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 16

Majalah, dan ...
Surabaya, 17 Juni 1968

382/A-5

18/6-68-ff

Surabaya, 17 Juni 1968

No. : 0050/STMAS/1968
Jml. : 1 (satu).
Perihal : Laporan ...
Kotamadya Surabaya.-

Ke pada :

1. Gubernur Kepala Daerah

Propinsi Jawa Timur

2.

SURABAYA.-

bersama ini menjumpakan dengan hormat laporan singkat tentang perkembangan BIKAS dan daerah Kotamadya Surabaya sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai penjelasan perlu kami kemukakan disini, bahwa mengenai tunggaaan-2 tab. telah ada kesanggupan dari para petani/koperta yang bersangkutan untuk melunasi pada akhir bulan Djuni 1968 ini, karena tunggaaan-2 itu yang semula diharapkan pengembalian dengan padi/gabai - sekarang oleh pihak P.N. bertani maupun BIKAS want dapat dikembalikan dalam bentuk uang dengan kadar harga - pada/gaban padi. Untuk tahun ini kredit diaku, yaitu harga Rp. 600,- per lintai.

Mengenai BIKAS tahun 1968 ini disontjasikan 350 ha. BIKAS NASIONAL dan 150 ha. BIKAS SW.5 dan telah kami tekankan bagi para petani yang sudah siap pada tunggaaan tidak akan diberi kredit. Pihak lain yang akan pihak petani/kopertabelan ada yang mungkin akan mendapatkan kredit BIKAS SW.5.

Sehingga laporan ini ...

Kotaka, Kepala Daerah

Kotamadya Surabaya

Selaku

Ketua Dewan Pertimbangan

DEWAN PERTIMBANGAN
S U R A B A Y A
KOTA MUDA SURABAYA

INIS

30-18-68-30

KOL. INT. SUR. 10092.

Tindakan :

Disampaikan kepada
Sdr. Pembantu Gubernur
untuk Surabaya. u.n.p.

Kotamadya Surabaya
Kotamadya Surabaya

REKONSTRUKSI DAN PERENCANAAN
DEWAN BIMAS KOTAMADYA SURABAYA

I. Tanggapan BIMAS Gadi th. 1966 :

1. Bonotjolo	Luas 17.338,20	luas 165 ha.
2. Sokolilo	Luas 3.510,20	luas 267 ha.
3. Wanotjolo	Luas 2.537,75	luas 86 ha.
Djumlahlah	Luas 23.386,15	luas 720 ha.

II. Tanggapan BIMAS Ma. th. 1966 / 1967 :

Kategori	Jumlah	Kepadi	Sisa Gajah	Luas ha.
	kg.	kg.	kg.	kg.
1. Wanotjolo	42.874	19.807	23.067	100
2. Rangcut	160.478	54.111	106.367	350
3. Tanah Sese	42.235	18.870	23.365	125
Djumlahlah	245.587 Kg.	92.788 Kg.	152.799 Kg.	675 ha.

III. Tanggapan BIMAS Gadi Taludan th. 1967 :

Kategori	Jumlah	Pengembelian Pokok	Sisa	Sisa dan
	kg.	kg.	kg.	kg.
1. Wanotjolo	90 : 1.031.000 : 4.703 ton	---	1.141.775,80	---
2. Rangcut	125 : 1.341.250 : ---	1.316.000,-	125.250,-	---
3. Sokolilo	125 : 1.341.250 : 34.775 ton	44.901,66	1.296.348,34	25.812
Djumlahlah	340 : 3.713.500 : 44.558 ton	191.901,66	2.564.374,14	25.812

IV. Tanggapan BIMAS Ma. th. 1967 / 1968 :

1. Rangcut 18 ha. terisa pindjaman Rp. 18.543,50 termasuk harga pupuk - 73,5 Rp. (belum ada pengembalian uang).

V. Rencana BIMAS Gadi th. 1968 :

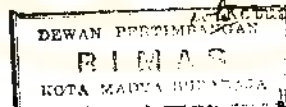
1. Bonotjolo	Bimas Nas. 250 ha.	+ PB.5	- 50 ha.
2. Rangcut	Bimas Nas. 200 ha.	+ PB.5.	- 50 ha.
3. Sokolilo	Bimas Nas. 100 ha.	+ PB.5.	- 50 ha.
Djumlahlah	Bimas Nas. 550 ha.	+ PB.5.	- 150 ha.

Hingga kini belum ada realisasinya, belum ada yang mengadakan .-

Surabaya, 17 JUNI 1968

Walikota, Kepala Daerah K.R.S.

Selaku



Soekoto

Soekoto
KOL. INF. KH. 10000

Lampiran - Lampiran

Lampiran 17

LAPORAN : Perkembangan Pertanian di daerah
Ketjamatan Rungkut.-

Bapak Walikota Jth.

Sebagaimana kita saksikan bersama, maka pada hari ini tgl. 5-8-1969 Kebun Bibit Desa Rungkut ini telah bersama-sama kita tinjau dan dipanen setjara ubinan dengan maksud untuk diketahui baik mengenai keadaan sawahnya, maupun hasil yang didapat dari K.R.B. tersebut.

Sebelumnya perkenankanlah kami setjara ringkas melaporkan perkembangan pertanian khususnya dalam perluasan padi jenis PR.5 PR.8 di daerah Ketjamatan Rungkut.

Bapak Walikota Jth.

Lesuni dengan ~~anajuran~~ dari Bapak Walikota Kepala Daerah - Kotamadya Surabaya dengan surat tgl. 21-8-1968 No.6907/41 yang menentukan bahwa selain Tandes, daerah Ketjamatan Rungkut di tetapkan sebagai daerah industri; namun dalam pertemuan 5 Ketja - kota pada tgl. 28-10-1968 dimana Bapak Walikota telah menentukan kebijaksanaan bahwa 5 Ketjamatan tetap diperlakukan sebagai daerah pertanian dalam rangka pelaksanaan Napolita Pertanian, maka karena itulah Ketjamatan Rungkut menerah perhatian pada masalah perluasan, peningkatan produksi pangan khususnya tanaman PR.5 - PR.8. Karena itu supaya masyarakat dalam penggarapan sawah2-nja berfikir setjara modern dan bekerja yang lebih efficient serta menggunakan tjara usaha pertanian, maka disamping diadakan Mubingam masalah, juga sedang kami usahakan untuk mengadakan pertjanaan pengolahan tanah dengan setjara pen - traktor.

Sebelum pada waktu menghadapi musim gada tahun 1968 kami telah mengajukan pada pemerintah dengan melalui Kementerian 12 Reputa Desa dan ternjate yang mengambil bagian dalam penanaman PR.5 - PR.8 adalah :

1. Kwisari seluas 30 Ha.; 2. Gunungjajar seluas 1,5 Ha. (pertjanaan); dan 3. Tongkilolekaja seluas 1,5 Ha. (pertjanaan). Akibat pelaksanaan pembijanaan Kwisari seluas 30 Ha. mengalami kegagalan, antara lain karena serangan hama putih dan tikus serta gembel air (ngembang) tidak memungkinkan bibit PR.5 - PR.8 di tanam pada sawah yang tergenang air (beda dengan padi jenis lainja), sehingga pertumbuhan kurang memuaskan; disamping itu para petani tidak memenuhi petunjuk dan tjara2 teknis pertanian. Selain dari pada itu PR.5 - PR.8 yang merupakan padi jenis baru, masih belum dikenal oleh masyarakat/berpetjual pandangnya atau tak atjeh dan kurang mendapat perhatianja.

Atas kegagalan penanam PR.5 - PR.8 ini, maka pada musim penanaman tahun 1969/1969 kami mengajukan kebijaksanaan untuk mengadakan pertjanaan2, disamping itu untuk ventjari pengairan juga, memperkenalkan pada masyarakat umumja tentang perkebunan

↳serta

perbandingan PR.5 - PR.8 juga mempunyai daya produksi yang sangat tinggi ini.

Untuk ini kami tunduk 4 desa: 1. Kalirungkut, 2. Rungkut, 3. Gunungjajar dan 4. Pandjanganjawa; masing-masing seluas 2 Ha. untuk dijadikan proyek pertijabaan PR.5 sekali-gus sebagai pertijabaan membuat bibit daerah, yaitu Kebun Bibit Desa. Disamping itu untuk menjangkupi kebutuhan tenaga teknis pertanian di desa-desa dan sebagai persiapan menambah kader2 Teni di desa-desa sebagai pembantu teknis ditingkat Ketjamatan, telah pula kami adakan kursus K.T.D. yang diikuti oleh 20 orang. Disamping itu pula dengan bantuan dana dengan pihak Diperta Ketjamatan Rungkut telah kami adakan penerangan kepada desa-desa untuk memberi pengertian pada penduduk dalam menghadapi pelaksanaan Bimas Gotong-Rojong Hoechst untuk musim gandum th. 1969, dan ternyata penduduk mulai sadar dan mengerti tujuan menambah produksi pangan dalam Repelita ini dan mempunyai ketetapan hati, bahwa PR.5 - PR.8 akan dapat ditjapai hasil yang diharapkan, melihat konjungsi2 dalam pertijabaan K.T.D. yang telah diadakan.

Semua fikiran penduduk diternakan dan berbisnis pada sistem kreditnya saja, namun setelah difahami syarat2 Kredit dari Bimas Gotong-Rojong Hoechst kini ternyata rakyat telah mengambil bagian ikut mem-Bimas-kan sawahnya, semua dengan luas ... 625,0 Ha; jenis PR.5 558,5 Ha., dan jenis nasional = 165 Ha. Komunitas manusia yang satu desa yang terorganisasi dan diterima oleh Diperta Kabupaten Surabaya ialah desa Rungkuttenah seluas 52 Ha. sehingga keseluruhan Bimas Gotong-Rojong Hoechst dalam daerah ketjamatan Rungkut adalah 925,5 Ha.; jenis PR.5 seluas 745,5 Ha. dan jenis Nasional seluas 180 Ha.

Sebagai perbandingan sementara, maka hasil panen ubin-ubian PR.5 di Gunungjajar (yang telah dipanen tgl. 19-5-1969) men- tjapai hasil 5.500 Kg. (kotor) gabah, hasil kurang dari 6000 Kg. ini disebabkan karena terserang hama sundop, sedangkan hasil ubin-ubian di desa Kalirungkut adalah 5.000 Kg. (kotor) gabah, disebabkan mengalami perobahan teknis akibat bendjir, walang-mengit dan sundep. Adapun K.T.D. desa Rungkutidul menghasilkan 5.600 kg. Bapas Walikota Jia.

Yang penting disini kami laporkan ialah mengenai : -
GEMPAH, yaitu Gemapan, Rabuk, Bibit, Air dan Hama; mengenai :
Gemapan : kepada penduduk telah kami minta perhatian untuk betul2 mengikuti petunjuk teknis dari Diperta Ketjamatan. Dengan maksud supaya sistem penjangkapan, pembi-
bibitan, penanaman dll. tidak menjimpang dari keten-
tuan-aturan yang telah diguriskan, misalnya dengan
tjara membunai blok2 sawah, agar pelaksanaan pertijaba-
an bisa dilakukn beraturan. Demikian dan seljara ti-
dak langsung menjangkupi pembantuan hama tiada se-
tjara kasar.

Kabuk dan bibit : Tidak mengalami kesulitan, karena desa2 jk. bersangkutan telah menerima djatah ini dari Diperta Kabupaten Surabaya, ketjuai beberapa desa telah terima dan sedang dalam pengirimannya. menurut perkiraan selesai dalam minggu ini.

A i r (Pengairan) : Menurut djatah dari Dinas Perikanan, Ketjamatan Rungkut mendapat djatah 200 Ha. untuk musim-gadu 1969, sedangkan pda-Bimas-awaja 925,5 ha. angka jang kurang sebanding, namun satu hal menurut pengalam an jenis PB.5 - PB.6 tidak banyak membutuhkan air. - Meskipun demikian untuk menjukupi kebutuhan pengairan kami telah minta perhatian dari Tjamat Wonotjolo untuk membantu Rungkut supaya anggelan2 jang tidak resmi jg. sering terdapat di daerah Wonotjolo diawasi dan didadkan larangan2. Untuk keperluan ini kami menjadikan diri guna membantu mengiratkan tenaga untuk mengadakan - pondjayaan/pengawasan terhadap kemungkinan adanya be-galan-begalan air disalurkan bagian atas jang tidak resmi itu. Disamping itu pula kami telah menjusahakan - pinjaman pompa air dari Diperta Kabupaten Surabaya untuk menjedot air dari sungai alvour Wonotjolo - Wonore djo guna menambah dan menjukupi kebutuhan sawah2 jk. di-Bimas-kan.

K a m a : Untuk pemberantasan hama, kami telah mengirim surat pada Kabupaten Surabaya untuk menundjuk tenaga penjemprot dengan sjarat antara lain pendidikan S.M.P. Mengingat didaerah Ketjamatan Rungkut pemuda2 jang ber pendidikan S.M.P. sangat tipis, bahkan beberapa orang sadja kalau-tah ada djarang jang suka bertani, maka usul kami jang telah kami adjukan^{kan} menjusulkan pada Diperta Kabupaten Surabaya jaitu 20 orang jang telah di Kursus dalam K.B.D. dapatlah kiranya oleh Diperta Kabupaten Surabaya diterima sebagai tjalon petugas penjemprot dan pengawas teknik itul tiyer.

Perlu kami tambahkan disini tentang perkembangan K.B.D. jenis PB.5 desa Rungkutkidul mulai dari sebar hinyga saat panen :

1. sebar tgl. 25-1-1969 sebanyak 40 Kg., dalam pembibitan bibit baik, tidak ada serangan hama maupun penyakit. Dipupuk dengan Urea 5 Kg.
2. tanam tgl. 14-2-1969; bibit berumur 20 hari. Pada umur 15 hari setelah ditanam, sudah mulai beranak ± 5 batang; setelah menjapai umur 4 minggu rata2 anaknya 35 batang tiap rumput. Pada umur 5 minggu terserang banajir hinyga menyakibatkan kerusakan 30% dan bongkar dan ditanam lagi, dengan tjara mesetjah anak-anak2-nya satu rumput dijadikan 3 - 4 tentjep. ini hari tgl. 5-6-1969 dipanen, padi menjapai umur 132 hari.

- 4 -

3. Hama : sundep/beluk 4% dan walangsangit 5%.
4. Pemberantasan hama/penjakit dengan 15 cc. per Lt. air.
5. Anakan rata2 37 batang. Anakan produktif 28 batang.
6. Air terlalu banjir, mengalami tergenang air selama :
 - a. 1 minggu, pada waktu tanaman umur 5 minggu.
 - b. 10 hari, " " " " 8 "
 - c. 1 minggu, " " " " 12 "
 - d. 5 hari, pada saat buah padi mulai masak.

Tanah yang ditanami adalah tanah sawah yang tidak dapat dibajak, karena terlalu dalam dan banjir mengandung air. Penanaman disawah K.B.D. ini dimaksudkan untuk menjari pengalaman dan pertjobaan penanaman PR.5 ditinjau dari segi betjer.

Demikian laporan kami mengenai perkembangan tanaman padi jenis PR.5 - PR.8 didaerah ketjamatan Rungkut.

Laporan selesai.

Surabaya, 5 Juni 1969.

Tjamat - Rungkut.

(Moehamad Ali)..

Lampiran - Lampiran

Lampiran 18

KORJORD 70

Kedjoran, tgl. 11 Agustus 1970

Nomor : P.1/1870

Lampiran: 2

OBJEK : Penetapan Petugas2
Dirokni Proyek
Rehabilitasi Irrigasi.-

Revisi :

1. Jth. Perbanta Gubernur ex. Perantara di Surabaya, Jalan Gubeng Raya No.64 di SURABAYA.-
2. Jth. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo di SIDOARJO ;
3. Jth. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto di MOJOKERTO ;
4. Jth. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Surabaya di SURABAYA ;
5. Jth. Walikota, Kepala Daerah Kota Surabaya di SURABAYA ;

Bersama ini kami kiriskan dengan hormat turunan surat patutan Kepala Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur tgl. 25 April 1970 No.1.1/41 beserta lampirannya tentang pengangkatan petugas2 Direksi Proyek Rehabilitasi Irrigasi Delta "Brantas" dan Perbaikan Tata Pengairan di kota Surabaya, untuk vendjadikan periksa dan seperlunya.-

Kepala Dinas Pengairan Daerah
"Brantas" Kedjoran,

(N. Haakoep).-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 19

Pa. DJASA
UNIT
NATIONAL CONTRA PEST
N. C. P.

Dj. Raya Dr. Sostomo No. 92 - Telp. D. 7426
SURABAJA.

Surabaya, 5 April 1972.

Kepada Yth.

Bapak Kepala Bagian Umum

Kotamadya Surabaya,

di

SURABAJA.

No. : 33/MCP/IV/72.

Lamp. :

Perihal : Izin Operasi Pembasatan Hama.

Dengan hormat,

Menubalas surat Bapak Kepala Bagian Umum tgl. 4 April 1972 No.0000/237 perihal seb. diatas, dengan ini kami beritahukan, bahwa kami telah menadjudikan surat permohonan untuk minta izin kepada Bapak Walikota dengan surat kami No.001/MCP/II/72 tgl. 1 February 1972 juga kami adjukan juga surat setjara pribadi kepada Bapak Walikota Sukotjo dan tindakannya kepada Bapak Kepala D.K.K. Kotamadya Surabaya setjara pribadi juga.

Menurut penjelasan dari Bapak Kepala D.K.K., Perusahaan pembasatan hama (Pest Control) tujukan hanya pemberitahuan saja dengan disertai laporan dari obat-obatan yang dipergunakan. Untuk itu Bapak kami persilahkan meninjau kembali surat kami No.001/MCP/II/72 tgl. 1 February 1972.

Demi membantu lanjutannya usaha kami, dengan ini kami mohon kepada Bapak kami diberi izin khusus dari Kotamadya Surabaya.

Kerudian dengan bantuannya kami utjapkan terima kasih.

Tindakan :

1. Bapak Walikota Surabaya.
2. " Kepala D.K.K. Surabaya.
3. Simpulkan.

Hormat kami,

A. F A T A H.
Purnawirawan A.D.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 20

KOTAMADYA SURABAYA

Surabaya, 10 Oktober 1972.

No.

K e p a d a :

berihal : Laporan hasil pembuatan waduk di Kecamatan Karang Pilang.

Yth. Sdr. Kepala Wilayah Surabaya Selatan

KOTAMADYA SURABAYA.-

Dengan ini kami mengharapkan dapatnya kepada kami dilaporkan hasil pembuatan waduk di Kecamatan Karangpilang yang pelaksanaannya dikerjakan dengan bulldozer pinjaman dari Disput Daerah-IV. Dalam laporan tersebut kami harap dicantumkan : tempat, luas, rata-2 dalamnya, jumlah dan biaya yang telah dikeluarkan.

Besikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

A. P. H. Isman, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya
K. P. H. Pekerjaan Umum,

ISMAN

Itk. Laut 228/P.-

Indangan :

- . Kepala Bagian Perencanaan,
- . Camat Karangpilang.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 21

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
Kotamadya Surabaya



Tgl: 10/09/1969
Lampiran: 1 Lembar

Perihal: Pengawasan dan Pengawasan
Pemeriksaan

- 1. Pk. Kotamadya Surabaya Selatan,
- 2. Pk. Kotamadya Surabaya Utara,
- 3. Pk. Kotamadya Surabaya Timur.

Dengan ini diberitahukan dengan Lembar, bahwa... (text is faint and partially obscured)

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...
- h. ...
- i. ...
- j. ...
- k. ...
- l. ...
- m. ...
- n. ...
- o. ...
- p. ...
- q. ...
- r. ...
- s. ...
- t. ...
- u. ...
- v. ...
- w. ...
- x. ...
- y. ...
- z. ...

- 1. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 2. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 3. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 4. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 5. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 6. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 7. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 8. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 9. Kepala Dinas Perikanan Kota...
- 10. Kepala Dinas Perikanan Kota...



Handwritten signature and date.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 22

Keputusan Menteri Pertanian
Jalan Tugu

Surabaya, 7 April 1974.-

Keputusan : 100/1974/1003/Dep.

Kepala Dir.

Lampiran : -

Yth. Gubernur/Kabupaten

Perihal : Hal-hal yang berkaitan dengan Penjualan Pangan.

Keputusan

di 17/04/1974

I. Sesuai dengan instruksi dari Menteri Pertanian No. 100/Instr./1974/31/Dep., maka diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan yang berlaku untuk stock pangan di daerah-daerah yang bersangkutan, serta diadakan penelitian aspeknya dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

I.a. Untuk mencegah jangan terjadi terjadinya pembelian padi/gabah/beras di daerah-daerah yang bersangkutan dengan cara-cara yang tidak wajar, maka akan lebih rendah dari harga pasar, serta akan pejabat/pejabat yang berwenang akan mengadakan penelitian terhadap harga padi/gabah/beras di pasaran umum.

Dalam hal harga padi/gabah/beras di pasaran umum akan atau lebih rendah dari harga pasar, maka akan diadakan pengalihan atau BUNDAH untuk pembelian, maka saudara diharapkan agar melakukan agar memperoleh hasilnya dengan baik.

I.b. Sedangkan dengan itu, maka akan diadakan penelitian dan pengawasan baik dari segi produksi maupun dari segi distribusi.

I.c. Sedangkan dengan itu, maka akan diadakan penelitian dan pengawasan baik dari segi produksi maupun dari segi distribusi.

I.d. Sedangkan dengan itu, maka akan diadakan penelitian dan pengawasan baik dari segi produksi maupun dari segi distribusi.

- 3 -

V. Sekali lagi kepada saudara dan semua pejabat -
nya, involved dalam usaha pengabdian ini, terutama para Staf-
Beliau, I.B.I. Gading dan IKOPD, dimintakan kerajinan yang se-
maksudnya untuk agar usaha pengabdian kepada petani petani
ini berhasil sukses.

GUBERNUR KOTA SURABAYA
JAYA TIRU.

(BOLANGA, 1977).

Disampaikan kepada :

Saudara Sekretaris Gubernur Kepala
Daerah di Kantor Propinsi Jawa Timur.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 23

PERMITSURABAYA KOTAMADYA SURABAYA

No. : 8200/159/74

KOTA SURABAYA, KOTAMADYA SURABAYA

- 1. Surus permohonan Disiplin P.T. Dikira dari Cabang Surabaya, Jl. Setral No. 6 Surabaya tanggal 1 Mei 1974 No. 0251/4/21/11/74 tentang permohonan diperpanjang Ijin Special Food - Control.
- 2. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.

Demikian ini diterbitkan agar supaya :

P.T. SYGA SARI Cabang Surabaya
Jl. Setral No. 6 Surabaya

untuk melakukan usaha Part-Control yakni operasi pemantauan/pencegahan hama-2 dan serangga di dalam daerah Kotamadya Surabaya dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perusahaan harus berbentuk badan hukum.
2. Harus ada seorang tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknis.
3. Dua minggu sebelum melakukan pemantauan hama, lebih dahulu harus mengajukan kepada Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya mengenai :
 - a. waktu pelaksanaan,
 - b. tempat pelaksanaan,
 - c. syarat-syarat pelaksanaan,
 - d. bahan-bahan yang dipakai :
 - jenis obat-obatan,
 - label dania untuk manusia,
 - label/bahan yang dipakai,
 - pernah ditest dirum,
 - e. daftar nama-2 petugas.
4. Menyerahkan daftar nama-2 bahan pestisida yang dipakai.
5. Laporan bulanan kegiatan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.
6. Gudang pestisida tidak boleh terletak di dalam tempat tinggal keluarga dan tidak boleh terletak di daerah banjir.
7. Harus mematuhi semua peraturan/peraturan-2 mengenai penggunaan penggunaan pestisida.
8. Surat ijin ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 1974 dan dapat diperpanjang lagi dengan ijin baru setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.

Dikeluarkan di : Surabaya.

Pada tanggal : 21 Mei 1974.

Ana. Walikot, Kepala Kantor
Kotamadya Surabaya
Kesehatan Masyarakat

P. S. Suroso, Kepala Kantor, dll.

Terdapat kepada Yth. :

1. Kepala Sub.Dit. Ketertiban Umum.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota.
3. Kepala Dinas Perhubungan & Pajak Daerah.
4. Kepala Kantor Inspektur Pajak di Surabaya.
5. A r a i p.

Surabaya, 28 Mei 1974
 No. 28/1157/74
 KAWALAN PESTISIDA DAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

Memperhatikan :

1. Surat permohonan dari Direktur P.T. GAVIRON Jl. S.A. Hartini No.141 Surabaya tanggal 21 Mei 1974 No. 0014/M/S. tentang permohonan izin usaha Pest - Control.
2. Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.

Dengan ini memberikan ijin kepada :

P.T. GAVIRON
 Jl. S.A. Hartini No.141 Surabaya.

untuk menjalankan usaha Pest-control yakni operasi pembasmi hama-tanaman dan serangga di dalam wilayah Kotamadya Surabaya dan di sekitar-sisinya sebagai berikut :

1. Perusahaan harus berbentuk badan hukum.
2. Harus ada seorang tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknis.
3. Dua minggu sebelum mengadakan pelaksanaan pembasmi hama lebih dahulu harus melaporkan pada Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya,

mengenai : a. waktu pelaksanaan
 b. tempat pelaksanaan
 c. syarat-2 pelaksanaan
 d. bahan-2 yang digunakan :

- aktif substansinya
- letihal dosis untuk semua
- banyaknya bahan yang diperlukan
- pernah dibuat di mana
- nama2 peternak pelaksana.

Memberikan daftar nama pestisida yang dipakai.

Harus memberikan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya (sebagaimana contoh buku terlampir).

Gudang pestisida tidak boleh terletak di dekat tempat tinggal keluarga dan tidak boleh terletak didaerah banjir.

Harus sentati semua peraturan-2/petunjuk-2 mengenai penanganan penggunaan pestisida.

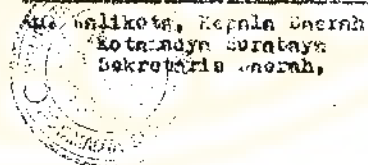
Surat ijin ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang lagi dengan ijin baru atas permohonan yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.

Dikeluarkan di : Surabaya.
 Pada tanggal : 28 Mei 1974

dan kepada Yth.:

Kepala Subdit, Ketertiban Umum,
 Kepala Dinas Kesehatan Kota,
 Kepala Dinas Pendapatan & Pajak Daerah,
 Kepala Kantor Inspeksi Pajak di Surabaya.

A r s i p .-



R. SUTOMO HARO SOEMARTO, SH.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 24

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA
 DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN KEBANGUNAN
 SEKSI PERENCANAAN DAN KEBANGUNAN
 JALAN SEMESTA JALAN GENERAL AUSTIN NO. 14 SURABAYA 60131

Surabaya, 26 - Februari - 1975.-
 6570/14/75
 6-3-75

Kepada :
 Yth. Bapak Walikota Kotamadya, Kepala
 Daerah Tingkat II Surabaya
 di
 Kali Mekar .-
 SURABAYA.-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat turunan surat Cakr
 Kepala Wilayah Kecamatan Karangpilang tanggal 20 Januari 1975. No
 192/77 perihal tersebut pada pokok surat.

Diwaktu musim penghujan daerah-2 sekitar Kali Mekar kerap
 II banjir sehingga mengakibatkan tanaman padi biasa yang ada di
 rah tersebut rusak karena genangan air.

Untuk normalisasi proyek tersebut sudah kami susulkan ke dal
 usulan proyek Inpres 1975/1976 namun karena menurut penilaian ad
 proyek-kelain yang lebih urgen maka normalisasi Kali Mekar terse
 terpaksa belum dapat dikut usulkan kepada Bapak Gubernur Kepala
 Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Berhubung sangat pentingnya arti normalisasi Kali Mekar ke
 peningkatan produksi pertanian dan kesehatan, dan menarik ketera
 an Bapak Sekretaris Daerah pada rapat pengarahannya R.A.S.D. 1975,
 76 pada tanggal 21 Februari yang baru lalu yang dipimpin oleh Ba
 dimana dijelaskan bahwa pada pihak Epoda tersedia Voorfinancieri
 sebesar Rp. 200.000.000,- maka berkenanlah kami mengajukan per
 mohonan kiranya Bapak berkenan untuk mengguakakan dana tersebut p
 proyek normalisasi Kali Mekar diakaud.

Demikian dan mohon khabar adanya .-

Disampaikan kepada :

1. Bapak Sekretaris Daerah
 Kotamadya Dati II Surabaya
2. Pembantu Walikota Kotamadya Di-
 dang Pembangunan Physick
 (Sp. Imanoe)
3. Kepala Sub Dit Pembangunan
 Kotamadya Dati II Surabaya
4. Kepala Sub Dit Pemerintahan
 Kotamadya Dati II Surabaya
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kotamadya Dati II Surabaya
6. Kepala Dinas Perencanaan
 Tata Kota Kota Dati II Surabaya.
7. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan
 Karangpilang .-

PEMBANTU WALIKOTAMADYA

Kepala Wilayah Surabaya Selatan,

(Drs. Sri Sastradinandja) .-

.....
 DISTRIBUSI KELOMPOK KAWANAN
 KANTOR KAWANAN KAWANAN

Surabaya, 15 Januari 1975.

Nomor : 192/7
 Lampiran : -
 Perihal : Normalisasi proyek
 Kali Mekar.-

K e p a d a
 Yth. Bapak Asisten Walikota, Kota
 Kotamadya Surabaya Selatan
 di

S. H. S. H. A. Y. A.

S. H. S. H. A. Y. A.

Demikian surat Bapak Asisten Walikota Kota Kotamadya Surabaya Selatan tgl. 08 Januari 1975 No. 0082/7/74/Wil.S. tersebut ini diperseklahkan dengan hormat, atas menurut laporan yang kami terima dari Kepala Base Jalan Komandan Dinas tgl. 09 Januari 1975, maka sudah kami perpanjang survey. Dalam pada itu yang terjadi tgl. 19 dan 20 Januari 1975 mengalami banjir.

1.	Mesa Belurus	-	65 Ha.
2.	" Jajrunggal	-	10 Ha.
3.	" Wiyung	-	105 Ha.
4.	" Babedan	-	80 Ha.
5.	" Lidahetan	-	70 Ha.
6.	" Lidah Kulon	-	80 Ha.
7.	" J e r u k	-	55 Ha.
8.	" Lakarsantri	-	15 Ha.
9.	" Kebrocan	-	30 Ha.
10.	" Belaskinpruk	-	75 Ha.
11.	" Kemurulan	-	55 Ha.
12.	" Bangkungan	-	30 Ha.

Jumlah : - 610 Ha.

Akibat dari banjir tsb. banyak tanaman padi yang rusak/manduk hingga mengakibatkan kerugian bagi para petani yang bersangkutan. Sebab-sebab utama banjir disebabkan tidak adanya tanggulnya dan sempitnya K. Mekar yang sudah lebih kurang th. 1957 hingga sekarang belum pernah ditangani, terutama dibagian bawah survey.

Bertubung dengan hal tsb. diatas, kami mohon atas keremahmahan yang ada pada Bapak untuk berkenan normalisasi K. Mekar dimaksud diteruskan kepada pihak atasan, dengan maksud dimasukkan dalam DDP Impres 1975/1976 sehingga para petani tersebut (sekitar bulan September/Oktober 1975) proyek tsb. dapat direalisasi sehingga bahaya banjir yang dialami oleh para petani pada setiap tahun dapat teratasi.

Demikian untuk menjadikan periksa adanya.

CREAT - KAWANAN

Cap / ttd.

TEMBUSAN u.m. disampaikan kepada :

(KAWANAN).-

Yth. Kepala Dinas Perencanaan & Tata
 Kota Kotamadya Surabaya.-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 25

TEAM PENGAWAS PENYALURAN SAPRODI
KOTAMADYA DAERAH TK.II SURABAYA.

Surabaya, tgl. 10 Juni 1975.

Nomer : 79 / TPPSP / 75.

K e p a d a :

Lampiran : --

Yth. Ketua TEAM PENGAWAS PELAKSA -

Perihal : Penyimpanan pupuk -
diluar gudang resmi.

NAAN BIMAS PROP. JAWA TIMUR

di

S U R A B A Y A .

Sehubungan dengan adanya berita di Surat2 Kabar /
Harian di Surabaya tentang akan masuknya pupuk ke Jawa Timur
sebanyak 600.000 ton dalam bulan Juni 1975.

Maka demi keamanan dan ketertiban serta untuk men-
cegah kejadian2 yang tidak kita harapkan, bersama ini kami -
mohon/usulkan kepada Team Pengawas Pelaksanaan Bimas Prop. Ja-
tim untuk meng-instruksikan kepada para Importir dan Penyalur
yang akan menyimpan pupuk2 diluar gudang resmi di daerah hu-
kus Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya agar terlebih dahulu mela-
purkan kepada Penguasa setempat dan Team Pengawas Penyaluran
Saprodi Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan seperlunya.

TEAM PENGAWAS PENYALURAN SAPRODI
KOTAMADYA DAERAH TK.II SURABAYA

K e t u a ,

(S E D I J O N O . S . H)

Sena Wira Jakes NRP. 562199

TEMBUSAN :

- ✓ 1. Kepada Yth. Bp. Walikotaamadya
Kdh. Tk. II Surabaya.
2. A r s i p . -

Lampiran - Lampiran

Lampiran 26

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Agno. 7500/120/2
Tg. 20-11-1975

Surabaya, 20 Nopember 1975.

Kepada

Nomor : Ek.011.4/574/1975

Yth. Para Bupati/Walikota/madya

Lampiran : -

se

Perihal : Pembrantasan Hama dan Penyakit
tanaman M.T. 1975 / 1976.

JAWA TIMUR.

SEGERA.

Dalam rangka mensukseskan ^{subaran} ~~serana~~ produksi padi yang telah ditetapkan dalam Pelita II tahun ketiga ini, dimana $\pm 80\%$ akan dipengaruhi oleh, hasil pertanaman M.T. 1975/1976. Oleh karena itu beberapa hal penting kami tegaskan ialah sebagai berikut :

1. Kerusakan tanaman Pangan (Padi) M.T. 1975/1976 akibat hama dan penyakit harus dapat diatasi/ditekan se maksimal mungkin, antara lain kemungkinan terhadap timbulnya hama wereng dan hama-hama/penyakit lainnya.
2. Penyediaan pestisida ^{Dikawatir} sampai saat ini berdasarkan hasil stock opname tanggal 28 ~~November~~ 1975 yang berada di Gudang Lini III = 30 % dan Lini IV = 12 %.
3. Atas dasar hal-hal seperti tersebut diatas kami instruksikan kepada Saudara untuk menepuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - 3.1. Dekatkan semua jenis pestisida yang saat ini berada di gudang Lini III ke Gudang-gudang ~~RUUD~~. Jenis pestisida tersebut penyalurannya berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas Pertanian Rakyat.

3.2. Ambil.

- 2 -

3.2. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tepat agar tidak terjadi kemungkinan timbulnya hama dan penyakit secara eksplo -
sif.

3.3. Untuk daerah-daerah yang telah diplat daerah ex serangan hama wereng mutlak harus diganti dengan jenis Padi Ir.26.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan diindahkan dengan rasa penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR,

(MOHAMMAD NOER).

PINDASAH : Kepada Yth.

1. Pembantu Gubernur se Jawa Timur.
 2. Anggota Badan Pembina Bimas/Imas di Jawa Timur.
 3. Para Anggota Team Pengawas Polak-
sana Binas Jawa Timur.
-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 27

75007/47/26
15-3-76

DINAS PERTANIAN RAKYAT KOTAMADYA
PAPARAN TINGKAT II SURABAYA

Surabaya, 5 Maret 76

Nomor : 47/xv-b
Lampiran : 1 buku
Perihal : Pengembangan IR 25, 28, 30
dalam rangka menanggula-
ngi hama wereng dengan
virusnya.

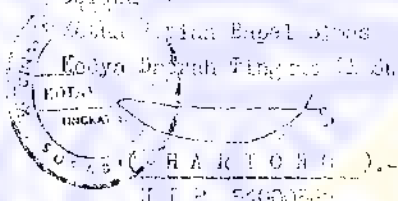
K e p a d a :
Yth. Sdr. Pomipin Diperta Koc-
matan se Kodya
S U R A B A Y A

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tk. I Jatim tanggal 2 Februari 1976 No Birprod/Hama/484/xv-b, bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka menanggulangi hama wereng dengan virusnya, maka intensifikasi tanaman padi Binas/irisan, dalam M.P. Cadeh th. 1976 diharap menanam/menggunakan bibit IR 25, 28, 30 sesuai dengan target buku kuning Pedoman Program Intensifikasi produksi pangan ME 1976 sebagai terlampir.

Selanjutnya kami berharap kepada Sdr. dengan segera menginformasikan kepada kami perincian target sampai selesai, awal 100 bulan, dan kebutuhan bibit IR 25, 28, 30 selambat lambatnya tanggal 15 Maret 1976, agar segera dengan cepat tercabut penyebaran bibitnya, maka selanjutnya mungkin diadakan pendaftaran kebutuhan bibit berupa jumlahnya tiap desa disampaikan kepada kami yang akan kami teruskan kepada Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Demikian agar menjadikan hal-hal dan untuk kami sangat perhatian.

Kepala Dinas Pertanian Rakyat
Kotamadya
Kotamadya Surabaja Tingkat II Surabaya



Tindakan kepada Tta :

1. Sdr. Ketua Bapel Binas MRC.
2. " Kepala Kantor Koperasi MRC.
3. " Kepala BRL Gabung Gresik.
4. " Kepala Sub Direktorat Pemerintahan MRC.
5. " Ambalan Wakil Kotamadya Tati II untuk Wilyah Surabaya Utara, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan.
6. " Kepala Bapel Binas & Kecamatan Wonorejo, Jember, Kandangan, Bangorejo, Karangpandan, Karangrejo, Madiun.
7. " Kepala MRC Madiun, Madiun, Karangpandan.
8. " Kepala Binas Sub BRL Karangpandan MRC.
9. " Kepala Binas Sub BRL Karangpandan MRC.
10. " Kepala Binas Sub BRL Karangpandan MRC.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 28

KOTA KOTAMADYA DI SURABAYA SELATAN
 PANCA NOMOR 31 TELEFON NOMOR 68706

0207/08/97
 6-1-1977

Surabaya, 4 Januari 1977

No : 00089/Binas/TT/wil Sel

Isi : -

Program intensifikasi
produksi padi Binas.

Kepada

Yth. 1. Camat Kenocole

2. Camat Karangpilang

Kotamadya Dati II Surabaya

di

SURABAYA

Menunjuk surat Ka Sub Dit Perencanaan Kodya Dati II Surabaya selaku Ketua Ba Pelaksanaan Binas tanggal 15 Desember 1976 No.058/Ba-13 SD/V-1976 perihal tersebut dan pokok surat yang ditujukan langsung kepada saudara, kami minta agar saudara segera memenuhi hal dimaksud dan selambat-lambatnya dalam bulan ini laporan tersebut sudah kami terima.

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya.

PEMBANTU WALIKOTAMADYA



(R. BANGUNG HARTONO)

N.S.P. 010071889

REMBUSAN KEPADA YTH:

1. Bapak Walikota Kotamadya Dati II Surabaya.
2. Ka Sub Dit Perencanaan KMS.
3. Ka Sub Dit Pemerintahan KMS.
4. Ka Dinas Pertanian KMS.
5. Ka Direktorat Jendral Koperasi Kodya Dati II Sby.

KOTAMADYA DATI II SURABAYA
 POKOR PEMBANTU WALIKOTAMADYA
 SURABAYA UTARA
 JALAN BARAT 2A TELP. 293530

0207/23/77
 13-1-1977
 Surabaya, 4 Januari 1977 .-

: 6966/V/WU/1977.-

Sp.
 Rindl

: Program intensifikasi
 peningkatan produksi
 pangan/padi Bimas.-

kepada :
 Yth. Camat Landos Kotamadya
 Dati II Surabaya .-

Menerik surat kami tgl. 23 Oktober 1976 No. 5627/V/
 perihal sebagaimana pokok surat diatas, barangkali sudah
 kup lama waktunya kami menunggu laporan Saudara mengenai
 sud surat diatas.

Oleh karena itu kami harapkan laporan Saudara seger
 apabila terdapat kesulitan2 pelaksanaannya, kami diberi

Demikian dan perhatian seperlunya.-

Hasan disampaikan :

Yth. Bapak Sekwilda Kotamadya
 Dati II Surabaya .-
 Yth. Kep. Subdir Pemerintahan KMS.
 Yth. Kep. Subdir Perekonomian KMS.
 Yth. Kep. Dinas Pertanian KMS.
 Yth. Kep. Kant. Dirjen Koperasi KMS.

PEMBANTU WALIKOTAMADYA
 DI SURABAYA UTARA,

[Signature]
 Drs. R. SAMSUL ARIFI .-

NIP. 010013041.-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 29



WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Surabaya, 20 - JANUARI - 1977

Kepada :

Yth: Kepala-pula Wilayah Kesehatan sebagai
Ketua Badan Bina Kesehatan :

Surabaya : 2009/49/1977
Kopirama
Surabaya : Dinas Kesehatan
dan Persewaan

1. Camat Lubabo.
 2. Camat Jombang.
 3. Camat Masoleh.
 4. Camat Karangpilang.
 5. Camat Tandes.
 6. Camat Gebang.
 7. Camat Tenebera.
- di - SURABAYA -

Sehubungan dengan surat keputusan Bapak Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur No. 200/1/181.76 tanggal 13 Desember 1976 tentang program peningkatan
produksi padi, peternakan dan perikanan No. 1976/1977, dimana surat tersebut
pernyataan di Kotamadya Surabaya sudah ada beberapa desa yang melaksanakan pe-
nyertaan padi, ternak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menghidupi hal-hal yang
tersebut dibidang pengalihan pupuk/obat-obatan yang larut dalam air (DTPA) dan
tersebutnya secara maksimal dalam menunjang program kesehatan dibidang pangan
dimana padi ternak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan
ini surat instruksi sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tahun baru 1977 No. 1976/1977 dengan ini, agar
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
2. Bila diketahui ada terdapat beberapa DTPA, hendaknya Kepala Desa yang
bersangkutan harus dapat mempertanggung jawabkan, dengan jalan membuat
berita berita, dan ditandatangani oleh Ketua Badan Bina Kesehatan setempat ke-
pada Kepala Badan Bina Kesehatan sebagai Ketua Badan Bina Kesehatan
Kotamadya Surabaya dalam hal ini Sub Direktorat Perikanan.
3. Laporan perkembangan adanya DTPA secara berkala dan kontinu ke-
lengkapan kepada Kepala Badan Bina Kesehatan Surabaya dan tindakan dikira-
kan DTPA, Kotamadya Surabaya sebagai Ketua Badan Bina Kesehatan
Surabaya, laporan harus yang meliputi asal ternak, populasi ternak
dan ternak, apakah ada gangguan kesehatan, realisasi program (hasil-
produksi), ternak ternak apakah ternak ternak ternak ternak ternak
tersebut ternak
4. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
tersebut.
5. Demikian ini.

- Surabaya, 20 Januari 1977
1. Kepala Desa di Kotamadya Surabaya
 2. Kepala Badan Bina Kesehatan Kotamadya Surabaya
 3. Kepala Badan Bina Kesehatan Kotamadya Surabaya
 4. Kepala Badan Bina Kesehatan Kotamadya Surabaya
 5. Kepala Badan Bina Kesehatan Kotamadya Surabaya
 6. Kepala Badan Bina Kesehatan Kotamadya Surabaya
 7. Kepala Badan Bina Kesehatan Kotamadya Surabaya

Handwritten signature and stamp area.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 30

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SURABAYA
 DIREKTORAT PERTANIAN
 "BRANTAS" SURABAYA
 No.

Surabaya, tgl. 3 Mei 1977

Mohon : L. 5 / 101
 Lampiran : -
 Perihal : Situasi aliran air Saluran Gunung Sari untuk pertanian Kec. Pandes.-

Yth. Sub. Kepala Kepala Wilayah Kecamatan Pandes di-
 2 A. 2000.-

Dipersekludkan dengan hormat sebagai berikut :

- I. - Aliran air Saluran Gunung Sari untuk areal pertanian di Kecamatan Pandes pada tahun kemaren th. 1977 ini (Mei s/d. Oktober) akan berkisar ± 400 l/dt.
 - Areal pertanian (tanah sorotan) dalam wilayah Kecamatan Pandes ± 241 Ha. Bila areal tersebut ditinjau pelayanannya akan memerlukan aliran air sekitar ± 450 l/dt. Untuk itu perlu diadakan, namun bila ditinjau peraliran yang itu mudah-2 an dapat dikurangi berdasarkan-2 yang relatif kecil itu.
 - Tetapi bila ada terjadi tanam padi gada (gada liar) maka pasti timbul kesulitan-2 pembagiannya, akan habis tenaga (dicari) di mana padi gada liar itu saja / lain-nya tidak akan kebagian air, pengalaman di- tahun-2 yang telah lalu.
 - II. - Berhubung dengan hal tersebut diatas maka perlu diambil langkah pada semua para petani (antara lain dilekani masalah diara jalas Pandes antara Desa Ginomulyo s/d. Desa Gunung Sari) dilarang menanam padi gada dan diinstruksikan untuk menanam pelayan gada.
- Dengan demikian maka aliran air dirangsang kembali (sejumlah ± 400 l/dt tersebut) mudah-2 an akan dapat diatur / dinormalkan secara merata areal pertanian (tanah sorotan) dalam Kecamatan Pandes.

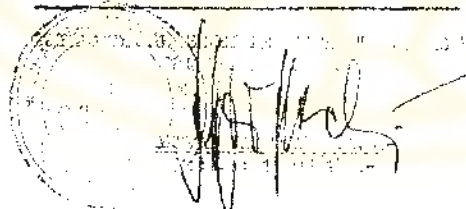
Demikianlah untuk menjadikan perhatian dan tawanya.

KEPALA D.L.S. SURABAYA "BRANTAS"
 BAWONO ARIO PUTRO

TUJUAN : disampaikan Kepada :

1. Yth. Walikotamadya K.D.M. Tk. II Surabaya di- SURABAYA.
2. Yth. Pembantu Walikotamadya untuk Surabaya Utara di- SURABAYA.
3. Yth. Kepala DIPETUM K.M.S. di- SURABAYA.
4. Yth. Kepala Cabang Seksi Pengaliran "Brantas" Wara di- SURABAYA.

AKHLAD BINTIK B.I.E.-
 N.I.P. 11000175.-



Lampiran - Lampiran

Lampiran 31



WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

73.366

Surabaya, 14 Desember 1977

No. : 0207/688/77
Sifat : **S E K R E T**
Lamp.
Perihal : Peralihan bantuan pangan --

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Kotamadya Dati II Surabaya

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tgl. 4 Desember 1977 di Kantor Subdit Pemerintahan Umum dan evaluasi hasil peninjauan dibawah pimpinan Kepala Subdit Perakomnisan yang bertindak mewakili Walikotaamadya ke daerah Kecamatan Karangpilang, Sukolilo dan Rungkut dimana akibat musim kemarau yang kering di beberapa desa didapat adanya kemungkinan kurang makan khususnya atas diri orang-orang tua/janda;

Oleh karena itu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memandang perlu segera memberikan dropping beras baik merupakan injeksi maupun Subsidi bagi daerah-orang kritis tersebut. Sedang untuk persiapan dropping lebih lanjut diharapkan Saudara dapat segera mulai menhimpun bantuan-orang yang sudah ada maupun yang sedang dirintis; Untuk kepentingan ini hendaknya secara terus menerus, Saudara menghubungi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Sub Dit Kesra atau Sub Dit Perakomnisan).

Demikian untuk mendapatkan perhatian--

Pjs. WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

(Handwritten signature)
(Drs. SOENJATONO).
NIP. 010015744.

Yth. :
Sdr. Kepala Subdit Kesra K.D.S.
Sdr. Kepala Subdit Perakomnisan KNS.
Sdr. A r s i p --

Lampiran - Lampiran

Lampiran 32



**WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

No.
Lamp.
Perihal

0007/1977/177
Surabaya, 23 November 1977.
Kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala Sub Dit. Inspeksi
" BAKTAS " Direktorat Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Rakyat
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
di
SURABAYA.

Surabaya, 23 November 1977.

Kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala Sub Dit. Inspeksi
" BAKTAS " Direktorat Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Rakyat
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
di
SURABAYA.

Bersama ini kami sampaikan foto copy Instruksi Gubernur
Kepala Daerah II Jawa Timur No. K.I/21/1977 tertanggal 20 -
Oktober 1977 sebagaimana terlampir.

Keseluruhan tugas dan tanggung jawab yang terdapat dalam Instruksi
tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam ayat pertama dan kedua ter-
tanggal 20 Oktober 1977, agar dapat dilaksanakan selengkap dan se-
lengkap mungkin diharapkan supaya diadakan pembinaan dan pengawasan
terhadap masing-masing daerah yang akan dilakukannya, sehingga hasil terse-
but nantinya akan dapat mempengaruhi baik hasil pertanian yang
akan datang.

Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Handwritten signature
WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Surabaya, 23 November 1977.
No. 010015744.

- TRIMBUKAN, kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala Sub Dit. Inspeksi
 2. Sdr. Pembantu Walikota untuk
Surabaya Utara, Timur dan Selatan
 3. A r a i p.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 33

WALIKOTAMADYA KEDUA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.

mz

Surabaya, 9 JANUARI 1978.

Nomor : 0207/14/78.
Lampiran : 1 (satu).
Perihal : Musim paceklik
Tahun 1978.

Kepada Yth.:
Sdr. Pembantu Walikota
a. di Surabaya Utara
b. di Surabaya Timur
c. di Surabaya Selatan
Kotamadya Daerah Tk. II
Surabaya

Disampaikan photocopy Formulir Berita dari Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. PB.021.4/967/77 tanggal 17 Desember 1977 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sembungan dengan Instruksi tersebut diatas, lewat Saudara, saya minta perhatian semua Camat dan Kepala Desa untuk lebih meningkatkan usaha menanami tanah2 tegal dan pekarangan dalam wilayah kerja masing-masing.

Untuk tanah-2 tegal dapat diusahakan penanaman padi gogo, jagung, kacang tanah dan ketela pohon dan lain-2 tanaman tumpang sari.

Untuk padi gogo, terutama saya minta perhatian terhadap desa - desa :

- Bonowo, Pakal dan Semeni di Kecamatan Tandus.
- Madoe, Beringin dan Sasiliterep di Kecamatan Karangpilang.

Untuk tanah pekarangan dapat diusahakan penanaman jagung dan sayur-sayuran.

Terhadap tanah-2 yang dikuasai oleh Badan-2 Hukum (P.T. C.V. dan sebagainya) supaya dilakukan pendekatan sebaik - baiknya untuk dapat pula ditanami dengan tanaman bahan pangan.

Dalam rangka "tilik desa", saya minta Saudara dan para Camat senantiasa memperhatikan masalah penanaman bahan pangan tersebut, dan sekali lagi senantiasa waspada terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan makan.

Kita harapkan bersama agar supaya dalam bulan Januari 1978 seluruh percawahan, tegal dan pekarangan sudah hijau dengan tanaman bahan pangan dalam rangka menghadapi musim paceklik tahun ini.

Demikian harap sekum, dan pelaksanaannya.-

MEMBUSAN, kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur.
2. Bapak Pembantu Gubernur di Surabaya.
3. Sdr. Dan Rem OC: Bhaskara Jaya
4. Sdr. Denteso Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kodya Dati. II Surabaya.
6. Sdr. Kepala Sub Dit. Perencanaan.
7. Sdr. Kepala Sub Dit. Demografi dan pada Kantor Walikota Dati. II Sbya.
7. Semua Camat di Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya.

WALIKOTAMADYA KEDUA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.

(B O E T A R N O).-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 34



KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
SUB DIREKTORAT PEREKONOMIAN

Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya 41127
 Lantai V Km. 514-516-520 Telpn: 43051 s/d 43057 Pes. 312-391-392

Surabaya, 14 Maret 1978.

Nomor : 032/13-204/78
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Pelaksanaan Pengada-
 an Pangan Tahun 1978/
 1979.

K e p a d a :

Yth. 1. Sdr. Pembantu Walikota

- a. di Surabaya Utara
- b. di Surabaya Timur
- c. di Surabaya Selatan

2. Sdr. Camat

- a. Tandus
- b. Tambaksari
- c. Sukolilo
- d. Bungkul
- e. Monocolo
- f. Karangpilang

di-

SURABAYA.

Dicampikan dengan hormat turunan :

1. Instruksi Presiden R.I. No.11 Tahun 1977 tentang "Perubahan terhadap Instruksi Presiden R.I. No.16 Tahun 1976".
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 1977 tentang "Koordinasi, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengadaan Pangan - Dalam Negeri".
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.Ek. - 011.2/63/78 tanggal 21 Januari 1978 tentang "Ketentuan dalam melaksanakan pengadaan pangan Tahun 1978/1979".

Beserta Ringkasan tentang "Pengadaan Pangan (beras) di Dalam Negeri Tahun 1978/1979, untuk Saudara jadikan Pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Pangan Tahun 1978/1979 dalam wilayah - Kerja Saudara".

Untuk exemplar diserahkan supaya diteruskan kepada Instansi Instansi lain yang berkaitan dan para Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

Resikikan harap maklum.

A.n. WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA
 SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
 u.b.

KEPALA SUB BID. PEREKONOMIAN
 Solaku
 Wakil Ketua Tim Pangan 1978/79

TERBUKA, kepada Yth. *(tanpa lampiran)*

1. Bapak Walikota Kepala Daerah/Kotua Tim Pangan Kotamadya Kati.II Surabaya.
2. Bapak Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
3. A r i o P u t r o

Lampiran - Lampiran

Lampiran 35

BADAN PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

No.:

D a s a r : S.P.3 Diperdag Perwakilan Jawa Timur.
Tanggal : 8 - 5 - 1978.
Nomor : 0207/328/78.

Diperintahkan kepada :
PT. PERTANI.
Jl. Embong Trengguli No.5 Surabaya.

Untuk melayani/mengeluarkan obat2 an :
DIAZINON : 300 (TIGA RATUS) liter.

K e p a d a : Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Dati-
II Surabaya.

Untuk keperluan : Penanggulangan hama wereng dan ulat ten-
tara di kecamatan-2 Karangpilang dan -
Fundes untuk MT.78/78.

Pembiayaan untuk pengeluaran obat2 an (Diazinon) tsb diatas, di-
bebaskan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tk.II-
Surabaya Tahun Anggaran 1978/1979.

Surabaya, Mei 1978.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,

(H. SOEPARNO).--

Tindakan Yth:

1. Sdr.Ka.Diperta Kotamadya
Dati II Surabaya.
2. Sdr.Ka.Syb Dit.Perekonomiag
" Ka.Sub Dit.Kuangan,
pada Kantor Walikotamadya Dati II
Surabaya.
3. A r s i e p .--

Lampiran - Lampiran

Lampiran 36



KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
SUB DIREKTORAT PEREKONOMIAN

Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya 41117
Lantai V Km. 514.516-520 Telpon 43051 s/d 43057 Pos. 312-391-392

0207/392/78
23-5-78 Surabaya, 16 Mei 1978

Kepada

nomor : 021/BM/13-100/78
pikiran :
hal : penyuluhan pertanian pangan
M.K. 1978.

Yth. Pembantu Walikotaadya
1. di Surabaya Utara,
2. di Surabaya Timur,
3. di Surabaya Selatan.
Kotamadya Dati. II Surabaya.

Sehubungan dengan surat Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, No. 0207/392/78 tanggal 13 Mei 1978 perihal tersebut pada pokok surat; bersama ini saya sampaikan jadwal penyuluhan yang akan diberikan di 6 (enam) Wilayah Kecamatan peserta/Binas/Inmas dalam wilayah kerja Sawah.

1. Kec Wonorejo : 15 Mei 78, jam 09.00 di Balai Desa Margorejo.
2. Kec Rungkut : 16 Mei 78, jam 09.00 di Balai Pertemuan Kecamatan.
3. Kec Kr. Hilang : 17 Mei 78, jam 09.00 di Balai Pertemuan Kecamatan.
4. Kec Tab. Sari : 18 Mei 78, jam 09.00 di Balai Kelurahan Sengkah.
5. Kec Sukolilo : 20 Mei 78, jam 09.00 di Balai Desa (anyusuul).
6. Kec Tandes : 22 Mei 78, jam 09.00 di Desa Mamban Petan.

Pada kesempatan tersebut diminta Saudara menugaskan petugas khusus Binas/Inmas pada Kantor Saudara untuk turut hadir.

Demikian harap maklum.-

KEMUDA YAG :

Walikotaadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya (sebagai
laporan).

Kepala Dinas Pertanian Rakyat/
Ketua Harian,
Kepala Kantor Departemen Penerangan/
Ketua Tim Penerangan,
Kakanca KRI Gresik/Anggota,
Kepala Kantor Ditjen Koperasi/Anggota
Kepala D.P.U. Pengaliran Brantas Sekeloa
Anokromo/Anggota.
apel Binas Kotamadya Dati. II Surabaya:

apala Sub Direktorat Peverintahan,
apala Sub Bagian Inmas pada Kantor
Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya.

A.n. WALIKOTAMADYA SURABAYA
TINGKAT II SURABAYA
SEKRETARIS MELAYAH / BAWON
U.b.
KEPALA SUB DIR. PEREKONOMIAN

(SASTRIAN ANANDI)

Lampiran - Lampiran

Lampiran 37



**WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

Surabaya, 23 Mei 1978 .-

Nomor : 0207/378/78
Lampiran :
Perihal : Serangan hama wereng.

Kepada
Yth. Bapak Pembantu Gubernur
di -
SURABAYA.-

Dikirimkan dengan hormat daftar adanya serangan hama wereng dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- | | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| 1. Varietas padi yang diserang | : Non V.U.T.W. | |
| 2. Umur rata-rata | : 1½ - 2½ bulan. | |
| 3. Luas serangan meliputi | : 2 Wilayah Kecamatan : | |
| | Karangsambung dan Tandus, 15 desa | |
| | seluas | 687 Ha. |
| | a. Bimas | 391,25 Ha. |
| | b. Inmas | 213 Ha. |
| | c. Non Bimas/Inmas | 292,75 Ha. |
| 4. Intensitas serangan | : a. Berat | 194 Ha. |
| | b. Sedang | 300,25 Ha. |
| | c. Ringan | 392,75 Ha. |
| 5. Daerah bahaya meliputi | : 390 Ha. | |
| 6. Sawah yang menjadi Puso | : 63 Ha. | |
| 7. Tindakan yang telah diambil | | |
| a. Penyemprotan dengan obat-obatan | | |
| -oleh petani sendiri dengan hand-sprayer | : 375,75 Ha. | |
| -oleh Diperta dengan power sprayer | : 440,25 Ha. | |
| - dengan Swing Fog | : 71 Ha. | |
| b. Bantuan dari Penda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya : | | |
| -berupa obat-obatan | : 1360 liter = Rp. 1.672.800,- | |
| -berupa wang operasional/perbaikan peralatan. | : = Rp. 165.000,- | |
| c. Meningkatkan penyuluhan tentang kesehatan penggunaan bibit V.U.T.W. | | |

Demikian untuk menjadikan periksa.-

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

(Drs. SONDJATONO)
NIP. 010015744

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Dati. II Surabaya.
3. Sdr. Para Pembantu Walikota :
a. Surabaya Utara, b. Surabaya Selatan.
4. a. Sdr. Kepala Sub Direktorat Perencanaan,
b. Sdr. Kepala Sub Direktorat Pemerintahan.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 38



**WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

Surabaya, 22 Mei 1978

Noor :
Lampiran :
Perihal : Sebaiknya program
Pengabdian Masyarakat Tahun 1978/1979.

Kepada
Yth. 1. Ketua/Manager BUDU/ADU
- Karangpilang,
- Sukolilo
2. Pengurus Fabrik Beras
- "Kedurus"
- "Sumber Baru"
di -
SURABAYA

Sesuai pembicaraan dalam rapat Tim Pengabdian Kangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Mei 1978, yang antara lain memutuskan peningkatan prestasi para kontraktor pemadatan pangan.

Persama ini saya minta perhatian Saudara supaya pada saatnya Saudara telah selesai, secepat mungkin pemadatan gulah/beras untuk kepentingan Stock Nasional kepada Dolog Jawa Timur of least 506 Golog Surabaya Utara, sesuai jumlah yang telah Saudara sanggupikan.

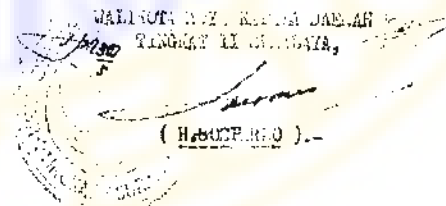
1. BUDU/ADU.
 - Karangpilang) 50.000 Kg beras.
 - Sukolilo)
2. NON BUDU/KUD.
 - PB.Kedurus 100.000 Kg beras.
 - PB.Sumber Baru 100.000 Kg beras. +
 - 250.000 Kg beras.

Dalam hal ini sekali lagi saya mengingatkan Saudara supaya pelaksanaan nya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Inpres No. 11, tahun 1977, dan petunjuk-2 pelaksanaannya, antara lain Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.Ek.0.11.2/53/1977, tanggal 21 Januari 1978.

Demikian harap maklumi dan pelaksananya.

TEPATKAN Kepada Yth :

1. Kepala Pembantu Gubernur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya
 - a. di Surabaya Utara,
 - b. di Surabaya Timur,
 - c. di Surabaya Selatan
3. Sdr. Kepala Kantor Binsjen Koperasi Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya.
4. Sdr. Kepala Sub Dolog Surabaya Utara.
5. a. Sdr. Kepala Sub Direktorat Perakonomian,
b. Sdr. Kepala Sub Direktorat Sosial Politik,
c. Sdr. Kepala Sub Bagian Hukum,
pada Kantor Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.



Lampiran - Lampiran

Lampiran 39

KOTAMADYA TK. II SURABAYA.

Surabaya. 3 Agustus 1978.

K e p a d a :

N o m o r. : Sosok/Pan/2070/XV.b. Yth. Sdr. Pembantu Gubernur K.D.H
Lampiran. : -,- Propinsi Jawa Timur
Perihal. : Pertanian Terpadu / di : SURABAYA.
M.U.T.

Mencukupi nota telpon Subdit Perekonomian Kotamadya
Tk.II.Surabaya perihal ; Pertanian Terpadu
Bersama kami sampaikan bahwa ; Pelaksanaan Pertanian
Terpadu / Model Usaha Tani Idaman di Daerah Kotamadya Tk.II
Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran dari Nasional / Regional th. 76/77 telah dilaksanakan di Desa Sambikerep Kc.Kr.pilang
2. Anggaran dari Penda Tk.II (Lodya Surabaya). th.1978 / 1979 yg direncanakan lokasinya di Wilayah Kc.Kr.pilang dan Kc.Mandre sampai saat ini pelaksanaannya menunggu pencairan keuangan, dimana kegiatan fisik Proyek nantinya dimulai pada kwartal I, th 1978/1979

Kemudian untuk menjadikan maklun.

Kepala Dinas Pertanian Rakyat
Kotamadya Tk.II.Surabaya.

Terbusan: Kepada Yth.

1. Sdr. Walikota K.D.H. Kotamadya
Tk.II.Surabaya.
2. " Ka. Subdit Perekonomian
K.D.H.
3. a r s h i p .

Lampiran - Lampiran

Lampiran 40



**WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

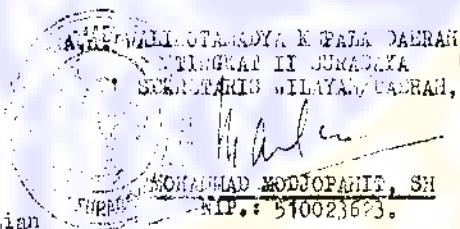
Surabaya, // DESEMBER 1978

Nomor : *000/1065/78*
Lampiran :
Perihal : Daftar pengecer pu-
guk/obat-obatan Bi-
mas/Non Bimas/Inmas

K e p a d a :
Yth. Sdr. Para Penyalur Pupuk/
Obat-obatan dari :
- PT. Pertani
- Pa. Tamansari
- CV. Kertopaten
- CV. Tulus Karya
di
SURABAYA

Mengharapkan perhatian Saudara untuk mengirimkan daftar perihal tersebut pada pokok surat yang selama ini Saudara lampiri, paling lambat tanggal 16 Desember 1978, menurut contoh daftar terlampir dalam 2 (dua) ganda.

Oemikian harap maklum dan pelaksanaannya.



LEMBUJAH, kepada Yth.:

1. a. Sdr. Kepala Sub Dit. Perkonomian
b. Sdr. Kepala Sub Dit. Pemerintahan
pada Kantor Walikotaamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Rakyat
Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Koperasi
Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya.
4. A r s i p

Lampiran - Lampiran

Lampiran 41



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SURAT PERSetujuan PENYELANGGERAAN PEST CONTROL.

NOOR : 6710/34/78

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

MEMPERHATIKAN :

- 1 : Surat permohonan dari Saudara EDDY SOEBAGIO cq P.T. SISNA SARI CABANG SURABAYA Jalan Setali No. 6 Surabaya tanggal 11 September 1978 Nomor: 0395/K/88/U/IX/78 perihal permohonan perpanjangan izin usaha untuk menyelenggarakan Pest Control/Pembasmian nama diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- 2 : Rekomendasi/Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No.0093/XI/23/78 tanggal 25 September 1978 tentang perpanjangan izin usaha Pest Control atas nama P.T. Sisna Sari Cabang Surabaya.

Dengan ini : Diberikan perpanjangan perpanjangan izin kepada :

Mr. EDDY SOEBAGIO cq P.T. SISNA SARI CABANG SURABAYA.
Jalan Setali No. 6 Surabaya.

- 1 : Untuk memperpanjang izin usaha mengadakan penyelenggaraan Pest Control/Pembasmian nama diseluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Perusahaan harus berbentuk badan hukum.
 2. Harus ada seorang tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknis dengan disertai pernyataan.
 3. Harus melaporkan kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum mengadakan pelaksanaan pembasmian nama, menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Waktu pelaksanaan.
 - 3.2. Tempat pelaksanaan.
 - 3.3. Syarat - syarat pelaksanaan.
 - 3.4. Bahan-bahan yang dipakai aktif/substansinya, letak dosis untuk manusia dan pernah dites dimana.
 4. Melaporkan dan memberikan laporan bulanan berkala tentang kegiatannya kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

5. Melaporkan serta memberikan daftar nama-nama bahan pestisida yang dipakai.
6. Gedung tempat penyimpanan pestisida dan bahan-bahan lainnya untuk keperluan Pest Control tidak boleh berdekatan dengan tempat tinggal dan tidak boleh terletak didaerah banjir.
7. Untuk membersihkan alat-alat Pest Control tidak boleh berdekatan dengan rumah tangga.
8. Harus menaati semua peraturan/petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan penggunaan pestisida.

D U A : Surat persetujuan ini tidak boleh diperkan/dialihkan kepada pihak - lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

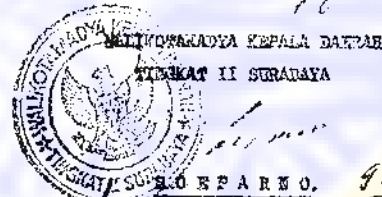
T I G A : Surat persetujuan ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila ternyata dilakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diperpanjang lagi atas - permohonan pemegang izin setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

K E M P A T : Dengan dikeluarkannya surat persetujuan ini, maka surat izin persetujuan Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 September 1977 No. 6700/500/77 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : S u r a b a y a .

Tanggal

: 67 Januari 1979



ditandatangani kepada :

- a. Dan Wil Tubes Kepolisian 101 Surabaya.
- b. Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- c. Kepala Dinas Pengawasan Wilayah Inspektoriat Daerah Pajek Propinsi Jawa Timur Utara di Surabaya.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya.
- e. Kepala Dinas Pendapatan & Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- f. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- g. Para Pembantu Walikota/Kepala Daerah Tk. II Surabaya di Surabaya Utara, Timur dan Selatan.

A r . . .



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA

Nomor : 6700/333/79

WALIKOTAMADYA SURABAYA : 1 APRIL 1979

MEMPERHATIKAN :

1. Surat permohonan dari Saudara BENNY A. TONGKO qq MANAGER U.V. PRIMA alamat Jl. Kenari Lobar No. 6 Surabaya, tanggal 19 April 1979 Nomor 075/ppc/IV/79, perihal perpanjangan izin usaha untuk menyelenggarakan Post Control/Pembasian hama di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
2. Rekomendasi/Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya No. 0003/IV/33/79 tanggal 20 April 1979 tentang permohonan perpanjangan izin usaha untuk mengadakan pembasian hama/post-control atas nama U.V. PRIMA

Dengan ini : Membeikan perpanjangan perpanjangan izin usaha :

Sdr. BENNY A. TONGKO qq MANAGER U.V. PRIMA
Jl. Kenari Lobar No. 6 Surabaya.

P E N T A N G A N : Untuk memperpanjang izin tempat usaha mengadakan penyelenggaraan Post Control/pembasian hama diseluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan harus berbentuk badan hukum.
2. Harus ada seorang tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknis dengan disertai pernyataan.
3. Untuk melaporkan kepada Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya qq Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum diadakan pelaksanaan pembasian hama, mengangkut hal-hal dan hal-hal berikut :
 - 3.1. Waktu pelaksanaan.
 - 3.2. Tempat pelaksanaan.
 - 3.3. Syarat - syarat pelaksanaan.
 - 3.4. Bahan-bahan yang dipakai aktif/substansinya, letak dan usia untuk manusia dan pernah dites dimana.
4. Melaporkan dan memberikan laporan bulanan menyangkut kegiatan nya kepada Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya qq Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya.

- 2 -

5. Haloguanida serta merkaptana organik hasil - hasil bahan pestisida yang dipakai.
6. Gedung tempat penyimpanan pestisida dan bahan - bahan lainnya - untuk keperluan Pest Control tidak boleh berdekatan dengan tong pest tinggal dan tidak boleh terletak di daerah banjir.
7. Untuk membersihkan alat - alat Pest Control tidak boleh berdekatan dengan rumah tangga.
8. Harus mentaati semua peraturan, petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan penggunaan pestisida.

K E D U A : Surat persetujuan ini tidak dapat dipergok/dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

K E T I G A : Surat persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat persetujuan ini, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata pelaksanaan polonggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diperpanjang lagi atas permohonan pemegang izin setelah mendapat pertimbangan - dari Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

K E M P A T : Dengan dikeluarkannya surat persetujuan ini, maka surat izin persetujuan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal - 26 Oktober 1976 No.6700/466/1976 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : S u r a b a y a.

Tanggal : 1 1 1 1 1 1 1 1



TAMBAHAN disampaikan kepada :

1. Sdr. Dan Mil Tabes Kepolisian 101 Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Hidayah Inspektorat Daerah Pajak Propinsi Jawa Timur Utara di - Surabaya.
3. Sdr. Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Tingkat II Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan & Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
6. Sdr. Kepala Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
7. Sdr. Pembantu Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya Utara, Timur dan Selatan.



**WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

SURAT PERSetujuan PENYELANGGARAAN PEST CONTROL.

Nomor : 107/11/18/79

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat permohonan dari Saudara ISKANDAR MUDA SIANIPAR qq Fa.KAPSECON alamat Jl.Joyoboyo No.25 Surabaya, tanggal 26 Maret 1979 No.15/ KP /8/79, perihal permohonan izin usaha untuk menyelenggarakan Pest-Control/Pembasmian hama divilayah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya.
2. Rekomendasi/Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya No.: 0003/II/18/79 tanggal 22 Februari 1979 tentang izin usaha Pest Control atas nama Fa.Kapsecon.

Dengan ini : Memberikan persetujuan izin kepada :

Sdr.ISKANDAR MUDA SIANIPAR qq Fa. KAPSECON.

Jl. Joyoboyo No.25 Surabaya.

P E R T A M A : Untuk mengadakan penyelenggaraan Pest Control/pembasmian hama disekeliling wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan harus berbentuk badan hukum.
2. Harus ada seorang tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknis - dengan disertai pernyataan.
3. Harus melaporkan kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Cq.Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam waktu 2 (dua) Minggu sebelum mengadakan pelaksanaan pembasmian hama, menyangkut hal - hal sebagai berikut :
 - 3.1. Waktu pelaksanaan.
 - 3.2. Tempat pelaksanaan.
 - 3.3. Syarat - syarat pelaksanaan.
 - 3.4. Bahan-bahan yang dipakai efektif/substansinya, lethal dosis untuk manusia dan pernah dites dimana.
4. Melaporkan dan memberikan laporan bulanan menyangkut kegiatannya kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya.

5. Melampirkan serta memberikan daftar nama-nama bahan pestisida yang dipakai.
6. Gudang tempat penyimpanan pestisida dan bahan-bahan lainnya untuk keperluan Pest Control tidak boleh berdekatan dengan tempat tinggal dan tidak boleh terletak didaerah banjir.
7. Untuk membersihkan alat-alat Pest Control tidak boleh berdekatan dengan rumah tangga.
8. Harus mentaati semua peraturan/petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan penggunaan pestisida.

KEDUA : Surat persetujuan ini tidak boleh diperkeras/dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Walikota Kotamadya - Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

KETIGA : Surat persetujuan ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dilakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diperpanjang lagi atas permohonan pemegang izin setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya.

Ditetapkan di : Surabaya.

Tanggal :



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Sdr. Dan Wil Tebes Kepolisian 101 Surabaya.
2. Sdr. Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Wilayah Inspektorat Daerah Pajak Propinsi Jawa Timur Utara di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan & Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
7. Sdr. Pembantu Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya Utara, Timur dan Selatan.
8. A r s i p .-

Lampiran - Lampiran

Lampiran 42



= 107. Uonum =

WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

No. 7500/54/499
Lamp. 1976
Perihal: 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

Surabaya, 14 APRIL 1979

Kepada

Yth. Sdr. Pustaka Gubernur
di
SURABAYA

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, saya mohon dengan
sangatnya agar Bapak bersedia meninjau dan memeriksa kembali
Tingkat II tersebut, dan apabila perlu, mohon agar
diberikan keterangan kembali.



Handwritten signature and date 17/10/79

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

Lampiran - Lampiran

Lampiran 43



WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Surabaya, 13 Desember 1979

o. Surabaya, 13 Desember 1979
Kepada
1. Perwakilan dari PT. PABRIK
di kawasan perumahan penduduk
sekitar pabrik, Kecamatan
Surabaya Kota Surabaya.

Kepada
1. Dir. D. K. P. PABRIK
Surabaya.
2. Dir. D. K. P. KAWASAN
Surabaya.
di
SURABAYA

Sehubungan dengan terjadinya pencemaran lingkungan di daerah perumahan penduduk Desa Kedung Baras, Kecamatan Bungkul yang disebabkan oleh air limbah industri dari pabrik Pabrik Kertas, PT. PABRIK SURABAYA, maka tindakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. menghentikan pemakaian air limbah industri industri - usaha yang ada ke badan penduduk disekitarnya. Saluran limbah air dari pabrik yang berupa tanggul - tanggul harus ditutup.
2. Baik kepada PT. PABRIK SURABAYA maupun PT. PABRIK SURABAYA sebagai induk dan mengoperasikan waste water treatment plant secara sempurna di kawasan perumahan dan lingkungan perumahan di kawasan perumahan tersebut.
3. Dipertahankan kepada Desa dan masyarakat setempat pengendalian air limbah industri dan lingkungan. Laporan hasil analisis air limbah secara periodik setiap bulan sekali kepada Kepala Instansi Proyekasi Daerah Tingkat II dan Komisaris Kota Surabaya. Daerah Tingkat II Surabaya.
4. Masyarakat perlu juga yang dituntut oleh pemerintah setempat secara sujawarah antara pihak industri dengan penduduk setempat yang lingkungan sekitarnya rusak.

W. A. S. S.

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
Risa
... ..

- DAFTAR ISI
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

1979

Lampiran - Lampiran

Lampiran 44



WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Surabaya, 17 April 1981

Nomor :
 Lampiran : 0 (seseorang) lembar
 Perihal : Laporan pertanggungjawaban
 pelaksanaan kredit-
 simas M. 1970/1971 -
 s/d M. 1980/1981 ba-
 jian bulan Maret -
 1981.

Dikembangkan dengan bentuk laporan pertanggungjawaban pengembalian kredit simas M. 1970/1971 - s/d M. 1980/1981 bulan Maret tahun 1981 dan M. 1980/1981 bulan Maret tahun 1981, sebagai berikut

- I. Tunjangan M. 1970/1971 :
 - a. Realisasi Rp. 11.300.417,50 (4,41%)
 - b. s/d tanggal 31 Maret 1981 Rp. 11.300.417,50
 - c. sisa tunggakan yang harus di lunas Rp. 24.042.403,50 (4,36%) selanjutnya dengan tunai.
- II. Tunjangan M. 1977/1978 :
 - a. Realisasi Rp. 1.000.000,00
 - b. s/d tanggal 31 Maret 1981 Rp. 1.000.000,00
 - c. sisa tunggakan yang harus di lunas Rp. 5.133.000,00 (6,23%) selanjutnya dengan tunai.
- III. Tunjangan M. 1978/1979 :
 - a. Realisasi Rp. 49.179.417,50
 - b. s/d tanggal 31 Maret 1981 Rp. 49.179.417,50
 - c. sisa tunggakan yang harus di lunas Rp. 17.523.123,50 (17,62%) selanjutnya dengan tunai.
- IV. Tunjangan M. 1979/1980 :
 - a. Realisasi Rp. 11.000.000,00
 - b. s/d tanggal 31 Maret 1981 Rp. 11.000.000,00
 - c. sisa tunggakan yang harus di lunas Rp. 21.023.403,50 (21,11%) selanjutnya dengan tunai.
- V. Tunjangan M. 1978/1979 :
 - a. Realisasi Rp. 40.000.000,00
 - b. s/d tanggal 31 Maret 1981 Rp. 40.000.000,00
 - c. sisa tunggakan yang harus di lunas Rp. 11.523.123,50 (30,59%) selanjutnya dengan tunai.

W.

- 2 -

VI. Tunggakan MT.1979/Gadu :

a. Realisasi	Rp	22.675.553,75
b. s/d tanggal 31 Maret 81 masuk	Rp	14.369.574,--
c. Sisa tunggakan yang harus di selesaikan dengan tuntas.	Rp	8.305.979,75 (36,63%)

VII. Tunggakan MT.1979/1980 :

a. Realisasi	Rp	37.026.687,50
b. s/d tanggal 31 Maret 81 masuk	Rp	19.564.421,75
c. Sisa tunggakan yang harus di selesaikan dengan tuntas.	Rp	17.465.265,75 (47,17%)

VIII. Tunggakan MT.1980/Gadu :

a. Realisasi	Rp	3.752.420,--
b. s/d tanggal 31 Maret 81 masuk	Rp	1.940.337,50
c. Sisa tunggakan yang harus di selesaikan dengan tuntas.	Rp	1.816.082,50 (48,27%)

IX. Seluruh Kredit Bimas dari MT. 1970/1971 s/d MT.1980/Gadu :

a. Realisasi	Rp	511.836.935,89
b. s/d tanggal 31 Maret 81 masuk	Rp	511.885.259,90
	Rp	70.011.666,95 (12,02%)

X. Realisasi Kredit Bimas MT.1980/1981 s/d tanggal 31 Maret 1981,

sejumlah	Rp	12.374.775,--
masuk	Rp	58.570,--
sisa	Rp	12.316.185,-- (99,52%)

Demikian harap maklum.

KOTAMADYA SURABAYA
KANTOR DAERAH
PARTY GERAKAN MASYARAKAT
SURABAYA

SIMPON

Drs. MOHAWATI MUDAHA

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya.
2. Sdr. Dan Wil. Tabgs Kepol 101 S'abaya
3. Sdr. Ketua Team Pengawas Bimas pada Satpel Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Kasi Intell Kejari Surabaya).
4. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Gresik di Gresik.
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian - Tanaman Pangan Daerah Propinsi Dati. I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kotamadya Dati. II Surabaya.
7. a. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian,
b. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan,
pada Kantor Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

A r s i p.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

KREKSI BIKAS
KOTA Madya SURABAYA

Laporan : Perkembangan pengembalian Kredit Bimas
MT.1970/1971 s/d MT.1976/1977
dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya
Per : 31 Maret 1981

| Nomor | Kecamatan | Realisasi Kredit
(Rp) | Tunggakan Kredit laporan yang lalu
(Rp) | Pengembalian pada masa laporan
(Rp) | Sisa tunggakan masa laporan
(Rp) | Persentase
(o/o) | Keterangan |
|----------|--------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Gubeng | 7.092.765,- | - | - | - | - | Lunas |
| 2. | Tambaksari | 6.014.058,75 | - | - | - | - | Lunas |
| 3. | Sukolilo | 103.189.110,65 | 4.759.115,15 | - | 4.759.115,15 | 4,61 | |
| 4. | Rungkut | 65.165.583,60 | 3.420.275,30 | 15.219,50 | 3.405.055,80 | 5,22 | |
| 5. | Wonocolo | 89.979.613,35 | 6.273.255,- | - | 6.273.255,- | 6,97 | |
| 6. | Karangpilang | 81.333.893,75 | 1.152.205,- | - | 1.152.205,- | 1,41 | |
| 7. | Tandes | 55.114.270,50 | 2.326.577,50 | 61.740,- | 2.264.837,50 | 4,10 | |
| Jumlah : | | 405.889.295,60 | 17.931.427,95 | 76.959,50 | 17.854.468,45 | 4,39 | |

SURABAYA, 18 APRIL - 1981
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
DINAS PERTANIAN
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Drs. So. A. GOWI OMBAR

LAPORAN PEMKEMBANGAN PENGEMBALIAN KREDIT BIMAS
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Laporan: Perkembangan pengembalian Kredit Bimas
 MT.1977/Gadu dalam Wilayah Kotamadya -
 Daerah Tingkat II Surabaya
 Per : 31 Maret 1981

| Nomor | Kecamatan | Realisasi Kredit
(Rp) | Tanggakan Krg
dit laporan
yang lalu,
(Rp) | Pengembalian
pada masa la
pora
(Rp) | Sisa tanggakan
masa laporan
(Rp) | Persen
tase
(o/e) | Keterangan |
|----------|--------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|
| 1. | Gubang | - | - | - | - | - | |
| 2. | Tambaksari | 297.520,- | - | - | - | - | Lunas |
| 3. | Sukolilo | 4.020.060,- | 317.204,- | - | 317.204,- | 7,89 | |
| 4. | Rungkut | 697.702,90 | 36.181,- | - | 36.181,- | 5,19 | |
| 5. | Wonocolo | 4.078.222,56 | 249.885,- | - | 249.885,- | 6,13 | |
| 6. | Karangpilang | 714.095,- | 9.865,- | - | 9.865,- | 1,38 | |
| 7. | Tandes | - | - | - | - | - | |
| Jumlah : | | 9.807.600,- | 613.135,- | - | 613.135,- | 6,25 | |

Surabaya, 13 APRIL - 1981
 KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 SURABAYA,
 BAWA SUDARNO
 KETUA I BAPPEL BIMAS

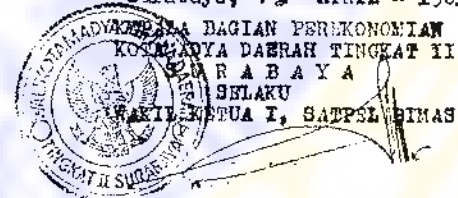
KOTAMADYA

KOTAMADYA SURABAYA

Laporan Perkembangan pengembalian Kredit Bimas
 MT.1977/1978 dalam Wilayah Kotamadya -
 Daerah Tingkat II Surabaya
 Per : 31 Maret 1981

| Kecamatan | Realisasi Kredit
(Rp) | Tunggakan Kre -
dit laporan
yang lalu
(Rp) | Pengembalian
pada masa lg
porsi
(Rp) | Sisa tunggakan
mana laporan
(Rp) | Prosen
tase
(o/o) | Keterangan |
|--------------|----------------------------|---|---|--|---------------------------|------------|
| Gubeng | | | - | | | |
| Tambaksari | 823.910,- | 23.634,- | - | 23.634,- | 2,87 | |
| Sokolilo | 9.763.557,50 | 2.489.386,- | 5.000,- | 2.484.386,- | 25,97 | |
| Rangkat | 4.209.905,- | 739.870,- | 2.245,- | 737.625,- | 17,52 | |
| Wahoolo | 4.347.725,- | 107.035,- | - | 107.035,- | 2,46 | |
| Karangpilang | 18.182.122,50 | 2.263.583,50 | 2.154,- | 2.261.409,50 | 12,43 | |
| Tandes | 12.048.197,50 | 3.152.116,- | - | 3.152.116,- | 26,16 | |
| Jumlah : | 49.175.417,50 | 8.775.604,50 | 9.399,- | 8.766.205,50 | 17,82 | |

Surabaya, 12 APRIL - 1981



SARABAYA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Laporan: Perkembangan pengembalian kredit Bimas
MT. 1978/Gada dalam Wilayah Kotamadya -
Daerah Tingkat II S u r a b a y a
Per : 31 Maret 1981

| Nomor | Kecamatan | Realisasi Kredit
(Rp) | Tanggakan Kredit laporan yang lala
(Rp) | Pengembalian pada masa laporan
(Rp) | Sisa tanggakan pada laporan
(Rp) | Prosen tase
(o/o) | Keterangan |
|----------|--------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------|
| 1. | Gubang | - | - | - | - | - | |
| 2. | Tambaksari | - | - | - | - | - | |
| 3. | Sokolilo | 5.745.895,- | 1.804.853,- | - | 1.804.853,- | 31,41 | |
| 4. | Rangkat | 2.430.345,- | 568.682,50 | 16.090,- | 552.592,50 | 22,73 | |
| 5. | Wonocolo | 4.430.415,- | 304.958,- | - | 304.958,- | 6,88 | |
| 6. | Karangpilang | - | - | - | - | - | |
| 7. | Tandes | - | - | - | - | - | |
| Jumlah : | | 12.606.655,- | 2.678.493,50 | 16.090,- | 2.662.403,50 | 21,11 | |

Sarabaya, 10 APRIL - 1981

DAERAH BACIAN PEREKONOMIAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A
SELAKU
WAKIL KETUA I SATPIM BIMAS,
Drs. H. A. GOWI OSMAR

SATUAN PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Laporan : Perkembangan pengembalian Kredit Bimas
MT.1978/1979 dalam Wilayah Kotamadya -
Daerah Tingkat II S u r a b a y a
Per : 31 Maret 1981

| Nomor Urat | Kecamatan | Realisasi Kredit
(Rp) | Tunggakan Kre-
dit laporan
yang lalu
(Rp) | Pengembalian
pada masa la-
poran
(Rp) | Sisa Tunggakan
masa laporan
(Rp) | Prosen
tase
(o/o) | Ket |
|------------|--------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------|-----|
| 1. | Gubeng | - | - | - | - | - | |
| 2. | Tambakereji | 467.220,- | - | - | - | - | LW |
| 3. | Sukolilo | 6.626.117,50 | 3.129.674,50 | - | 3.129.674,50 | 47,23 | |
| 4. | Rungkut | 5.635.615,- | 3.188.128,50 | 51.665,- | 3.136.463,50 | 55,65 | |
| 5. | Wonocolo | 6.050.690,- | 1.051.631,- | - | 1.051.631,- | 17,38 | |
| 6. | Karangpilang | 15.806.507,50 | 3.982.905,- | 183.656,- | 3.799.249,- | 24,04 | |
| 7. | Tandes | 6.367.457,50 | 1.411.108,50 | - | 1.411.108,50 | 22,16 | |
| Jumlah : | | 40.953.807,50 | 12.763.447,50 | 235.321,- | 12.528.126,50 | 30,59 | |

Surabaya, 13 APRIL - 1981
KEPALA BAHAGIAN PEREKONOMIAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A
SEKELU
KEL. KETUA I, SATUAN BIMAS,



Drs. H. A. GOWI GEMAR

NIP 510031271

SATUAN PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Laporan : Perkembangan pengembalian Kredit Bimas
No.1979/Gada dalam Wilayah Kotamadya -
Daerah Tingkat II S u r a b a y a
Per : 31 Maret 1981

| Nomor Urut | Kecamatan | Realisasi Kredit
(Rp) | Tanggungan Kre-
dit laporan
yang lalu
(Rp) | Pengembalian
pada masa la-
poran
(Rp) | Sisa tanggungan
masa laporan
(Rp) | Prosen
tase
(o/o) | Ketara |
|------------|--------------|----------------------------|---|--|---|---------------------------|--------|
| 1. | Gubang | - | - | - | - | - | |
| 2. | Tambaksari | 383.932,50 | 32.190,- | - | 32.190,- | 8,38 | |
| 3. | Sukolilo | 4.183.935,- | 1.641.946,- | - | 1.641.946,- | 39,24 | |
| 4. | Rungkut | 10.863.956,25 | 4.083.684,75 | 62.765,- | 4.020.919,75 | 36,94 | |
| 5. | Wonocolo | 5.974.170,- | 1.972.006,- | - | 1.972.006,- | 33 | |
| 6. | Karangpilang | 1.249.560,- | 632.686,- | 53.770,- | 638.918,- | 51,13 | |
| 7. | Tandes | - | - | - | - | - | |
| Jumlah : | | 22.675.553,75 | 8.422.514,75 | 116.535,- | 8.305.979,75 | 36,63 | |

Surabaya, 13 APRIL - 1981



KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A
KETUA I, SATPEL BIMAS,

DRS. So. A. GOWI OENAR

NIP 510031271

-tan-

